

## **RANCANGAN**

### **RISALAH RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

#### ----- **(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Hari/tanggal : Rabu, 14 Maret 2018.  
Waktu : Pukul 10.20 – 16.25 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.  
Ketua Rapat : Drs. H. Kahar Muzakir /Ketua Komisi III DPR RI.  
Sekretaris : Dra. Tri Budi Utami, SH, M.Si / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI.

#### **F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat bapak/ibu anggota komisi 3 DPR RI, yang terhormat Kepala Negara Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya. Para wartawan serta hadirin yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhana wataallah karena berkat rahmat dan karunianyalah kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka Rapat Kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri beserta seluruh jajarannya.

Sesuai dengan laporan dari sekretariat rapat kerja hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir sebanyak 26 orang dari 52 orang anggota Komisi 3 yang terdiri dari 10 Fraksi hadir semua ini 10 Fraksi luar biasa, oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka perkenan kami membuka rapat kerja ini dengan dan rapat kerja ini dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **KETOK PALU 1 X**

Selanjutnya perlu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya atas kesediannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini dengan demikian juga kami anggota komisi 3 mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya menyampaikan terima, selanjutnya pimpinan menawarkan meminta dan meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja hari ini yaitu 1. Penjelasan terhadap beberapa hal penjelasan dari Kapolri terhadap beberapa hal sebagai berikut : pelaksanaan tugas dan fungsi Polri, tindak lanjut

atas pengaduan dan kesimpulan rapat pada rapat-rapat kerja sebelumnya, evaluasi penegakan hukum selama tahun 2017 dan program prioritas, sinergisitas Polri dengan penegakan hukum lain dalam penanganan korupsi, persiapan Polri dalam menghadapi Pilkada tahun 2018 dan netralitas Polri dalam Pilkada, pengungkapan kasus-kasus actual, tanya jawab kesimpulan dan penutup, apakah di setujui.

**RAPAT :**

Setuju.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Setuju.

### **KETOK PALU 1X**

Kami juga ingin menyampaai, mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 12.

**RAPAT :**

Setuju.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Setuju.

### **KETOK PALU 1X**

**F-PDIP ( ARTERIA DAHLAN, ST., SH.):**

Jangan dibatesin ketua nanti jangan dibatasin.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Nda kita anu tentative pada nya itu kita pertamakan disetujui sampai jam 12 ya.

Untuk mempersingkat waktu selanjutnya kami serahkan pada Kapolri untuk menyampaikan penjelasan nya, kami persilahkan.

**F-PKS ( H. ABOE BAKAR AL-HABSY, SE.):**

Intrupsi ketua, sekedar masukan saja karena kita baru berjumpa lagi setelah masa sidang yang lalu kita belum berjumpa banyak anggota baru yang belum dikenalkan kepada mitra kita pak, saya izin kalau diperkenalkan aja kawan-kawan itu terima kasih.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Baik terima kasih Pak Habib dan Habib ini sangat perhatian dengan anggota baru.

Jadi kami perkenalkan Pak, ada Pak Hinca Pandjaitan dari Partai Demokrat, Pak Yosef dari Partai Demokrat masih ada yang baru lagi.

**ANGGOTA ..... :**

Pak Erwin.

**ANGGOTA ..... :**

Pak Tobing.

**ANGGOTA ..... :**

Pak Erwin .....

**RAPAT :**

Tepuk tangan.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Pak Erwin Tobing ini Polisi juga pak, habiskan.

**ANGGOTA ..... :**

Cukup, cukup.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Silahkan Pak Kapolri untuk mulai.

**KAPOLRI :**

Baik pak!

Assalamualaikum warahmatullahitaalla wabarakatuh, selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu nama budaya salam kebajikan.

Yang saya hormati Ketua Komisi 3 Bapak Kahar Muzakir sekaligus juga mengucapkan selamat meskipun telat untuk menyampaikan tapi karena inilah Raker pertama yang dipimpin langsung oleh bapak jadi tidak ada salah nya better late than never lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali, meskipun diluar sudah mengucapkan selamat tapi selamat dalam forum resmi ini untuk sebagai ketua komisi 3 dan yang saya hormati para wakil yang ada saya mendapat informasi ada yang sedang umroh ada yang masih di luar kota kemudian yang saya muliakan para anggota komisi 3 DPR RI, rekan-rekan dari Mabes Polri saya juga mengundang beberapa Kapolda ada Kapolda Jawa Barat ada ya kiri ya, Kapolda Jawa Timu, Kapolda Metro Jaya ada lagi Kapolda iya, ini yang mungkin terkait dengan beberapa mungkin isu actual yang bisa berkembang nanti ditanyakan kami persilahkan nanti nya.

Kemudian bapak-bapan dan ibu-ibu sekalian pada kesempatan yang baik ini pertama-tama tentu memanjatkan puji syukur kehadirat allah subahana wataallah atas rahmat karunia nya kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir pada acara rapat kerja ini dalam masa persidangan kali ini.

Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan secara tertulis kepada Mabes Polri dan untuk itu iijinkanlah kami menjelaskan jawaban satu persatu dan tentunya nanti seperti biasa kami serahkan kepada bapak ketua kalau nanti ada forum tanya jawab untuk itu.

Yang pertama adalah tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam Raker sebelumnya, tindak lanjut pengaduan masyarakat dalam rapat kerja tanggal 12 Oktober 2017 telah menerima Polri telah menerima 91 surat pengaduan terdiri dari 3 surat tidak ada lampirannya 23 surat tidak berkadar pengawasan serta 65 surat yang ditindak lanjuti sebagai berikut ini dari hasil pendalaman yang di lakukan oleh tim dari Bapak Irwasum yaitu 23 pengaduan dinyatakan tidak benar dan telah selesai atau tidak terbukti kebenarannya kemudian 4 pengaduan itu benar terbukti kebenarannya dan sudah ditindak lanjuti sedangkan 38 pengaduan karena masalah teknis alat bukti dan lain-lain sedang dalam proses untuk ditindak lanjuti kemudian sebagai tindak lanjut atas kesimpulan dalam rapat kerja komisi 3 tanggal 12 Oktober tersebut ada beberapa kesimpulan yang pertama komisi 3 DPR RI meminta Kapolri untuk mencermati setiap permintaan bantuan pengamanan kepada Polda dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum lainnya yang dilakukan di wilayah Polda masing-masing sebelum memutuskan untuk memberi bantuan ini mungkin pada saat itu konteks nya pada saat mengenai tindakan operasi yang dilakukan oleh teman-teman dari KPK, terhadap permintaan ini agar dilakukan klarifikasi sebelum memberikan bantuan maka Polri telah menerbitkan surat telegram No.SDR 829/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 jadi enam hari setelah rapat kerja saat itu yang me tentang permintaan bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum lain yang memuat intinya tata cara pemberian bantuan seperti diperlukan nya surat permohonan secara tertulis jadi tidak bisa datang langsung cuma minta bantuan misalnya untuk penangkapan tapi tertulis.

Kemudian mekanisme laporan berjenjang dari tingkat Polres hingga Mabes Polri terkait pemberian bantuan jadi kalau ada yang mau minta bantuan kepada Polres atau Kapolda wajib juga para pimpinan satuan itu melaporkan kepada komandan atau kepala satuan diatas nya, kalau minta bantuan ke Polres lapor ke Polda, Kapolda lapor kepada Kapolri, kalau minta bantuan kepada Polda, Kapolda lapor kepada Kapolri sehingga Kapolri Kapolda paham apa yang terjadi karena mengandung resiko.

Kemudian jumlah personil yang diperbantukan berdasarkan tingkat kerawanan yang dihadapi berdasarkan perkiraan intelegent jadi berapa yang mau diminta cocok atau tidak situasi nya kita melakukan penilaian dan setelah itu kita berikan bantuan sejumlah memang sesuai tingkat kerawanan nya.

Kemudian ketentuan perlengkapan perorangan yang digunakan ini mungkin complain pada saat ada rekan-rekan dari DPR ada anggota yang bersenjata misalnya persenjata api, senjata panjang masuk kegedung Dewan yang mulia ini, nah ini sama kita sudah memberikan arahan tentang apa saja perlengkapan yang diperlukan sesuai tingkat kerawanan kalau memang kerawanan nya rendah tidak perlu untuk terlalu over menggunakan peralatan yang berlebihan sebaliknya kalau dia rawan tentu kita akan menggunakan perlengkapan sesuai kerawanan disitu.

Kemudian ketentuan bertindak secara wajar dan tidak berlebihan alias atau over acting, exsesif dan lain-lain.

Kemudian memenuhi permintaan bantuan pengamanan oleh aparat penegak hukumnya maka Polri memandang untuk perlu untuk membuat SOP standart operating prosedur sebagai pedomanan teknis dalam pemberian bantuan pengamanan yang berlaku diseluruh jajaran, dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polres, termasuk diantaranya mengenai diskusi masalah secara umum materi yang akan dikerjakan misalnya penangkapan atau penggeledahan atau upaya-upaya lain ini setidaknya diberikan gambaran umum saja, teknis kita paham rekan-rekan dari intansi lain akan menjaga kerahasiaan tidak ingin bocor dan lain-lain kita paham itu kita menghormati itu oleh karena itu kita paling

tidak diberikan gambaran besarnya saja sehingga ketika untuk mengurangi terjadi resiko kalau nanti terjadi ada kesalahan atau ada mungkin perlawanan misalnya kita sudah siap menghadapi itu.

Kemudian saat ini setelah dibentuk Pokja kelompok kerja penyusunan SOP sudah dibentuk Pokjanya sekarang sedang menyusun draft SOP yang nantinya akan dilakukan harmonisasi baik harmonisasi internal maupun harmonisasi dengan rekan-rekan penegak hukum lainnya external agar ditemukan titik yang pas yang disepakati bersama SOP nanti tentunya kita akan tindak lanjuti kalau sudah selesai kita akan saahkan kemudian dilakukan sosialisasi kita lakukan sesegera mungkin.

Kesimpulan berikutnya Komisi 3 DPR mendukung pembentukan Densus Tipikor dengan penggunaan anggaran untuk sarana prasarana di lingkungan Polri untuk mengoptimalkan agenda pemberantasan korupsi oleh Polri, rencana pembentukan Densus tindak pidana korupsi ini telah dipaparkan di DPR di dukung namun dalam perkembangannya sesuai hasil rapat kabinet terbatas hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden disimpulkan bahwa pembentukan Densus pemberantasan tindak pidana korupsi untuk sementara waktu ditunda kita tidak ingin nanti ada situasi saat itu ada Pansus dan lain-lain kemudian menjadi bergulir kearah politis oleh karena itu di tunda. Polri diminta untuk mengkaji lebih dalam terkait rencana tersebut dengan melibatkan Pakar dan Praktisi hukum, saat ini Polri sedang, selamat datang Pak Mulfachri, saat ini kita sedang dalam tahap untuk melakukan FGD Focus Group Discussion dan meminta masukan dari beberapa nara sumber lainnya tentang Densus pemberantasan tindak korupsi ini.

Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengenai evaluasi penegakan hukum sepanjang tahun 2017 target dan strategi yang dilakukan Polri dalam tahun 2018 untuk tahun 2017 sebagai bahan evaluasi jumlah kejahatan yang ditangani Polri mengalami penurunan 23 % dari 380.826 kejadian di tahun 2016 menjadi 291.748 pada tahun 2017 di break down kejahatan konvensional ini konvensional ini penganiayaan, pembunuhan, pencurian lain-lain itu mengalami penurunan 27%, kejahatan transnasional mulai dari human trafficking kemudian amsmagling, cyber dan lain-lain turun 5%, kejahatan terhadap kekayaan Negara ini menyangkut masalah kasus korupsi misalnya kemudian kejahatan-kejahatan terhadap lingkungan naik 12%, kejahatan berimplikasi kontigensi ini maksudnya yang berhubungan dengan Konflik dan hal-hal lain yang melibatkan masa naik 16%, kejahatan konvensional turun 23%, transnasional turun 10%, kekayaan Negara turun 5% sedangkan countigensi sekali lagi naik tadi. Nah ini secara umum tapi menunjukkan penurunan, menurunnya angka kejahatan ini disebabkan berbagai langkah dan upaya yang telah dilaksanakan baik oleh Polri maupun juga dukungan stakeholder lainnya dan masyarakat di Polri kita melaksanakan penekanan pada upaya-upaya preventif dan proaktif deteksi dini deteksi aksi juga menyelesaikan masalah sebelum berkembang itu yang disebut dengan problem oriented oriented policing kemudian memperdayakan Babinkamtibmas para pimpinan satuan untuk lebih banyak turun ke bawah membangun hubungan dengan segenap elemen masyarakat sehingga keinginan atau potensi untuk berbuat kejahatan menjadi menurun demikian juga dengan langkah-langkah sosialisasi baik melalui media konvensional melalui media social serta membangun hubungan door to door ini kepada masyarakat ini juga menjadi factor yang berkontribusi penurunan angka kejahatan atau laporan sebanyak 23% selama tahun 2017. Penggelaran kekuatan juga di berbagai daerah dengan polisi-polisi berseragam, babinkamtibmas berseragam serta sejumlah operasi yang dilakukan mulai operasi khusus yang terpusat seperti operasi ketupat, rahmadiyah, operasi lilin, operasi penertiban lalu lintas, operasi penyakit masyarakat, operasi curanmor, operasi begal, lain-lain ini juga selamat datang bang ... ini juga menjadi factor contributor menurunkan angka kejahatan di tahun 2017 disamping tentunya sekali lagi dukungan dari public yang lebih baik, kerja sama dengan antar instansi

banyak yang sudah kita lakukan dengan teman-teman TNI kemudian dengan Kementerian Perhubungan, Pupera kemudian dalam bidang pangan dengan kementerian perdagangan perindustrian, Bulog lain-lain ini cukup banyak berpengaruh untuk menekan angka kejahatan.

Untuk tahun 2018 ada beberapa agenda penting disamping kita menangani kejahatan-kejahatan tadi konvensional transnasional yang berimplikasi kontigensi karena konflik kemudian juga bencana alam dan kejahatan-kejahatan yang terhadap kekayaan Negara korupsi, lingkungan kita juga focus juga kepada agenda-agenda nasional yaitu yang pertama sekali lagi pengamanan untuk hari raya dan bulan ramadhan ini nanti arus mudik kita sudah antisipasi, rapat-rapat sudah kita lakukan dari dengan stakeholder kemudian arus balik kemudian juga menjaga stabilitas harga pangan agar tidak terjadi invlasi seperti ditahun yang lalu.

Kemudian pilkada serentak 171 wilayah ini juga kita sudah menggelar operasi mantap praja dengan melibatkan kepolisian, rekan-rekan TNI kemudian dari masyarakat ini kita semua sudah lakukan dengan mengedepankan langkah-langkah yang paling utama adalah langkah proaktif untuk mendinginkan suasana jadi mendinginkan iklim politik yang relative menghangat saat ini.

Kemudian polri juga mempersiapkan diri untuk melakukan pengamanan event besar yaitu Asian Games yang ada di 2 kota 3 kabupaten officially nya adalah 2 kabupaten 2 provinsi DKI dan Sumatera Selatan tapi juga kita focus kepada di Jawa Barat, tugas utama Polri adalah melakukan pengamanan untuk itu kita bekerjasama dengan panitia kita melakukan langkah-langkah operasi pengamanan mulai sebelum kedatangan atlet kita sudah menyiapkan system cctv yang bisa memonitor ada commancenter yang dibangun di Sumatera Selatan di Polda dan di Polres Palembang kemudian juga di Jakarta di gedung baru gedung Promoter Polda Metro Jaya yang 23 lantai sekaligus kami ucapkan terima kasih kepada Komisi 3 karena ditahun lalu sudah dibantu untuk dimasukan dalam anggaran sehingga gedung yang selama 14 tahun tidak selesai Alhamdulillah tahun ini sudah selesai sudah diresmikan 23 lantai disitu di bangun command center dalam rangka untuk asia games demikian juga di Jawa Barat Polda juga sudah membangun command center yang bisa mengawasi kegiatan Asian games tentu ada kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan untuk menghadapi kemungkinan aksi terorisme misalnya dari jajaran polri juga sudah mempersiapkan diri untuk mencegah tidak terjadi aksi terorisme dan gangguan lain, lalu lintas misalnya selama 2 minggu Asian games kemudian polri juga mengantisipasi agenda lainnya agustus sudah mulai saya ulangi di bulan juni sudah mulai pileg dengan DCS daftar calon sementara, September daftar calon tetap dinamika politik juga makin menghangat agustus juga pendaftaran calon presiden wakil presiden juga kita antisipasi untuk mendinginkan suasana dan kemudian ada agenda lain yang cukup besar di bulan oktober yaitu konferensi IMF World Bank yang diikuti oleh belasan ribu tokoh-tokoh keuangan dunia di Bali ini juga kita sudah melakukan operasi khusus dan kita sudah siapkan dengan mengikut sertakan stakeholder termasuk system cctv system pengawasan tempat itu sudah kita siapkan di Polda Bali.

Kemudian nanti yang terakhir nanti kami focus kepada pengamanan hari besar yaitu hari raya sekaligus juga tahun baru yang biasa juga akan ramai ini kita gelar operasi yang disebut dengan operasi lilin untuk natal saya ulangi untuk lebaran dan ramadhan kita gelar operasi yang dulu nama nya rahmadaniah sekarang menjadi operasi ketupat karena rahmadaniah kami mendapat complain cape sekali nyebutkan kata nya gitu nah kalau ketupat udah gampang gitu pak.

Kemudian disamping itu kami itu memang polri tetap focus juga kepada beberapa kegiatan penting yaitu untuk menjaga stabilitas pangan terutama hal-hal yang pokok karena ini berkaitan langsung

dengan inflasi dan kebutuhan rakyat masalah beras, masalah daging, masalah gula dan lain-lain untuk itu dibentuk satgas pangan berkerjasama dengan kementerian perindustrian perdagangan dan bulog.

Kemudian operasi penanganan terorisme masih kita lakukan di Poso operasi Tinombala karena masih ada kurang dari 10 orang lagi yang masih melakukan aksi disana dan ini operasi belum kita cabut masih terus dilakukan tapi anggota nya dikurangi sesuai dengan jumlah sasaran atau pelaku yang ada disana.

Kemudian menyimak dinamika yang terjadi di Papua paska penyanderaan di Freeport beberapa waktu yang lalu serta monitoring situasi yang ada disini maka Mabes Polri juga membackup Polda Papua dengan membentuk satgas Papua damai yang tujuannya sekali lagi untuk melakukan langkah-langkah soft terutama dan penegakan hukum yang terbatas menghadapi gangguan-gangguan yang terjadi di Papua.

Terakhir kita juga membuat Satgas Nusantara dan Satgas anti politik uang ini terutama pada jaman saat pilkada Satgas Nusantara ini model nya yang paling utama adalah melakukan langkah proaktif dengan mengajak masyarakat yang peduli untuk pilkada damai agar menyuarakan hal-hal isu-isu kebersamaan isu toleransi isu masalah persatuan kesatuan bangsa, isu masalah kedamaian kemudian isu masalah kebhinekaan ini yang dibangun dengan meminta kepada tokoh-tokoh masyarakat ormas-ormas yang peduli kepada pilkada damai untuk mengkampanyekan tujuannya sekali lagi buat mendinginkan bukan untuk kepentingan mendukung partai calon apapun juga.

Kemudian satgas money politic ini tujuannya sebetulnya adalah sekali lagi tidak ingin mentarget pihak-pihak tertentu partai tertentu apapun tidak tapi untuk mengurangi dampak penggunaan politik uang dalam rangka pilkada sebagaimana kami pernah sampaikan pada saat rapat dengan para pimpinan DPR lebih kurang 2 bulan lalu yang dipimpin langsung oleh para pimpinan DPR bahwa sistem pilkada langsung ini banyak memberikan manfaat positif adanya partisipasi publik dalam memilih pemimpin secara langsung tapi di sisi lain kami dari Polri melihat ada juga beberapa dampak negatifnya diantaranya Papua misalnya 2017 lalu cukup banyak korban Tolikara, Intan Jaya, Puncak Jaya kemudian beberapa daerah lain juga ada konflik tapi kita bisa tangani.

Kemudian yang kedua adalah adanya kecenderungan untuk biaya tinggi jadi pilkada langsung eh demokrasi biaya tinggi para pimpinan para pasangan calon untuk menjadi calon Bupati atau Walikota atau Gubernur mereka harus membangun jaringan dalam waktu yang lama kemudian menggunakan uang mungkin karena memang begitu situasinya tidak cukup dengan ditutup dengan gaji yang bersangkutan sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali kepala daerah yang terkena OTT diduga terlibat tindak pidana korupsi untuk itu sambil kami menyarankan untuk dilakukan evaluasi tentang sistem pilkada langsung ini kalau memang baik dilanjutkan kalau lebih banyak mudaratnya mungkin dicarikan solusi yang lain tapi untuk merejust dan match kebijakan yang sudah kita lakukan proses sudah jalan maka Polri bersepakat dengan Kejaksaan dan KPK untuk mengawasi politik uang terutama dengan metode OTT saya kira dari KPK dari sudah melakukan OTT dari Polri juga sudah satu kali di Garut melaksanakan OTT kepada Panwaslu dan KPU diduga menerima suap dari pasangan calon tertentu sekali lagi ini tujuan hanya untuk merejust dan match tanpa bermaksud untuk berpihak kepada partai manapun juga, kemudian sinergisitas penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi ini sudah kita bangun kerjasama terutama dengan KPK dan Kejaksaan kita meminta juga untuk memperkuat sistem pencegahan kami sudah sampaikan bahwa metode yang selama ini terjadi adalah hit and run artinya ditangkap OTT dan setelah itu selesai di proses hukum kita menginginkan adanya hit and ficks

jadi kalau sudah ditangkap di proses cari akar masalahnya apa perbaiki akar masalah itu supaya tidak terulang disamping lebih mengedepankan langkah-langkah pencegahan disamping selain pemberantasan yang selama ini mungkin cukup intens, beberapa kegiatan kita juga kita lakukan latihan bersama antara Polri, Kejaksaan KPK cukup banyak di berbagai wilayah untuk meningkatkan kapasitas sekaligus membangun hubungan antara person to person di beberapa lembaga pendidikan maupun kursus-kursus singkat dengan ketiga lembaga ini demikian juga melakukan sosialisasi bersama dengan Pemda maupun Satker-satker BUMN, BUMD ditingkat pusat dalam rangka untuk menekan tindak pidana korupsi. Selama ini dukungan dari kepolisian kepada KPK khususnya kita berikan dukungan semaksimal mungkin untuk menangani dalam operasi-operasi ada bahkan beberapa operasi yang kita lakukan dengan sistem operasi bersama atau join investigation karena KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi sehingga ada kordinator-kordinator supervisi kepada kepolisian dan itu memungkinkan untuk dilakukan join investigation kemudian terkait dengan pilkada serentak 2018 sekali lagi dalam rangka untuk mendinginkan dan mencegah potensi konflik kami melihat pada tahun 2000 pilkada serentak ini dalam berbagai kesempatan kami sudah sampaikan kemungkinan situasi yang mungkin kurang begitu bagus seperti pilkada di DKI kecil kemungkinan akan terjadi di wilayah di 171 wilayah ini kenapa karena case di Jakarta paling tidak ada 4 faktor yang membuat situasinya relative cukup memanas yang pertama mungkin latar belakang salah satu pasangan calon kemudian baik keagamaannya maupun keturunan ditambah dengan mungkin ada beberapa pihak yang kurang nyaman dengan cara berbicara salah satu pasangan calon ditambah lagi dengan component ke 4 yaitu partai pendukung pemerintah dan partai oposisi pada posisi yang bersebrangan dengan calon masing-masing namun di 171 wilayah pilkada serentak ini kami melihat bahwa unsur yang ke 4 ini cukup signifikan untuk tidak terjadi banyak sekali crossing-crossing, sharing-sharing antara partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi dalam mengusung calon tertentu sehingga ini justru bisa menjadi salah satu faktor pendingin kemudian disamping itu beberapa isu mengenai masalah keagamaan latar belakang agama, latar belakang kesukuan atau latar belakang ke rasan keturunan ras yang sensitive tidak banyak muncul terjadi di semua wilayah mungkin ada satu dua wilayah tertentu yang memiliki faktor itu dan ini tentu kita akan berikan atensi khusus dan pengamanan khusus ditempat itu terutama mendinginkan suasana sekaligus mempersiapkan pasukan yang cukup di daerah-daerah seperti itu.

Kemudian kami lanjutkan untuk pengamanan pilkada serentak ini maka Polri telah menggelar operasi namanya mantap praja dan kemudian kita sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait TNI, Pemda, Bawaslu, Kemendagri, Panwaslu, Kominfo rapat dilakukan juga bersama dipimpin oleh Menkopolkham untuk menyamakan persepsi apa saja permasalahan-permasalahannya yang kita temukan di inventarisir dan setelah itu kita upayakan selesaikan permasalahan-permasalahan itu misalnya mengenai masalah E-KTP yang terjadi di Papua misalnya karena menurut undang-undang pemilihan sah kalau seandainya dia memiliki E-KTP ini bagaimana dengan Papua ini sedang dicarikan solusi disana.

Jumlah pasukan yang kita libatkan untuk pilkada serentak ini sebanyak 1.107.310 personel Polri 184.013 personel, TNI 99.559 dan dari masyarakat yang namanya Linmas perlindungan masyarakat 823.738 ini terutama untuk TPS nanti seperti biasa nanti akan ada pembagian ring satu, ring dua, ring tiga TPS yang kita anggap sangat rawan aman di daerah-daerah ada 13 kalau tidak salah daerah yang calon tunggal itu relative aman nantinya, kita otomatis mengamannya akan lebih kendor tugasnya kita perbantukan untuk daerah yang kita anggap rawan tapi dengan kekuatan ini kami merasa confident cukup karena cukup banyak wilayah yang kita anggap ini crossing antar partai isu-isu agama tidak



muncul disana, isu-isu masalah ras tidak muncul disana sehingga lebih banyak pertarungan mungkin pendukung saja.

Kemudian kita juga mempersiapkan pasukan stanby baik dari Polri dan TNI, Polri Brimob itu kita siapkan sebanyak 41.333, TNI juga mempersiapkan dan kita sudah melakukan latihan bersama berkali-kali disemua wilayah sudah dilaksanakan latihan bersama pertingkat kabupaten kota, tingkat provinsi sudah latihan bersama, tingkat Mabes Polri yang sedang kita lakukan juga nanti disusul untuk latihan bersama nanti bulan Mei kami akan melakukan apel Kasatwil untuk melihat kesiapan terakhir kesiapan terakhir pasangan-pasangan calon kita beruntung bahwa masa kampanye relative cukup panjang dari Februari sampai dengan Juni 4 bulan sehingga dengan masa kampanye yang panjang in relative mengaturnya lebih mudah dan masyarakat juga dinamika tidak terfokus apa lagi sekarang ada nya IT, media social ini bisa menjadi juga salah satu saluran untuk melakukan kampanye dan mengurangi tehnik kampanye mobilisasi massa yang biasanya rawan konflik.

Kemudian untuk kebiutuhan anggaran pengamanan ini menggunakan APBD daerah masing-masing sudah dipenuhi sebanyak 64,61 % ini tersebar di semua Polres-polres dan Polda-Polda sedangkan mabes polri ktia memiliki dana kontegensi yang jumlahnya sekitar 300an milyar yang kita bisa gunakan ketika terjadi keadaan tertentu maka ktia bergerak dengan cepat ketempat itu dengan sistem backup antara wilayah yang terdekat untu ktahap awal kalau kurang maka akan ditambah dengan kekuatan dari Mabes Polri khusus nya Brimob dan ditambah dengan satuan TNI yang juga siap, yang siap maksimal 9 jam itu sudah ada di lokasi jadi saya kira kalau dengan mekanisme seperti ini bila terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan tidak akan bisa, tidak, insyaallah tidak meluas,

Kemudian rapim polri sudah kami laksanakan dalam menghadapi pilkada serentak ini tanggal 23 Januari Polri dan TNI sudah melakukan rapim untuk menghadapi pilkada serentak kita membuat kesepakatan-kesepakatan MUO ada dan dihadiri langsung oleh bapak Presiden. Kemudian tanggal 24 dan 25 Januari secara internal polri pun sudah melakukan rapim dalam rangka menghadapi kesiapan menghadapi pilkada dan dari Mabes Polri juga membentuk tim assistensi dan tim Pamatwil perkira pengamat wilayah sermua bergerak secara rutin setiap bulan kedaerah-daerah yang ada pilkada yang terutama yang kita anggap prioritas untuk di assistensi agak rawan nah disitu kalau ada masalah cepat para pejabat dari Mabse Polri yang turun kebawah ini melakukan anes dan kita memberikan atensi untuk perbaikan termasuk tambahan-tambahan kekuatan.

Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana polri dapat menjaga netralitas, Polri menghadapi pilkada serentak terutama ada beberapa calon kepala merupakan Polri aktif kami jelaskan bahwa semua anggota polri yang telah mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah ini sudah semuanya sudah dipensiunkan ketika pendaftaran calon sudah diterima oleh KPUD maka hari itu juga sudah dikeluarkan surat pensiunnya termasuk di Jawa Barat Pak Anton Charlian kemudian di Kalimantan Timur Pak Syafrudin dan Irjen Murad Ismail ini purnawirawan juga sudah jadi semua sudah sah dan kami ulangi lagi bahwa kalau nanti misalnya yang bersangkutan misalnya tidak terpilih maka tidak bisa kembali ke Polri karena sudah pension menjadi purnawirawan. Untuk menjaga netralitas Kapolri sudah mengeluarkan beberapa telegram tanggal 25 Agustus 2017 yang terakhir adalah 5 Februari 2018 dimana dalam telegram-telegram tersebut ini Kapolri sudah memerintahkan kepada jajaran untuk tidak untuk bersikap netral dan tidak mendukung pasangan calon manapun juga bahkan sangat detail disana, berselfipun tidak boleh ya kalau enggak tau kalau seandainya enggak sengaja mungkin ada orang datang enggak ngerti mungkin polisi nya kalau ini adalah pasangan calon tiba-tiba

foto karena saya juga mengalami, saya enggak ngerti ada acara di Bidakara para pimpinan daerah semua pengen ada yang berfoto saya lewat berfoto ternyata fotonya muncul di satu daerah bersama yang bersangkutan nah dianggap saya mendukung padahal saya enggak ngerti di selfi eh photo di tempat publik gitu nah mungkin di cropping juga jadi mohon apa nama nya dapat dimaklumi kita posisi polri sangat netral disitu dan Pak Panglima juga sejalan dan rencana nanti mulai minggu depan kami bersama dengan Pak Panglima akan berkunjung ke wilayah mengumpulkan anggota Polri dan TNI di wilayah masing-masing bersama dan setelah itu menyampaikan point-point diantaranya netralitas disamping solidaritas dan kerja sama, prioritas yang kita tadi sudah disekapati tadi pagi juga sudah kami waktu rapat di Mabes TNI tadi pagi ada penyerahan mendali disana kembali kita sepakati untuk datang terutama di daerah yang ada calon-calon dengan latar belakang purnawirawan Polri dan TNI diantara nya Sumatera Utara kami akan datang, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Timur kemudian di Maluku dimana disitu ada anggota Polri dan TNI sebagai calon kami akan datang mengumpulkan jajaran masing-masing dan setelah itu kita akan menyampaikan diantaranya adalah mengenai penekanan netralitas ini.

Kemudian pertanyaan terakhir dari Komisi 3 mengenai masalah kasus-kasus actual yang pertama narkoba, narkoba ini sepanjang tahun 2015 sampai 2018 sudah ditangani 141.798 kasus dengan tersangka sebanyak 178.199 orang yang menonjol diantaranya pengungkapan extasy 600 ribu butir ini yang menonjol terakhir 600 ribu extasy tanggal 8 November di Bekasi kemudian Ganja 1,3 Ton oleh Polres Jakarta Barat di Slipi Jakarta Barat kemudian narkotika jenis sabu 1,622 Ton, 1,6 Ton yang berikut kapal yang kita sita tanggal 20 Februari itu yang ditangkap di Kepulauan Riau di Batam kemudian tindak pidana perdagangan orang dari priode 2014 sampai 18 ada 539 kasus dan 758 tersangka, saya memberikan penekanan betul kepada bareskrim terutama untuk masalah jaringan yang melibatkan masyarakat di NTT ini yang menjadi isu kemarin juga ada korban yang bekerja di Negara lain Negara tetangga ini ada yang meninggal tindakan hukum sudah dilakukan oleh Negara sahabat kita kepada pelaku nya tapi peristiwa ini juga kembali membuat mentreger penekanan kita untuk melakukan operasi tindak pidana perdagangan orang PPPO human trafficking terutama yang melibatkan di Nusa Tenggara Timur. Untuk kasus tipikor dari tahun 2015 sampai 18 ada 5600 kasus dengan 5761 tersangka yang ditangani oleh Polri khusus 2017 ada 1490 kasus yang ditangani Polri dengan 1546 tersangka dengan total kerugian Negara sebanyak 2,98 triliun dan menyelamatkan keuangan Negara sebanyak 1,8 triliun kemudian untuk kasus tindak pidana terorisme di tahun 2000 semenjak Oktober 2017 sampai 18 ini memang ada beberapa kasus yang menonjol diantaranya keributan di Mako Brimob oleh beberapa napi dan tahanan kasus terorisme pembakaran Mapolres Dalmas Raya Polda Sumatera Barat serta penganiayaan yang terjadi di sebuah gereja yang ada di Yogyakarta. Saya kira itu kasus-kasus utama yang menonjol yang saat ini ditangani kalau nanti ada kasus-kasus lain memang yang sekarang sedang aktif kita tangani adalah masalah isu penyerangan ulama ini ada 47 kasus kejadian yang terjadi itu ada 5 kasus ini kemudian ada sejumlah kasus itu tidak terjadi pidana nya tapi rekayasa yang bersangkutan menyatakan melapor kepada polisi di aniaya di bacok disobek lain-lain tapi setelah dilakukan rekonstruksi terjadi kejanggalan akhir nya mengakui bahwa tidak terjadi peristiwa itu motif nya rata-rata motif nya meminta perhatian karena masalah ekonomi nah kemudian ada sejumlah kasus yang korban nya bukan ulama tapi di media social seolah-olah itu adalah ulama hampir ada 32 kasus jadi sebagian besar itu kasus nya tidak terjadi sama sekali tapi dibuat berita social media social seolah terjadi peristiwa, kesimpulan kita di lapangan di darat istilah nya kita belum menemukan adanya penyerangan sistematis kepada tokoh agama, tempat ibadah atau ulama belum bukan berarti tidak karena ada beberapa yang cukup janggal yang masih terus kita dalami, contohnya misalnya dalam kasus yang terjadi 5 kasus itu sebagian besar bukan .... Semuanya itu tersangka nya begitu diperiksa mengalami gangguan

kejiwaan jadi kita melihat ada satu kejanggalan a itu terus kita dalam tapi kami tidak bisa menyimpulkan ada nya koneksi dari kasus-kasus lain sehingga dianggap ini adalah suatu yang sistematis tapi yang kita melihat sistematis adalah koneksi di udara yaitu koneksi di udara di media social yang menghubungkan dan menambah kasus-kasus tersebut sehingga terlihat seperti sistematis nah oleh karena itu yang ditangani oleh bareskrim adanya kelompok-kelompok yang mengangkat isu-isu itu ini dengan sistem yang kita miliki kemampuan investigasi kita miliki kita bisa melacak asal mula penyebar nya siapa yang menyebarkan siapa yang menyambungkan dan lain-lain sehingga kita bisa kita melihat betul ada hubungan di udara untuk sehingga akhirnya isu penyerangan ulama ini menjadi isu opini di publik bahwa penyerangan ulama itu terjadi secara sistematis dengan sangat massif padahal sebetulnya belum kita temukan seperti itu, nah ini kasus yang mungkin sedang apa actual kita tangani termasuk masalah kelompok-kelompok penyebar hoak saya juga mengajak disini ada beberapa penyidik tekhnis yang nanti kalau ditanyakan mereka bisa menjawab ini ada Pak Kapolda Metro, Kapolda Jabar untuk kasus penyerangan yang di Jawa Barat, Kapolda Metro penyerangan di daerah Jakarta seperti Depok beberapa hari lalu oleh seorang perempuan kemudian kita juga mengundang penyidik yang menangani ketua tim nya Irjen Gatot ada disini kemudian dari Direktur Cyber Crime Brigjen Fadil ada disini yang nanti kalau ditanya ada pertanyaan tekhnis nanti saya persilahkan untuk menjawab nya, saya kira demikian pimpinan komisi kami mohon maaf kalau waktu nya terlalu panjang ini menjawab apa-apa yang sudah disampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.

#### **RAPAT :**

Walaikumsalam.

#### **F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Walaikumsalam warahmatulahi wabarakatuh.

Seperti sudah menjadi kebiasaan kita sebetulnya ini pertanyaan dan sudah dijawab dan cukup tebal sudah satu setengah jam, mungkin apakah akan bertanya yang sudah disini atau ada pertanyaan baru, namun demikian untuk tidak mengurangi dari pada kawan-kawan sekalian kami persilahkan saja untuk perfraksi seperti sudah biasa Pak Kapolri yaitu dari PDI Perjuangan siapa Pak Junimart.

#### **F-PDIP ( JUNIMART GIRSANG, SH., MBA., MH. ):**

Terima kasih ketua.

#### **F-PDIP ( ICHSAN SOELISTIO ):**

Pimpinan, pimpinan.

#### **F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Ya.

#### **F-PDIP ( ICHSAN SOELISTIO ):**

Untuk Fraksi PDI Perjuangan mohon maaf Pak Junimart ada titipan dari Fraksi untuk dilakukan oleh Pak Arteria Dahlan.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Iya silahkan Ar.

**F-PDIP ( ARTERIA DAHLAN, ST., SH., ):**

Yang ditanyain sama ama yang ditanyain Pak Junimart Ketua.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Silahkan, silahkan.

**F-PDIP ( ARTERIA DAHLAN, ST., SH., ):**

Assalamuallaikum warahmatulahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Pak Kapolri Pak Wakapolri dan jajaran pejabat utama yang saya hormati, saya banggakan saya cintai, ada beberapa hal pertama mohon ini dijadikan keseriusan pak, tata niaga impor bawang putih saat ini semua harus memakai surat persetujuan impor pak maksud nya baik kemudian untuk instrument control intervensi Negara dalam konteks pengawasan tapi maksud yang baik belum tentu ujung nya juga baik pak, pemberi persetujuan bisa saja bermain bisa saja melakukan permufakatan jahat surat persetujuan impor bisa menjadi uang permainan pak, kita mengatakan di duga terjadi ni indikasi kartel pak, import nya dilakukan sedikit-sedikit kenapa biar supply nya bisa enggak begitu banyak dimen tetap tinggi harga bisa terjaga harga tinggi juga pak, harga bawang putih sekarang enggak tau bapak bisa cek sendiri saya barusan telephonan 40 ribu pak, rakyat beli bawang putih tu 40 ribu luar biasa di Negara agrari seperti ini pak, maka nya kita minta polri hadir sebagai polisi pejuang pak nanti nya pak. Apa masalah nya pak ini sebenarnya saya sih iseng-iseng saja tadi kita lihat Kompas kemarin tapi kalau Kompas sampai 2 hari ngomong tata niaga import ada masalah disini pak, nah ini masalah nya dimana sekarang ini pak yang sudah kejadian ada surat persetujuan import ini surat persetujuan import ada 2 ini buat bawang putih, ada yang buat benih ada yang buat di konsumsi, saat ini pak ini kejadian ni kejadian, kejadian kemarin ya apa penyidik PPNS Kementerian Perdagangan menemukan cuma 5 ton dari 300 ton ijin, apa itu tiba-tiba ada bawang putih, benih yang dijual bukan sebagai benih tapi untuk konsumsi import kalau kita mau katakana persetujuan import untuk konsumsi itu 28 Maret tapi barang ini masuk 26 Maret di Tanjung Priok Februari beredar di pasar kramat jati itu tanggal 2 Maret artinya sudah pasti tidak pakai surat persetujuan import untuk konsumsi pakai surat persetujuan import untuk benih, nah ini lucu nya pak penyidik PPNS nya mengatakan ini ada apa pelanggaran administrasi di kasih nya sanksi administrasi ini lucu pak, kita punya nama nya undang-undang perdagangan undang-undang 7 2014 ada pidana nya itu pak, yang perlu pak polisi melakukan pencermatan lagi saya punya daftar pak, surat persetujuan import yang terbit 28 Februari 2018 ada ni nama perusahaan nya ya dari 125 ton pak yang harus ya masuk melalui SPI ini surat persetujuan import 53 ton ini terkait dengan Menteri Pertanian pak, enggak usah saya sebutin perusahaan nya siapa, kemudian 21 ton pak 3 perusahaan ini juga terkait dengan Ibu Eva pak, staff khusus Menteri Perdagangan pak, bukan Eva Kusuma Sundari bukan, ada lagi 3 perusahaan yang hampir 15 ton enggak usah saya sebutinlah nama nya, ada satu perusahaan pak yang hampir 3000 ton itu mantu nya Menteri Perdagangan pak, oh.

Saya ingin sampaikan pak, harga barang putih di RRC itu 550 sampai 600 perton CIAEF masuk ke Surabaya atau Jakarta pak, bukan ini kita mau kasih tau pak, ini urusan rakyat pak, rakyat terbebani dengan biaya-biaya begitu tinggi nya atas kemufakatan jahat pak, kemudian biaya-biaya lain 1000 rupiah ya, kita hitung semahal-mahal nya pak bawang putih masuk itu 8600 sampai 9300 perkilo gram, 10000

lah dijual itu 40.000 artinya pak, satu kali pengiriman ini penerbitan SPI yang 125 ton ini ya, 125.000 ton ya ini terdapat kerugian dan beban yang harus dibayar rakyat apa pak, hampir 3,7 ton eh 3,7 triliun rakyat menanggung itu, saya ingin tanyakan mana Satgas Pangan nya bapak turun pak sekarang pak, kita bisa buktikan ini 3,7 triliun dalam satu kali transaksi surat persetujuan import 28 Februari 2018 saja pak, ya kita mohon sekali jangan takut sama Menteri nya kata Pak Wakil Ketua Pimpinan Komisi pak.

Nah kemudian pak, saya juga ingin pak kita butuh keseriusan kalau bisa Kapolri mengundang kita dan kita mendampingi bapak untuk memeriksa perkara ini pak, bukan intervensi ini pak.

Kemudian yang kedua saya katakan di Kementerian Perdagangan ini residivis pak, saya katakan lagi pak, kenapa tiba-tiba 14 Maret lagi pak ini semua ada datanya pak 14 Maret pak, ini jadi modus baru cari uang mudah mengatasi namakan kepentingan rakyat ini, ijin impor jeruk pak, jeruk mandarin sudah dihentikan enggak boleh lagi yang ada itu ijin impor kino pak, jeruk kino dari Pakistan karena harga nya memang relative lebih murah nah sekarang orang itu pakai ijin impor jeruk kino buat masukin jeruk mandarin pak, 91 ton masuk ke Belawan pak, masuk ke Belawan itu kenapa bisa terjadi Pak Kapolri juga harus tau persatu Februari ada kebijakan pak untuk yang hortikultura tidak lagi masuk ke pelabuhan pengawasan nya, karena untuk menghindari dualing time maka nya ingin dikatakan setiap kebijakan pasti tanggungi oleh kepentingan pak, mudah-mudahan ini kita bisa buktikan jangan sampai kepentingan nya Menteri Perdagangan, mencoreng ini nama nya, kita ingin pastikan pak, kenapa begitu bea cukai tidak punya pengawasan lagi kewenangan nya hilang kewenangan nya ada di Kementerian Perdagangan logika nya bagaimana pak, masa si penerbit surat persetujuan impor tiba-tiba dia mengawasi lagi diujung pak ini sudah jelas main pak, bapak harus turun pak kita harus pastikan ini pak, wah luar biasa ini, ini baru satu yang ketemu, nah saya ingin juga katakan pak, apa yang dimainkan oleh Kementerian Perdagangan pak, dia langsung katakan ini terjadi penyimpangan kita akan cabut api nya, kita akan cabut ijin importir nya, kemudian kita katakan kita akan denda 2 milyar, bukan itu solusinya pak, pidanain pak, cari tau pak, Menteri terlibat nggak Mentan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan terlibat nggak pak itu nama nya polisi pejuang pak.

Kemudian ingin saya sampaikan lagi lanjutan ini, kejahatan ini luar biasa massif nya, masih, tiba-tiba masalah impor garam pak maka nya saya minta betul kepolisian mendukung langkah bu susi pak, garam yang di bawa 95% pak tidak boleh di impor karena itu garam dapur itu kita masih bisa dapetin pak itu untuk kepentingan rakyat, nah yang boleh itu yang diatas 95% itu boleh kita bisa itu, nah ini kita setujukan langsung kepada orang yang berkentingan kaya misalnya kaya apa morfin kita langsung kepada pihak tertentu yang kita kasih ini sistem nya seperti itu pak, tapi diluar itu kita minta polisi juga harus tegas ini catatan berikut pak, nah kemudian saya ingin sampaikan lagi mengenai masalah tadi Narkoba pak bapak mengatakan tadi ada 600.000 itu prestasi dan kami apresiasi pak tapi Pak Kapolri kami ini kebetulan banyak mencermati kegiatan di BNN dengan anggaran yang sedikit saja pak tapi capaian nya massif pak, bapak tau nggak ada 640 ton enggak bisa masuk ke Indonesia lagi mangkal di Timor Leste pak, itu kerjaan BNN pak, bapak punya Kasat Narkoba sampai Kabupaten Kota punya Babinkamtibmas yang tau masalah Narkoba sampai pil koplo pil doable L dan sebagainya, harus nya capainnya lebih banyak pak, kita mohon lagi saya ingin memacu pak mentreger bapak yang 600.000 itu kecil, kenapa begitu pak, sekarang yang nama nya sabu-sabu industry rumahan setiap rumah sehari bisa ngasilin 100 gram bayangin tiap rumah pak, yang ada rumah berapa disini jutaan pak, yang main disini pak, jadi kalau ketemu sedikit itu saya katakan masih kecil pak, kita mohon lagi lebih kerja lebih keras lagi pak.

Berikutnya mengenai masalah ini permintaan Dapil pak, kekerasan yang menimpa tokoh agama pak, nah ini saya tau betul Pak Kapolda Jatim itu sangat hebat bagus sekali pak, tapi saya yakin juga pak, masih kurang pak untuk apa, untuk mensosialisasikan ke rakyat nya pak, kerja-kerja baik nya polisi Polda Jatim itu seperti apa, nah saya minta juga kemudian teman-teman Humas ini juga bisa mainkan betul pak, bahwa polisi sudah bekerja tidak ada permasalahan terkait dengan penganiayaan ulama karena saya hadirkan betul kita cek langsung waktu acara kunjungan Jawa Timur waktu itu pak.

Berikut mengenai pengendara resah pak, polisi akan menilang pengendara yang menilang karena mendengarkan musik, karena merokok inikan subjektif pak gimana bapak bisa masa polisi kerja nya ngeliat kaca mobil orang pak ntar orang ciuman dilihat lagi pak, lebih bahaya orang ciuman di mobil pak dari pada dia main hp pak, nah ini yang kaya-kaya gini tolong kebijakannya juga tolong dicermati lagi pak.

Berikut masalah helicopter pak, apa benar helicopter dinas milik Kapolda Sumatera apa Polda Sumatera Utara pak itu disewakan kepada pengantin dengan ongkos 120 juta pak itu ini mohon dijawab pak.

Berikutnya lagi saya ini kenal apa hanya kenal dan melihat muka Pak Kapolda Metro pak karena saya mau hubungin itu enggak bisa pak, lewat aspri nya kata nya enggak pernah ketemu, saya cuman kasih tau saya tidak pernah ada urusan bisnis pak, waktu itu saya cuman mau minta tolong ada aktifis buruh yang minta tolong datang ke fraksi kami tapi pada saat kita menghubungi itu susah nya minta ampun pak ya saya juga minta, padahal pak saya kasih tau pak, pelapor nya itu adalah Direktur utama Danamon yang di negaranya bermasalah pak bahkan di usir di Negara nya dia, masa di kita, kita layani itu pak, ya kita minta lagi polisi adalah polisi pejuang pak.

Berikutnya mengenai penjelasan MCA pak, apa benar MCA memiliki kaitan dengan kelompok penyebaran hoak yang nama nya Saracen siapa actor atau konseptor pabrik konten hoak tersebut pak, MCA yang awal itu ciri-ciri nya seperti apa, bagaimana mekanisme kerjanya, spesifikasi dan nama MCA, pemimpin MCA dan detailnya dimana saja kita mohon laporan itu pak dikarenakan polri sudah memblowup bergitu hebat nya pak, tapi komisi 3 ini jugakan kita harus lakukan pencermatan secara detail apa lagi ada kaitannya dengan nama muslim itu pak, PDI Perjuangan itu sangat membela juga yang nama nya umat muslim pak kita pemerhati juga pak.

Berikutnya bagaimana penjelasan tindak lanjut kaitan dengan Briptu AR pak, yang terlibat keributan dengan salah satu kader Gerindra pak, ini juga kita mohon sampai dimana penangan nya, terkait dengan penyelesaian upaya dan efektifitas dana desa pak, apakah efektif tidak Babinkamtibmas karena enggak disekolahkan pak, Kepala Desa aja yang kita sekolahin masih salah pak.

Berikutnya juga dengan perlindungan perempuan dan anak, saya apresiasi ada satu orang di Jawa Timur pak, ibu-ibu itu pengetahuan tentang anak dan perempuan itu hebat sekali pak tapi itu harus ditularkan ke Polres-Polres semua nya itu, itu ada ibu-ibu pintar banget Polwan ya, pintar sekali pada saat saya dampingin ke Sampang dia katakan pak, pak ini anak-anak punya hak jadi dia lebih hebat lagi pak.

Berikutnya pak terkait dengan masalah tewasnya Wakapolda di Malang itu pak, ini cerita nya apa sih pak, ada cerita dibalik cerita atau ada apa pak.

Berikut kita apresiasi pak, tadi saya melihat ada 3 hal yang bisa kita katakan benang merah ada Pilkada serentak ada Asean Games ada yang nama nya hajatan IMF world bank annual meeting, kalau yang IMF ini pak, saya ingin sampaikan pak, ini lebih hebat dari pada presiden kumpul pak, presiden kumpul duit nya nggak ada pak pakai APBN pak, ini yang menguasai dunia pak jadi kita mohon betul bapak ini melakukan atensi yang luar biasa, tapi saya juga melihat ada tulisan itu bapak mengatakan kalau ini sampai gagal ada 5 masalah besar ke khawatiran apa tu, atau maksud nya 5 masalah besar itu pak Kapolri katanya jangan kalau gagal ini bagaimana.

Pak Kapolri Alhamdulillah kira mau merayakan hari ulang tahun pak, satu tahun Pak Novel Baswedan itu tidak terselesaikan kasus nya, ini kasus yang menyita perhatian pak, acap kali kami berselisih berhadapan dengan KPK tapi penegakan hukum ya itu juga harus berkepastian tidak boleh ada sedikitpun serangan terhadap penegak hukum, kami polisi diserang kita marah betul pak, polisi ngelawan polisi marah kita pak, ini juga kejadian gitu pak, kita mohon kasus ini harus terungkap ya jangan sampai ada ruang bagi segenap pihak untuk mengatakan ternyata memang benar harus ada tim gabungan pencari fakta itu yang selama ini komisi 3 katakan tidak, kita percaya betul sama institusi Polri pak.

Berikut mengenai Pilkada pak, saya kaget Pak Kapolri kita akan meninjau kembali undang-undang pak ya kalau bahasa informal sih nggak apa-apa pak kan nama nya polri harus melaksanakan undang-undang selurus-lurusnya pak, kebetulan undang-undang nya Pilkada serentak, saya ingin sampaikan pak Kapolri 171 ini melibatkan 70% pemilih di Republik ini pak artinya sudah Pilkada dua pertiga Republik Indonesia ni Pilkada hampir Pilkada Nasional pak, sayang nya pak kita pakai undang-undang Pilkada yang baru yang KPU nya juga baru belajar, Partai politiknya baru belajar, pasangan calon baru belajar, polisi nya pun baru belajar, cilaka nya lagi pak, anggota KPU nya baru, Bawaslu nya semua nya baru yang nggak tau bagaimana nuansa pembentukan undang-undang ini, cilaka nya pak serentak semua yang nama nya tadi bapak katakan Pilkada jalan pak, saat ini pemilu Legislatif sudah jalan pak, bukan yang bapak katakan DCS pak sekarang sudah jalan ini pak, Pilpres sudah jalan pak sehingga atensi perhatian itu terpecah semuanya pak, saya mohon betul bagaimana Pak Kapolri bisa memetakan daerah rawan konflik, daerah rawan konflik itu seperti apa menurut persepektif nya Polri ya kemudian juga pemetaan terkait dengan tokoh-tokoh penyulut konflik pak, itu juga kita ingin sampaikan pak, berikutnya lagi mengenai masalah yang bapak katakan saat Satgas anti Money Politic undang-undang sudah punya peraturan Pasal 73 undang-undang Pilkada enggak perlu pakai Satgas Bawaslu bisa masuk, didalam Bawaslu ada bapak pak penyidik kepolisian ini hanya aspirasi partai kami pak, jangan sampai sekarang kita reses di foto-foto sama Panwas cilaka nya Panwas bawa Bawaslu eh bawa polisi nah ini kemudian memperkarakan kita pak, nah ini juga jangan sampai pemahaman ini keliru pak.

Berikutnya juga pemasangan atribut kampanye dirumah itu boleh pak Kapolri dari rezim yang lama boleh itu tapi Ketua Bawaslu yang baru enggak boleh, saya juga enggak ngerti, dikantor partai boleh pak, jadi kalau polisi nanti diperbantukan untuk seperti itu ya jangan mau pak, PNS boleh hadir kampanye boleh pak, kemudian anggota DPR mendampingi pasangan calon boleh pak jangan dilarang pak, kemudian juga berfoto dengan pasangan calon polisi bupati itu boleh pak, yang enggak boleh itu berkampanye pak, nah kemudian pasangan calon mengunjungi bupati kita pasangan calon kita Jawa Timur mba Puti ngunjungin kantor Bupati dilarang sama Panwas didampingi polisi nah inikan enggak pada tempat nya pak, ini enggak ada unsur kampanye nya pak, kita mohon sekali ini juga dijadikan atensi bagaimana memahami undang-undang tidak hanya bagi KPU Bawaslu tapi juga institusi kepolisian.

Terakhir pak, tadi diminta untuk mempercepat, terakhir saya mohon sekali pak, kemarin saya minta bagaimana kita bisa bersinergi, kami mohon ada intruksi bapak-bapak agar kami bisa berkordinasi dengan teman-teman kepolisian ini sudah mau Pemilu pak, kalau bisa kita kenal lah dengan Babinkamtibmas yang ada di Polres masing-masing pak, kalau ada kerja sama ada sosialisasi di Kepolisian di Polres kita juga di undang pak, apalagi pak Kapolri mengatakan kita akan kunjungi daerah-daerah yang ada apa polisi TNI yang ikut Pilkada kalau bisa kita juga di libatkan untuk di ikut sertakan, terima kasih pak, wasalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Walaikumsalam warahmatulahi wabarakatuh. Jadi ini kita putar perfraksi dan kami berharap kalau yang sudah ditanyakan tidak ditanyakan lagi, lanjut dari bawah kami silahkan.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Pimpinan, saya mau intrupsi, bisa intrupsi ya.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Intrupsi ya.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Saya hanya mau meluruskan saja, saudara Kapolri kebetulan Dapil saya itu Sumatera Utara.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Pak.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Iya ini intrupsi pak, biar lurus semua jadi tidak kemana-mana ini, jadi nanti nda perlu Pak Kapolri menjawab ini perlu pak, mengenai helicopter Pak Kapolri karena Dapil saya dan saya sudah bicara langsung dengan Kapolda dan saya sudah bicara dengan pilot nya helicopter ini, tidak ada mengenai uang 120 juta, ini perlu sampaikan supaya tidak bias kemana-mana dan supaya Polda Sumatera Utara itu bekerja secara mantap pak kan begitu ya karena tadi saudara saya Pak Arteria Dahlan menanyakan ini, untuk melengkapi bahan Kapolri secara jelas saya sampaikan tidak ada mengenai itu nah tentang Pilkada pimpinan, ijin pimpinan ini intrupsi bukan minta waktu untuk bertanya tentang Pilkada tolong supaya di Sumatera Utara ditambah personil Polri pak bukan hanya Pilgub ya di Kabupaten Deli itu masih memerlukan personil.

**F-NASDEM ( AKBAR FAIZAL, SH.):**

Pimpinan saya minta permainan nya dirapihkan pimpinan.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

360 orang pimpinan.

**F-NASDEM ( AKBAR FAIZAL, SH.):**



Intrupsi ya intrupsi tapi ini bertanya pimpinan.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Masih diperlukan.

**F-NASDEM (AKBAR FAIZAL, SH.):**

Fraksi perfraksi saya minta yang adil.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Pimpinan, jadi tolong dicatat.

**F-PD (ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Ya saya setuju itu.

**F-NASDEM (AKBAR FAIZAL, SH.):**

Nah main potong aja.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Supaya.

**F-PD (ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Perfraksi ini perfraksi pimpinan.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT (DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

.... Pak Junimart kita sudah sepaham.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Ini pelengkap, melengkapi dari fraksi kami pak.

**F-PD (ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Enggak, enggak. Tadi kesepakatannya itu perfraksi.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Sebentar, sebentar bu.

**F-PD (ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

... pimpinan.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Ini melengkapi karena.

**F-PD (ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Ini kesepakatan nya per fraksi.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Perfraksi dulu perfraksi.

**F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Perfraksi satu orang

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Kita kan sudah sepakat.

**F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Kesepakatan nya sesuai dengan kebiasaan kita

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Perfraksi, perfraksi saya hanya mau menambah, supaya hak fraksi kami tidak hilang pak.

**F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Pimpinan.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

A itu.

**F-NASDEM ( AKBAR FAIZAL, SH.):**

Tampak nya harus ada yang memahami apa yang nama nya intrupsi dan bagaimana gitu ya.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Jadi untuk Pilgub dan Pilkada.

**F-NASDEM ( AKBAR FAIZAL, SH.):**

Saya tidak nyaman pimpinan.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Tolong supaya Pak Kapolri.

**F-NASDEM ( AKBAR FAIZAL, SH.):**

Saya minta permainan nya diperjelas pimpinan.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Tolong supaya Pak Kapolri.

**F-NASDEM ( AKBAR FAIZAL, SH.):**

Satu fraksi perfraksi setelah itu kita lanjutkan gitu lho.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Pak Akbar Faizal, kita berteman pak.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Jadi begini.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Sebentar pimpinan.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Nanti kita putar 2 kali bila perlu pak.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Nda usah pak ini sudah mau berakhir pak, nggak usah saya intrupsi saja ini.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Jadi biar bapak nanti.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Nda usah nanti habis waktu pak.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Nanti dari setiap fraksi bisa 2 kali.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Nda perlu pak.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

2 kali atau 3 kali.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Kita kan jam 12 selesai pak.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Oke saya kira Pak Junimart, biar nda kusut kita lanjutkan

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Jadi tolong pak 360 untuk personil di Dairi harus pak, makasih.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Jadi kedepan kalau memang ada tambahan dari fraksi kita putar 2 kali yang seyogya nya satu fraksi itukan suara nya sama, lanjut jadi Hanura dari bawah.

**F-HANURA ( H. SARIFFUDIN SUDDING, SH., MH.):**

Baik terima kasih ketua, bapak/ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati Pak Kapolri beserta jajarannya yang saya hormati.

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh. Pertama sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Arteri dan saya kira itu harus menjadi perhatian pak, utama nya menyangkut masalah mafia pangan ini karena ini adalah kebutuhan bagi masyarakat kita dan saya kira juga banyak permainan yang muncul disitu dan saya pikir tidak perlu saya ulangi, paling tidak ini menjadi atensi untuk itu.

Yang saya soroti dalam forum ini menyangkut masalah Pilkada yang ada di depan mata kita karena ini bisa menimbulkan kerawanan dan bisa saja akan terjadi konflik horizontal ketika ini tidak ditangani dengan baik, saya menghargai Pak Kapolri tadi sudah melakukan pemetaan tentang kerawanan wilayah baik ditingkat Provinsi, Kabupaten maupun di Kota di beberapa daerah, saya kira ini penting untuk di betul-betul menjadi perhatian dan sedapat mungkin Babinkamtibmas sebagai ujung tombak yang ada dilapangan ini perlu di berdayakan untuk melakukan deteksi dini dan deteksi aksi ketika muncul masalah-masalah yang bisa mengarah kepada konflik-konflik horizontal, saya kira dinamika politik baik dalam persoalan-persoalan masalah sara ya saya kira ini pasti akan bisa saja muncul ke permukaan ujaran-ujaran kebencian berita-berita hoaks dan sebagainya ini bisa diantisipasi sedini mungkin supaya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Tapi disamping itu disamping jajaran kepolisian saya kira juga perlu di berikan atensi khusus terhadap pihak penyelenggaraan Pak Kapolri, pihak penyelenggara Pemilu saya kira juga memang perlu diberikan atensi karena beberapa daerah katakanlah tadi Pak dalam paparan Pak Kapolri ini ada rengking kerawanan penyelenggaraan Pilkada, Bupati dan Walikota termasuk di Mimika, di Mimika ya ini tingkat kerawanan nya yang rangking pertama, calon incumbent yang ada disana yang didukung oleh semua partai politik justru malah digugurkan kan begitu sementara calon perseorangan ada 4 itu di loloskan nah inikan bisa saja ini secara logika calon incumbent yang didukung oleh semua partai politik kok digugurkan oleh pihak penyelenggara sementara calon perseorangan ada 4 yang diloloskan oleh nah ini yang menurut saya bisa saja dari pihak penyelenggara ada main disitu dan ini sedapat mungkin dapat di antisipasi, begitu pula yang ada kejadian kemarin di Sulawesi Selatan pak ya, khususnya didaerah Sinjai dapat laporan bahwa salah satu calon Pilkada yang ada disana itu mendapatkan tembakan dari sumber nya dari mana tapi kata nya senjata rakitan dan itu ancaman ya ancaman dalam pelaksanaan Pilkada aneh nya pelaku nya sudah ditahan tapi kemudian dilepas kembali oleh Polres setempat nah ini saya perlu ada penjelasan kenapa pelaku nya sudah diambil tapi lalu kemudian dilepaskan oleh Polres di Kabupaten Sinjai itu jadi bisa saja menimbulkan permasalahan di masyarakat pak, saya kira sorotan saya hanya mengangkut masalah itu dan yang kedua menyangkut masalah Narkoba pak ya, tadi disampaikan ada 1,6 ton yang ditangkap di Batam dan saya kira didaerah-daerah lain juga menyangkut masalah penyelundupan menyangkut apa dalam kaitan masalah Narkoba ini cukup sangat massif ya di beberapa daerah pihak BNN sudah melakukan dengan baik dan saya kira pihak jajaran kepolisian juga dapat melaksanakan dapat bersinergi dengan pihak BNN dalam hal pemberantasan utama nya menyangkut masalah penyelundupan Narkoba ini saya kira itu Pak Kapolri assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.

## **F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Seharunya Golkar sudah siap apa belum, jangan sampai bertengkar ini, lewat dulu silahkan Gerindra.

## **F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH.):**

Terima kasih pimpinan, yang terhormat anggota Komisi 3 Pak Kapolri Pak Wakapolri dan beserta jajaran, pertama-tama mungkin juga saya menyoroti masalah Pilkada mungkin tadi pak Sudding juga sudah bicara mengenai masalah kasus yang di Sinjai disini memang saya ingin menambahkan bahwa tersangka yang menembakan senjata pada saat pertemuan itu justru pada saat dikantor polisi didatangi oleh calon pasangan tertentu nah kemudian dari situ justru tuntutan yang ada adalah pencemaran nama baik nah ini perlu dijaga karena memang saat ini justru disana situasi memanas karena dari masing-masing pasangan merasa bahwa ini ada diskriminasi antar pasangan oleh pihak Kepolisian nah ini mungkin saya kan sedikit menambahkan dan menggaris bawahi karena kita tau bahwa didaerah sana senjata rakitan itu banyak beredar dan saya kira jangan sampai terjadi gesekan secara horizontal.

Kemudian yang kedua Pak Kapolri, kaitan nya adalah dengan Dapil saya Kabupaten Tuban, baru-baru ini Presiden Jokowi berkunjung ke Tuban dan dalam kunjungan tersebut aliansi Mahasiswa Kabupaten Tuban melakukan demo penolakan Presiden Jokowi tetapi pada saat dilakukan pendemo itu Presiden Jokowi belum ada di tempat, yang terjadi bahwa aksi tersebut berakhir kepada Polisi meringkus menangkap aktivis semua nya dan terjadi pemukulan, perlu saya jelaskan disini logis nya bahwa pihak aliansi sudah memberikan surat pemberitahuan dan pada saat melakukan aksi pihak aliansi mahasiswa itu sudah berjalan sepanjang 2 kilo meter tanpa pengawalan satu anggota pun, kita bisa lihat dalam rekaman nya tanpa ada di kapal oleh pihak kepolisian namun pada saat mahasiswa tersebut sesampai didepan kantor Bupati belum dilakukan orasi Polisi menyerang mereka memukul mereka dan memasukan kedalam mobil mereka mobil Polisi ini suatu preseden yang sangat buruk kita tau undang-undang penyampaian pendapat bahwa pemberitahuan sudah cukup dan tidak ada aksi yang menimbulkan kerawanan karena hanya beberapa orang mungkin tidak sampai 100 orang dan sangat kondusif alasan apa Polisi meringkus mereka dan ini menunjukkan bahwa dengan pemukulan dan segala macam itu menunjukkan tidak ada nya koordinasi dengan tidak ada pengawalan sehingga masyarakat berfikir bahwa apakah ini merupakan perintah dari Polisi dari Kapolri bahwa kunjungan Presiden tidak oleh ada Demo tidak boleh ada penyampaian pendapat yang bertentangan dengan pemerintah karena pada saat itu mereka menyuarakan apa yang ada di masyarakat lah ini suatu hal yang saya kira sangat kontraproduktif terhadap polisi juga karena polisi harus nya sebagai penjaga keamanan bukan bertindak reaktif seperti itu. Saya harapkan dalam hal ini tentu nya Kapolres harus bertanggung jawab karena ini jangan sampai terulang lagi hal tersebut ini bisa membungkam penyampaian pendapat di seluruh Indonesia karena pihak Polisi terlalu reaktif terhadap aksi-aksi yang menentang pemerintah.

Kemudian ada juga beberapa hal mengenai tambang-tambang liar yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban yang hingga saat ini ada beberapa khusus nya di Tuban itu yang mereka beroperasi walaupun sebenarnya sudah ada penindakan-penindakan nah ini perlu juga dicermati hal tersebut.

Yang terakhir Pak Kapolri, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menangani penggunaan GPS di berkendara karena saat ini kita lihat dengan ada nya taksi online, ojek online itu lalu lintas seakan-akan tidak dihiraukan bahkan mereka melihat ponsel hanya mau mencari

penumpang mobil nya kekanan kekiri tidak dihiraukan ini membahayakan bukan hanya kepada pengemudi nya sendiri tetapi orang lain juga saya kira harus tegas dalam hal ini di penggunaan nya bukan mengedengarkan musik, mohon maaf menyambung yang tadi yang putus Pak Kapolri bahwa apa yang di lakukan oleh pihak Kepolisian didalam menangani lalu lintas tertib lalu lintas dalam hal ini perlu juga ada penanganan-penanganan terhadap masalah taksi online karena mereka juga sekarang parkir sembarangan dan ini rawan akan kejahatan mereka bisa parkir disembarangan hanya mereka menunggu ada nya suatu order dari pada ponsel mereka dan ini sangat tidak bisa dibedakan karena mereka tidak memakai indentifikasi taksi ataupun tidak memakai hanya mereka mobil biasa dan ini sangat-sangat menimbulkan kerawanan social dan keamanan kalau tidak di tangani dengan baik saya kira kita harus perhatian terhadap masalah ini karena inilah merupakan suatu hal yang bisa menimbulkan kerawan social yang lebih besar lagi, saya kira demikian pak Kapolri apa yang saya sampaikan ini terima kasih pimpinan.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Terima kasih, waktu sudah jam 12 apakah kita perpanjang atautkah kita pasti perpanjang tapi kita istirahat dulu atau karena kalau saya yakin satu jam nda cukup.

**F-PAN ( MUSLIM AYUB, SH., MH.):**

Pimpinan sebaik nya kita istirahat dulu sholat dzuhur baru kita laksanakan, kita istirahat dulu sholat dzuhur pimpinan.

**ANGGOTA ..... :**

Mungkin diselesaikan pertanyaan dulu ketua, baru istirahat biar irama nya biar kena.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Oke kalau gitu saya ambil waktu satu jam untuk menyelesaikan pertanyaan kalau sudah itu kita istirahat baru dijawab, setuju.

**KETOK PALU 1X**

Sampai jam 1, lanjut tadi dari kebawah bawah, silahkan Nasdem.

**F-NASDEM ( AKBAR FAIZAL, SH.):**

Terima kasih pimpinan, assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh, bapak Kapolri dan jajaran yang saya hormati, yang pertama saya harus mengapresiasi dulu apa yang telah dilakukan oleh jajaran Kapolri, anggaran Kepolisian itu secara signifikan naik luar biasa dari tahun 2014 hanya 4,4 triliun dan pada tahun anggaran terakhir itu sudah mencapai 84 triliun saya rasa angka yang signifikan untuk melakukan berbagai hal dan kami berfikir itu akan riled dengan kinerja dari Kepolisian maka tentu saja saya harus menyampaikan pertama apresiasi dulu keberhasilan Polri untuk memberantas atau membongkar apa yang sungguh-sungguh menjadi persoalan kita dalam dunia modern bernama dunia maya, saya harus memberikan apresiasi kepada Mabes Polri dalam hal ini terutama pada Team Cyber yang telah membongkar berbagai jaringan-jaringan yang membuat kita menjadi bangsa betul-betul terancam untuk terpecah saya melihat disini ada team nya lengkap disini, Jenderal Fadil dalam kordinasi Irjen Gatot orang yang saya kenal baik dan team nya ada Asep ada Kombes Irwan dan seterusnya dan

Irwansyah, saya tau betul karena saya mengikuti bagaimana mereka bekerja dan sekali lagi saya betul-betul bangga dengan polisi-polisi muda yang luar biasa bisa membongkar ini.

Yang kedua juga langkah yang signifikan yang diambil oleh Polri untuk menghadapi penganiayaan ulama saya berterima kasih bahkan sampai memerintahkan anggota untuk nginep segala macam di rumah ulama sungguh-sungguh kami berterima kasih itu yang menurut saya penting di Jawa Barat ada Ijzen Agung disini saya memberikan apresiasi betul.

Selanjutnya adalah terjadi penurunan pelanggaran anggota terhadap Kepolisian di internal dulu saya punya data disini, diberhentikan tidak hormat 222 orang sepanjang tahun 2017, 197 orang berpangkat Brigadir Polisi, 4 Tamtama, 13 perwira dan 8 orang Perwira Menengah, ini penurunan karena pada tahun 2016 itu ada pelanggaran disiplin 6662 saya selalu bermain angka supaya kita kemudian tidak asal jeplak saja masa bodo dengan kehormatan orang lain, saya ingin mengungkapkan data ini disini, pada tahun 2017 penurunan menjadi 5067 kasus turun dari 660 sekian tadi dan seterusnya, waktu saya harus memperhitungkan waktu tetapi intinya terjadi penurunan ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan tapi apapun namanya dilihat dari bagaimana dinamika yang berkembang dimasyarakat dan kemudian penurunan itu maka saya harus mengatakan bahwa ada upaya yang signifikan dari Polri juga untuk memperbaiki diri kita juga harus jujur tentang itu. Pengaduan masyarakat juga menurun dibandingkan tahun 2017 e 2016 juga signifikan, pengaduan masyarakat ke Kompolnas juga menurun saya bisa ungkapkan data nya disini tapi saya harus memperhitungkan waktu jumlah kriminalitas menurun, jumlah kejahatan pada tahun 2017 berkurang 23 persen bila dibandingkan tahun 2016, kepuasan masyarakat terhadap kinerja polisi juga membaik dengan berbagai catatan-catatan yang sudah diungkap oleh beberapa kawan tadi sekali lagi itu adalah apresiasi, kasus terorisme juga, saya ingin menyampaikan Pak Kapolri dan jajaran sebenarnya saya harus juga berada di RUU Terorisme sekarang ada Jenderal Edi disini kita sudah masuk pada isu-isu krusial yang notabene butuh penanganan yang cukup untuk itu ada beberapa anggota Panja Terorisme disini Abu Bakar dan segala macam.

Nah Satgas Saber Pungli juga ini saya melihat ada angka yang signifikan Pak Kapolri 1340 kegiatan OTT dan menangani 2719 tersangka di berbagai instansi serta barang bukti yang ditemukan itu ternyata yang terbesar ada di Kalimantan Timur saya tidak cukup paham kenapa sampai paling banyak di Kalimantan Timur ada 315 milyar disana, yang paling rendah itu ada di Papua Barat hanya 400 ribu, kemudian Satgas pangan Polri nah untuk bagian ini sebelum saya terlupakan saya butuh penjelasan sebenarnya apa bagaimana pola koordinasi antara TNI dan Pak Kapolri dan juga Kementerian terkait tadi malam saya baru saja menerima informasi TNI di Kabupaten Maros mengamankan atau apapun namanya 140 ton gabah yang siap untuk dibawa keluar dari Kabupaten Maros ini suara Dapil ini saya harus sampaikan disini saya sedang menghubungi Kapolres nya mempertanyakan apakah ada koordinasi karena muncul di masyarakat apakah ini tugas TNI atau bagaimana seingat saya pernah Menteri Pertanian yang di singgung tadi oleh Pak Arteria itu ada kerjasama dan koordinasi antara TNI dan Polri menyangkut soal ini, apakah juga masuk pada wilayah yustisi seperti itu, ini maka nya saya apa namanya karena disini ada Satgas pangan Polri itu jumlah kasus nya untuk non bahan pokok itu 58% dari total kasus yang dibongkar, jumlah tersangka bahan pokok nya juga lebih apa untuk kejahatan bahan pokok itu 51% juga cukup banyak kasus yang ditangani dengan tersangka 169 tersangka pada bahan pokok dan 238 diluar bahan pokok, nah ini saya pengen bertanya supaya menghindarkan miss understanding atau miss koordinasi dibawah karena sejujurnya kadang-kadang juga ya meskipun foto nya Pak Kapolri dengan Panglima TNI ada dimana-mana yang memang beneran dia terbang dulu ya pak Kapolri terbang

benaran ya, itu ada dimana-mana yang menurut saya itu sebuah sesuatu yang perlu diapresiasi tapi ini perlu diperjelas.

Nah menyangkut kejahatan terhadap kekayaan Negara saya kesulitan untuk bersikap bagaimana Pak Kabareskrim Pak Komjen Aridono menyampaikan bahwa kemarin yang kontroversial itu pak ya, saya tidak ingin kembali kesitu tapi begini sebenarnya saya cukup bisa menerima tawaran-tawaran ide seperti ini Jenderal kita kan kadang-kadang tiba-tiba langsung membuat barikade ketika ada sesuatu isu atau pernyataan yang relatif tidak berada pada arus utama yang berkembang di masyarakat padahal sebenarnya itu bisa saja barangkali lebih baik, kenapa demikian saya ingin menyampaikan sesuatu disini, coba kita pertimbangkanlah kita dengan kepala dingin lah terutama para pengamat yang kadang-kadang hantam kromo, kerajaan Arab Saudi dalam waktu 3 bulan mengumpulkan alias mengembalikan alias merampas 1400 triliun dari para konglomerat dan pangeran korup disana hanya dalam jangka waktu 3 bulan kita sini saya ada data nya sebenarnya tapi kalau saya tampilkan disini panjang sekali, betapa biaya penanganan perkara biaya ini biaya itu yang dikeluarkan oleh Negara dan kemudian diperbandingkan dengan jumlah uang yang dikembalikan kepada Negara sungguh-sungguh tidak signifikan bahwa kemudian sistem yang berlaku di Arab Saudi dengan kita berbeda itu ok saya paham itu, tetapi kemudian kita mau apa sebenarnya, ini kita sedang membahas undang-undang KUHP Jenderal, saya membayangkan bagaimana kemudian bagaimana follow the money itu, itu juga kita pikirkan tapi jangan semata pada follow the suspect ini pernyataan ini kadang-kadang bisa menjadi apa nama nya rebut di publik padahal sebenarnya tujuan kita apa, saya lebih berfikir kembalikan kerugian Negara untuk kita pakai kepada masyarakat itu tapi belum-belum Pak Aridono sudah dihajar kiri kanan ya Jenderal ya, ini barangkali terutama pada teman-teman sekarang yang di Panja apa Timus dan Timsin KUHP saya memang Anggota Panja juga tetapi tidak di Timus dan Timsin, mungkin kita memikirkan itu coba kita memikirkan yang lebih besar sayang nya kadang-kadang ini menjadi tidak populer.

Selanjutnya adalah Pilkada tadi sudah beberapa kawan cuman saya ingin saya setuju dengan disampaikan Arteria tadi Pak Kapolri dan jajaran mohon teman-teman di daerah juga diberikan sebuah pemahamanlah sekarang saya baru menerima laporan ini Gakumdu di beberapa daerah terutama di Dapil saya sudah mulai kegenitan dan kegenitan nya mengancam demokrasi di daerah itu di Palopo misalnya dan segala macam saya tidak terbiasa membuka hal-hal yang sifat nya personaly meskipun ini juga adalah bagian dari pengawasan kita tampak ada data yang cukup tadi yang disampaikan Pak Arteria tadi kalau memang ternyata ada datanya menyangkut Menteri ini Menteri itu ya sudahlah serahkan saja apa kepada penegak hukum dan kita usut bersama saya khawatir nya kalau ternyata itu hanya adalah lontaran-lontaran isu untuk kemudian di goring di ruang publik dan masalah nya itu dia tidak berdiri sendiri ada rentetan-rentetan di belakang nya kita paham apa yang saya maksud tentang ini.

Selanjutnya Pak Kapolri, kita taulah sebagai orang politik kita paham, selanjutnya adalah menyangkut dengan saya percepat saja, yang terakhir yang selanjutnya adalah kemarin ada kejadian Anggota DPR termasuk pengurus dari Partai Nasdem di Sumatera Barat itu di larang masuk dan merapat disebuah pulau, pulau nya bernama disekitar mentawai, disekitar Mentawai dan di larang oleh Bule nya, saya melakukan riset kecil-kecilan menurut peraturan Menteri Agraria dan tata ruang nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu dalam peraturan tersebut dimungkinkan warga Negara asing menguasai pengelolaan pulau namun tidak untuk dimiliki, apalagi melarang warga Indonesia masuk ke pulau tersebut, saat ini menurut keputusan Presiden nomor 16 ada 111 pulau Pak Kapolri, 111 pulau terluar yang tersebar dari sabang hingga merauke itu banyak yang sudah apa ya dikelola oleh pihak asing saya harus berhati-hati soal ini sebab bisa saja dianggap ini tidak



terlalu ramah pernyataan seorang Anggota DPR yang sebenarnya sama dengan undang-undang itu, itu tidak ramah pada yang namanya investor, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya apa yang terjadi di Sumatera Barat kemarin itu bisa menjadi preseden dan saya minta ada penataan kenapa demikian karena pada bab 4 pasal 9 ayat 2 aturan kementerian ATR tadi itu menyebutkan bahwa a. penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% dari luas pulau atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi kota atau rencana zonasi pulau kecil tersebut. B. sisa paling sedikit 30% luas pulau kecil yang ada di kuasai langsung oleh Negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung area publik atau kepentingan masyarakat. C. harus mengalokasikan 30% dari luas pulau untuk kawasan lindung tentu saja ini bukan kewenangan tunggal Kapolri tapi saya sampaikan disini bahwa ini bisa menjadi persoalan dan kemudian semoga saja ada koordinasi menyangkut dengan ini.

Terakhir dari saya dari Partai Nasdem saya ingin menyampaikan agak internal saya tidak bermaksud untuk mencampuri internal nya Polri tapi ini menyangkut dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan SDM, tentu saja kami di Komisi 3 akan mendukung jika kemudian Polri mengatakan bahwa kami akan melakukan ini, aturannya a, b, c, d, c, sampai terakhir gitu lho katakan seperti itu, disiplin dengan itu oke kami akan mendukung itu, persoalan nya adalah kemudian itu tidak sesederhana itu, teman-teman di Komisi 3 ini saya yakin punya catatan masing-masing tentang itu maka sebenarnya sayang disini Pak Irjen Arief tidak ada ada ya Pak ESDM maka sebenarnya saya pengen bertanya bagaimana sih sebenarnya pola rekrutment untuk calon pimpinan di internal polri bapak, katakanlah misalnya untuk kebijakan Mabes Polri AKBP 3A keatas situ, saya mencoba mencari tau, kalau memang dilakukan secara disiplin enggak bengkok-bengkok monggo dan saya yakin juga para terutama para perwira muda ini pasti akan menerima masalah nya kalau kemudian ada juga ruang-ruang lain yang kemudian ternyata terbaca oleh publik setidaknya nya Komisi 3 bahwa ternyata itu tidak diterapkan dengan baik, saya ingin memberikan contoh misalnya saat ini semoga saja data saya salah tetapi saya ingin mengungkapkan disini terdapat 1300 Kombes yang tidak bisa naik pangkat padahal sudah sekolah, Negara memberikan tempat untuk sekolah tapi kemudian nama nya juga keterbatasan tempat ya saya paham saja bapak tapi kemudian mau diapain ni dan kemudian lebih banyak di ajak diberikan gaji yang cukup besar tapi kemudian tidak di bisa diapa-apain belum lagi kalau kemudian dia pergi mencari bapak-bapak asuh nya termasuk di Komisi 3 ini repot kita, ya sudahlah kita buka-bukaan saja gitu, maka nya kemudian belum ee jujur ya secara personal juga saya ingin agak terganggu juga dengan ada beberapa tampilan yang ditampilkan oleh ESDM divisi ESDM di Polri itu sampai ada pernyataan apa itu, saya akan bersama dengan .... tangan gitu ya saya sih tidak perlu tersinggung dengan itu tapi ngapain seperti itu gitu, emang nya kita enggak tau apa yang terjadi disana, saya bisa menyebutkan nama lho banyak disini, cuma saya hindarkan saya bisa menyebutkan nama dan bagaimana proses nya yang membuat saya kecewa adalah kemudian identifikasi perwira-perwira muda yang sudah baik didaerah nya kemudian tidak teridentifikasi untuk kedua kali nya saya sebutkan didaerah ini diruangan ini Kapolres Pare-pare angkatan 99 sebelum dia masuk kesitu mana BNN enggak ada BNN disini ya ada Narkoba dia Polres itu hanya membongkar 4 kilo gram selama dia satu tahun dia membuka 50 kilogram menemukan yang datang dari nunukan dan seterusnya bagaimana memperhatikan orang seperti ini saya takutnya dia menjadi apa ya kecewa, belum lagi yang lain insyaallah saya sebagai anggota DPR dari Sulawesi Selatan setidaknya nya di Komisi 2 memberikan sepenuhnya kepada Polda saya nya Kapolda yang sekarang ini saya belum terlalu kenal masih kurang koordinasi beliau kaya nya anu ya bagus juga orang ini agamis mencium tangan semua orang tapi focus nya dulu itu lho focus nya dulu bagaimana persoalan-persoalan, saya meminta koordinasi ada laporan seperti ini saya mencoba untuk koordinasi saya tidak pernah meminta fasilitas dari Polda Sulawesi Selatan

intinya Pak Kapolri kami ingin memberikan yang terbaik semua nya kepada Polri, saya tidak tau ya kalau kemudian dianggap Komisi 3 tidak lagi memberikan dukungan yang cukup kepada Polri saya enggak tau lagi apa dukungan apa lagi yang kita berikan insyaallah bapak bisa melihat bagaimana saya memberikan dukungan itu, sampai pada tingkat bawah tidak ada Polres di Sulawesi Selatan yang tidak datang sama saya mengatakan bang laporan saya laporan saya seperti ini dan saya atensi saya sampaikan keruangan ini, wabillahitaufik walhidayah, assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Terima kasih lanjut ke Demokrat, sebenarnya Golkar tapi biar aja.

**F-PD ( DIDIK MUKRIANTO, SH., MH.):**

Terima kasih Ketua, bismilahirrohmanirohim assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh , selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua nya, yang terhormat Ketua Komisi 3 beserta Pimpinan Komisi 3 dan segenap anggota Komisi 3, Bapak Kapolri Waka Polri beserta jajaran yang kami hormati.

Pada kesempatan pertama ini iijinkanlah saya memberikan apresiasi kepada Polri terkait dengan kinerja nya 2017 yang lalu, apresiasi ini tentu kami dasarkan kepada pertimbangan yang rasional dan capaian capaian yang dihasilkan oleh Polri yang kemudian terkonfirmasi didalam beberapa lembaga survey, kami mencatat bahwa kepercayaan publik terhadap Polri di 2017 ini cukup relative meningkat sebagai mana yang disampaikan oleh populi center bahwa kepercayaan Polri meskipun pada peringkat Polri tapi ini sudah kepercayaan publik di lembaga poling ini sudah cukup tinggi dan poltracking pun juga sudah menempatkan Polri pada peringkat 5 kepercayaan publik nya dibawah TNI, Presiden, KPK, KPU sebesar 60% dan termasuk Litbang Kompas pun juga menempatkan Polri pada peringkat 3 kepercayaan publik diangka 70,2% tentu hal ini membanggakan kita semua nya karena memang inilah yang kami harapkan dari Komisi 3 bahwa kepolisian terus meningkatkan kinerja dan layanan nya sehingga mendapatkan apresiasi nyata dari masyarakat namun demikian Pak Kapolri disamping capaian-capaian yang juga cukup terukur dan juga luar biasa ini masih ada beberapa catatan yang tentu ini menjadi perhatian Polri kedepan untuk memperbaiki managerial secara keseluruhan Polri karena berdasarkan keterangan dari Ombudsman bahwa ketidak percayaan atau laporan terhadap kepolisian ini menempati peringkat 2 setelah complain masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan poin dari laporan masyarakat ataupun ketidak puasan masyarakat ini seputar persoalan-persoalan diantaranya yaitu yang ditangani oleh Reserse dan Lantas tentu ini menjadikan sebuah perhatian kita bersama karena Reserse dan Lantas ini juga menjadi pelayanan publik yang sangat didamba-dambakan kehadiran nya dan betul-betul menyentuh apa yang dirasakan masyarakat dibawah gitukan, belum lagi bahwa di tahun 2017 ini meskipun beberapa persoalan kepersoalan di Kepolisian ini turun dibanding tahun yang lalu namun saya juga masih mencatat ada 5067 pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan ada 749 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan ada 170 tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian tentu ini menjadi catatan bagi kepolisian untuk terus meningkatkan kinerja nya dan dalam konteks itu tentu yang menjadi perhatian kami bagaimana polisi kemudian juga memperbaiki managerial penanganan perkara khusus nya penyidikan dilain selain yang dikeluhkan masyarakat yaitu terkait dengan juga ada nya kesan publik kepada polisi yang masih melakukan pelanggaran hukum terhadap masyarakat nah pada poin itu pak tentu kami ingin menggaris bawahi dan berpesan kepada Kapolri masyarakat sudah memberikan sebuah penilaian kepada Kapolri yang luar biasa bagus tapi masih ada harapan untuk diperbaiki kami pun dari Fraksi Demokrat mengharapkan pak, apa yang

disampaikan rakyat itu sedikit juga menjadi pengharapan kami, terkait dengan pelaporan dari Ketua umum kami Bapak SBY yang menjelang pemungutan suara DKI yang melaporkan Pak Antasari Azhar yang diduga melakukan pencemaran nama baik atau fitnah hingga saat ini juga belum ada progress yang cukup bisa kami terima. Nah tentu ini seiring dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat kami pun sebagai masyarakat juga menginginkan bahwa penegak hukum harus tetap adil, proper dan proposional tanpa ada muatan-muatan kepentingan atau intervensi apapun diluar kepentingan hukum sendiri kami sangat berharap itu.

Kemudian kedua bapak, terkait dengan Pilkada tentu mungkin sikap kami berbeda dengan sahabat kami dari Arteria bahwa kami pertama mengapresiasi semangat dan komitmen dari kepolisian untuk menjaga netralitas dalam pilkada ini dan kami melihat dan mengapresiasi komitmen dan semangat itu juga sudah dituangkan didalam beberapa Perkap oleh Kapolri dan tentu ini memberikan iklim yang positif terkait dengan pilkada kedepan ini, namun pak lagi-lagi bahwa komitmen dan semangat itu bukan hanya dituangkan dalam bentuk peraturan tapi yang terpenting adalah realisasi dan aplikasinya bagaimana jajaran kepolisian kemudian mengawasi segenap jajaran nya hingga tingkat bawah termasuk Kapolsek juga memberikan pemahaman yang sama terkait dengan netralitas ini, kenapa kami sampaikan pak beberapa Pilkada di daerah kami mendengar ada potensi atau kecenderungan di tingkat Polsek yang tidak netral misalkan di Kalimantan Barat, misalkan di Sumatera Utara ini teridentifikasi adanya potensi dari aparat bapak ditingkat Polsek atau Polres yang untuk mengarahkan kepada salah satu pimpinan tentu ini potret buruk terhadap komitmen polisi dan tentu ini sepenuhnya kami ingin mendorong agar betul-betul komitmen dari Kapolri ini menjadi bagian sukses Pilkada kita yang menghasilkan Pilkada yang Demokratis dan berkeadilan dan tentu pak juga perlu kami sampaikan kami mendukung penuh pak bahwa komitmen kepolisian dalam membentuk Satgas politik uang, karena politik uang ini menjadi musuh dari kita semua nya menjadi musuh bangsa kita dan ini yang merusak sendi-sendi demokrasi kita, meskipun di undang-undang sudah jelas bahwa aturan tentang politik uang sudah ditangani melalui Gakkumdu dalam hal ini Bawaslu namun tentu pencegahan-pencegahan atau penyadaran terhadap masyarakat dan pengawasan juga harus kita lakukan tidak cukup hanya dilakukan penindakan, saya sepakat dengan bapak pencegahan menjadi penting agar budaya ini juga menjadi budaya yang baik dan terkait Pilkada pak satu lagi yang ingin kami mintakan penjelasan kepada bapak, didalam kompetisi Pilkada ini kita menyadari memanas nya situasi politik persepsi publik ini sangat berimplikasi kepada electoral seorang pasangan calon nah apapun cara apapun propaganda akan dilakukan lawan politik yang ingin kami sampaikan pak, yang paling menakutkan bagi pasangan calon adalah ketika pada saat proses pemilu terjadi yang bersangkutan diperiksa mengenai persoalan pidana, nah persoalan pidana ini kami tidak ingin mencampuri bahwa persoalan hukum adalah harus ditegakan namun penegakan hukum ini juga harus arif dan bijaksana jangan kemudian dikesankan menjadi sebuah alat politik ataupun bahkan dijadikan alat propaganda buat lawan-lawan politik untuk terus melakukan degradasi persepsi publik kalau ini terjadi pak, bisa jadi bahwa apa yang dilakukan penegakan hukum yang tidak proper dan proporsional tidak tepat waktu akan dijadikan bahan negative campaign bahkan bisa meningkat kepada black campaign dan ini sudah barang tentu akan mencederai hasil demokrasi kita untuk itu tentu kami ingin mendengar penjelasan bapak terkait dengan komitmen polisi sebagai aparat penegak hukum didalam menegakan hukum selama masa pilkada ini yang melibatkan yang diindikasikan melibatkan pasangan-pasangan calon didalam konteks itu kecuali OTT kalau OTT kami menyadari sepenuhnya pak karena itu memang suatu hal yang memang harus ditindak dengan tegas.

Kemudian pak yang ketiga atau berikutnya sekali lagi kami juga ingin mengapresiasi langkah Polri yang kemudian punya komitmen untuk memberantas hoaks, hoaks ujaran kebencian ini menjadi musuh bangsa hoaks dan penyebaran kebencian itu merusak generasi kita ini sesuatu hal yang tidak boleh ditoleransi namun kami menyadari bahwa memberantas hoaks menurut hemat kami tidaklah mudah melihat pengguna akun social media, melihat pengguna internet yang luar biasa ini berpotensi akan bisa juga akan memperbanyak terjadi miss persepsi sehingga menggugah hal-hal yang tidak pada tempat nya nah dalam konteks itu tentu didalam penanganan hoaks ini yang sekarang ini juga masih dilakukan polisi kami juga berharap kami punya harapan dari segenap kader harapan bahwa penertiban hoaks penegakan hukum didalam cyber crime ini juga harus didasarkan kepada azas keadilan didasarkan kepada azas yang profesional tidak ada tebang pilih, tidak ada kesan pandang bulu dan dilakukan terhadap semua karena mudah bagi kami, mudah bagi masyarakat mudah bagi pengguna internet untuk mengawasi apa yang dilakukan kepolisian jangan sampai kesan ada polisi tebang pilih bahwa karena kelompok ini seolah-olah dikesankan berafiliasi dengan sebuah kekuatan politik ini yang dibasmi sementara ada akun-akun yang nyata-nyata di memata publik terus menebar hoaks yang berafiliasi kekuatan politik tertentu dibiarkan nah ini perlu Kapolri atau Kepolisian menjelaskan kepada publik polisi harus jernih melihat ini jangan sampai penegakan hukum pun kemudian dijadikan sebuah kesan alat politik untuk memperuncing persoalan-persoalan penegakan hukum ini dan ini juga titipan pertanyaan dari masyarakat pak mungkin Pak Kapolri bisa menjelaskan kepada masyarakat lewat forum komisi 3 ini bahwa kita lihat bagaimana penanganan terhadap beberapa yang diduga menyebarkan kebencian melalui media internet kemarin banyak diperlakukan seperti menurut publik pak kesan publik yang ditangkap adalah berlebihan di borgol diperlakukan ya bermacam-macam di pertontonkan kepada media apakah memang sebahaya itu mereka didalam melawan kepolisian apakah ketika dilakukan proses penangkapan mereka melakukan perlawanan yang demikian keras sehingga dipertontonkan di drama di publik ini sedemikian bahaya nya mereka pelaku-pelaku itu nah ini kesempatan bapak menjelaskan kepada publik karena ini juga keresahan-keresahan yang harus dijawab terkait dengan apa yang dipersepsikan oleh publik.

Dan yang terakhir pak, mungkin ini aspirasi Dapil kembali dapil saya sama dengan pak Wihadi tadi Bojonegoro Tuban ini sebetulnya tidak segmented kepada Dapil tapi kami ingin bertanya pak, pertimbangan bolehkan kami bertanya terkait dengan pertimbangan-pertimbangan polri untuk menempatkan personel-personel nya pada posisi strategis kenapa kami tanyakan itu pak, kami itu di Dapiil selalu ditanya oleh masyarakat kami khusus nya di Tuban Selatan kebetulan Tuban Selatan di salah satu Kecamatan Bangilan nya itu adalah center gravity dari ulama di Tuban disitulah tempat pesantren-pesantren besar hidup disana selama ini mereka hidup rukun bekerja sama dengan kepolisian karena kepolisian mampu melakukan komunikasi yang bagus dengan masyarakat dengan ulama ketika melakukan aksi keagamaan ketika sembahyang mereka bersama-sama dan polisi memberikan kesadaran hukum atau mengisi beberapa tausiah setelah sholat Jumat di Masjid namun pak belakangan ini mereka resah mereka hanya ingin bertanya saja apakah pertimbangan polisi kemudian yang selama ini komunikasi jalan sekarang ini komunikasi yang terjadi dengan polsek setempat mampet, mampet itu dikarenakan dimana disitu banyak nya ulama banyak nya pesantren kemudian ditempatkan kapolsek yang tidak sealiran sehingga ini membuat mampet dari komunikasi, saya tanyakan beberapa kali ke Kapolres apa pertimbangan nya bisa saya menjelaskan ke publik kami hanya tau apakah memang Tuban Selatan ini menjadi daerah yang berbahaya apakah Tuban Selatan itu menjadi daerah yang kemudian berpotensi ada yang teroris sehingga harus ditaruh orang yang berbeda disitu berbeda pandangan dengan masyarakat kami kesulitan wakil rakyat karena kami tiap hari turun ke Dapil kami mendengar

aspirasi mereka apa kalau mereka sudah tidak percaya kepada kami siapa lagi yang akan dipercaya apakah kami melempar persoalan kepada kepolisian atau kapolres kami tidak ingin pak, nah untuk itu pak karena ini jawaban-jawaban tidak saya dapatkan dari Kapolres tolong kalau boleh pertimbangan-pertimbangan itu juga diberikan kepada kami biar kami bisa menjelaskan ke publik kalau dianggap daerah berbahaya ya kami harus sampaikan biar kami bisa memperbaiki kalau tidak ada resening tidak ada alasan nya bagaimana mungkin publik bisa menerima penempatan itu yang kemudian mempersulit aparat keamanan sendiri didalam membangun komunikasi dengan publik demikian Pak Kapolri yang dapat kami sampaikan akhirukalam bilahitaufik bilahitaufikwalhidayah, wassallamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Waalaiikumsalam, lanjut PPP.

**F-PPP ( DRS. H. HASRUL AZWAR, MM. )**

P3.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Sudah Nasdem kan P3.

**F-PPP ( DRS. H. HASRUL AZWAR, MM. )**

Ha.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

P3, apa urusan tadi sudah selesai.

**F-PPP ( DRS. H. HASRUL AZWAR, MM. )**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolri Pak Tito, Pak Wakapolri Pak Syaf dan pejabat utama Polri lainnya.

Ketika masyarakat Indonesia termasuk saya melihat siaran langsung disalah satu TV Pak Tito bersorban putih berkopiah berdampingan dengan usatd Abdul Somad dan Arifin Ilham masyarakat itu teduh pak, sejuk ini cocoknya jadi Wakil Presiden ini cocok nya, masyarakat bilang seperti itu Pak Hasrul di Dapil saya, teduh pertanyaan bapak juga sejuk persatuan kesatuan sejuk aman terbukti hari ini prestasi Polri yang bapak pimpin makin bagus jadi visi misi bapak pada waktu Fit and proper test disini dimana kami yang bersama-sama dengan bapak dalam sebuah kata promotor itu terlaksana insyallah pak, nah uraian bapak yang paling panjang dalam buku ini adalah mengenai Pilkada panjang sekali pak, termasuk telegram bapak mengenai netralitas Polri, saya mohon Pak Kapolri netralitas polisi ini harga mati, jangan hanya di atas kertas saya mohon bapak terus menerus memonitor itu apalagi didaerah saya didaerah Dapil saya dengan Pak Junimart Dapil Sumatera Utara dinamika nya semakin tinggi pak, sudah ditarik kemana-mana ini pak, tarik ke suku tarik ke agama tari ke masa lalu , tarik ke latar belakang seperti yang Pak Tito sampaikan tadi, jadi netralitas Polri ini harga mati jangan sempat terkesan Polri ada keberpihakan apa lagi ada beberapa calon kepala daerah yang perwira Polisi didaerah saya juga ada pak di daerah Tapanuli Utara nah ini satu pak.

Jadi monitoring terhadap netralitas ini wajib tidak cukup hanya dengan telegram saja tidak cukup hanya dengan laporan-laporan lisan saja tapi bapak harus membentuk tim untuk itu, kenapa karena keberhasilan Polri menjaga netralitas dan keamanan Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni ini sebagai sebuah uji coba untuk Pileg kedepan pak, Pileg dan Pilpres pada tahun 2019 ini langkah pertama pak ini batu ujian yang paling berat karena Pilkada serentak ini penuh kerawanan itu yang pertama pak.

Yang kedua, saya membaca mengikuti dan sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Syafrudin sebagai Wakapolri, jangan lagi digunakan istilah muslim cyber army Pak Tito apa MCA itu ada apa enggak, atau adakah orang yang menamakan MCA atau memang wujud MCA itu ada, Muslim Cyber Army itu, tidak ada, menurut saya tidak ada, di Jakarta saya sering berkomunikasi dengan Pak Idham saya tau betul nomor telephone beliau angka 84 terakhir betul pak, betul, kok semua kita enggak dapat nomor nya ya, saya dapat nyambung, nda ada pak, jangan terlalu ditarik kemana-mana Muslim Cyber Army ada enggak kalau enggak ada nyatakan itu emang tidak ada kalau ada siapa itu yang mengatasnamakan muslim, saya muslim lho nanti saya bisa terkena itu sangat generaliser pak Muslim Cyber Army itu berat pak, jadi istilah-istilah seperti ini cepat Polri merespon nya ternyata MCA itu tidak ada dan tidak lagi menggunakan istilah itu.

Terakhir 1,6 ton terakhir prestasi Polri luar biasa itu, yang terakhir pak 1,6 yang di Batam, begitu kita melakukan pengerebekan terhadap Narkotika tapi masih banyak pak dibawah yang belum terungkap masih banyak pak, narkotika ya sulit pak memberantasnya saya ingin menyatakan sekali lagi kepada Pak Tito dan pada forum ini Narkotika yang beredar di Indonesia tidak hanya sekedar bisnis semata tapi sudah ada upaya untuk menghancurkan bangsa ini upaya memecah bangsa ini, upaya memporakporandakan generasi muda sehingga kemudian Indonesia rapuh pecah kita seperti Uni Soviet terdiri dari 15 negara hebat ini pak dan masuk nya begitu mudah tetap dari Malaysia, China, Malaysia, China ini ada apa dari 2 negara itu saja pak, Malaysia China barang-barang yang tertangkap yang kami saksikan China dan masuk nya semua dari Malaysia, masuk ke Tanjung Balai ke Dapil saya dari Malaysia Portlang, Pineng nah jadi ini sistematis pak merusak bangsa ini tidak sekedar bisnis semata, jadi kita perkuat dan saya salut bangga punya polisi Mabes Polri dan seluruh Prajurit Polisi yang bergerak melakukan penyitaan penertiban terhadap Narkotika ini dan sudah waktu nya Pak Tito bapak beserta Menteri Pendidikan duduk merencanakan kurikulum Narkoba disetiap sekolah, sudah waktu nya pak, sudah waktunya tidak lagi main-main pak anak SD, SMP ada dikalangan pelajar arisan narkoba setiap bulan dengan membayar 50 ribu sudah terdeteksi semua pak, maka sudah waktunya bahaya narkoba menjadi pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan terima kasih semoga kita semua selamat kedepan dan Indonesia semakin jaya, wabillahitaufik walhidayah assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Waalaiikum salam, dari atas lagi itu PAN silahkan.

**F-PAN ( DAENG MUHAMMAD, SH., M.SI.)**

Bismilahirrohmanirohim, assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh yang saya hormati Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati Pak Kapolri Wakapolri dan jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang mudah-mudahan di muliakan oleh Allah Subhana Wataallah. Pertama-tama mungkin sudah banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman di Komisi 3 berkaitan persoalan-persoalan fungsi pengawasan kita sebagai Komisi 3 terhadap mitra kerja Kepolisian Republik Indonesia, dibenak saya banyak berkecamuk berkaitan dengan persoalan kepolisian pertama adalah saya ingin melihat Polisi

kedepan itu ketika Pak Tito menjadi Kapolri juga dengan konsep dan visi luar biasa dulu ketika melakukan fit and proper kita berharap ada pemikiran perubahan yang betul-betul professional di dunia kepolisian, professional bukan hanya pada tatanan tingkat elite kepolisian professional bukan hanya pada tatanan tingkat Mabes dan Polda di kepolisian tapi sampai kedaerah sampai ketingkat Polsek sampai penyidik ditingkat Polsek, kenapa karena semua personal kepolisian itu ada dimana-mana bahkan mampu mencover setiap desa-desa yang ada di kita karena personal kepolisian itu sampai Bimas pun luar biasa sebetulnya mampu mendengar mampu melihat sebelum apapun terjadi sebetulnya di masyarakat kita karena indicator nya sangat tertangkap dan kepolisian pasti lebih cepat berkordinasi dibandingkan lembaga penegakan hukum yang lain nya, ada satu pertanyaan dari saya banyak hal berkaitan dengan kekinian sebetulnya pertama adalah tadi saya ingin menanggapi sebetulnya berkaitan dengan statement Pak Akbar Faizal berkaitan persoalan-persoalan kenapa di Kepolisian ini berkaitan dengan dasar bahwa ada gejala saya sering mendengar juga di masyarakat bahkan di internal kepolisian yang akhirnya muncul pertanyaan ke saya berdasarkan dasar nya satu pak berkaitan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012 tentang mutasi anggota Kepolisian Republik Indonesia pertanyaan ini muncul pak karena kecintaan saya terhadap Polisi, bapak saya Polisi pak, keluarga saya banyak Polisi pertanyaan nya satu adalah ketika bang Akbar bicara konteks kenapa sih kadang-kadang ada kepolisian di internal yang lari ke kita yang bertanya ke kita kalau persoalan didalam internal kepolisian itu beres rapih dan tidak persoalan saya pikir mereka tidak akan lari kekita karena kita dianggap sebagai mitra polisi berkeluh kesah dengan kita sebagai mitra nya saya pikir wajar juga, nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu mampu yang saya harapkan tadi menjadikan Polisi lebih professional kedepan memberikan kesempatan kepada siapapun yang punya prestasi yang punya karakter yang mampam menjadi Polisi yang humanis kedepan hanya ini menjadi persoalan kalau tidak ada persoalan tidak mungkin mereka mencari solusi keluar gitu lho ini juga perlu dicermati didalam internal polisian ini otokrtik terhadap kita semua ini otokritik kecintaan saya terhadap polisi jadi tidak mungkin ketika ada personal kepolisian didalam yang teriak-teriak atau meminta tolong keluar kalau didalam internal kepolisian nya proses nya itu berjalan dengan baik dan benar mereka mampu terayomi mereka merasa mendapatkan keadilan mereka ketika berprestasi juga diberikan reward ketika mereka berprestasi diberikan juga apa nama nya funishmen hukuman saya pikir akan menjadi fear nanti dan wajah kepolisian saya pikir akan menepatkan orang-orang yang betul-betul berdasarkan prestasi berdasarkan memang kinerja dan lain-lain saya pikir peraturan itu sudah ada dalam internal kepolisian tinggal bagaimana kepolisian mampu menerapkan itu secara baik dan benar itu saja.

Yang kedua pak, bicara konteks profesionalisme juga saya bicara konteks di Dapil satu contoh misalnya kaitan kemarin isu tentang Muslim Cyber Army tadi sama ini perlu penekanan juga karena saya juga membawa aspirasi dari daerah wabilkhusus di Jawa Barat saya cukup mengenal banyak ulama dari mulai ujung Jawa Barat sampai keujung Banten mereka memberikan saran aspirasi dia bilang Pak Daeng karena Pak Daeng Komisi 3 sampaikan kadang-kadang kita bicara konteks misalnya persoalan oh selalu kalau konotasi nya yang sebelah kata nya kenapa tidak menjadi ramai, misal kalau bicara muslim waduh sudah ramai sekali di media Muslim Cyber Army dimana Pak Daeng orang muslim yang mengajarkan boleh hoaks dimana muslim yang boleh mengajarkan fitnah kita dilarang tapi kalau orang menggunakan kata muslim terus memunculkan di media misalnya seolah-olah ini adalah cyber muslim army inikan reaksi aksi reaksi aksi jangan-jangan juga menggunakan kata muslim untuk menyudutkan kita ini pertanyaan Pak Kapolri supaya ini juga dijelaskan ke publik dan ini menjadi ranah sebetulnya buat Polri untuk menjelaskan ke publik ke masyarakat dan saya mengapresiasi ketika say abaca kemarin ada ulama yang kirim statement Wakapolri misalnya statement Wakapolri bahwa tidak boleh lagi institusi

kepolisian bicara konteks bahwa ini adalah muslim ini adalah muslim karena ini dimainkan pada sisi politik tertentu seolah-olah beberapa ulama kecewa kenapa harus kita, kita tidak pernah melakukan itu dan ajaran islam mengharamkan perilaku seperti itu ini catatan saya yang kedua.

Yang ketiga misalnya saya ingin ada konteks profesionalisme juga muncul sampai level yang paling bawah misalnya satu contoh dilevel Kapolsek sampai tatanan bawah karena begini pak kadang-kadang lucu ada kejadian kemarin anak dibawah umur anak SMA pertama saya tanya kemereka kenapa mereka punya Ganja karena satu minggu mereka dipasok gratis pak, dipasok gratis sama Bandar tuh enggak tau dari mana dikasih gratis dikasih Ganja dua linting satu linting anak SMA dibawah umur itu suruh cicipin setelah satu minggu mereka suruh bayar 100 ribu dikasih 2 linting, metode nya begitu pak, nah ketika ini dikasih kepada anak-anak dibawah umur ini, ini anak mencoba merokok total anak nya 6 orang tiba-tiba ini ditangkap pak anak ini ditangkap tiba-tiba juga 4 orang lepas 2 orang diproses yang satu ternyata ngerokok Ganja 2 linting itu yang satu di uji apapun ternyata negative tiba-tiba orang tua nya datang yang negative ini kebetulan buruh cuci di perumahan Pak minta tolong anak saya enggak ngerokok enggak apapun kenapa di proses tapi yang 4 itu kok bisa pulang karena memang negative anak saya 2 kali juga negative pula tetapi tetap keputusan Kanit Polsek itu bilang ini harus di assessment, assessment apa gitu lho pertama negative dia tidak melakukan itu diuji juga 2 kali negative terus tetap suruh di assement saya ingin mempertanyakan saja proses kenapa ada prosedur yang memang jujur saja satu diperlakukan berbeda satu diperlakukan berbeda ini terjadi pak dan saya jujur saja saya bertanya berkaitan dengan hal begini kadang jawaban nya ini tidak humanis gitu lho satu sisi misalnya kadang dilepas satu sisi ini diproses walaupun pertama dia tidak punya alat bukti pertanyaan satu dijawab nya adalah karena dia ngasih duit sebesar 10 ribu ke anak yang beli tapi diproses satu bulan di sel bahkan pendekatan nya lebih pada formil pembedanaan saya protes waktu itu enggak boleh kenapa itu lho pak kami ini adalah wakil rakyat ketika masyarakat yang tidak paham rakyat kita itu nyaris buat saya 50 70% di kampung itu tidak paham berkaitan dengan hukum maka mereka bertanya kepada kita, kita jawab pak, kita melakukan pendekatan bahwa ini yang harus dilakukan oleh kita saya tidak menafikan untuk intervensi atau apapun tapi ini demi wajah kepolisian yang humanis bukan aksi pendekatan formil pembedanaan, bukan aksi menjadi polisi yang kelihatan represif gitu lho ini anak di bawah umur pendekatan nya harus berbeda dan lain-lain ini menjadi catatan pak dari Fraksi Partai Amanat Nasional mudah-mudahan Pak Kapolri Wakapolri beserta jajaran semua mampu membikin wajah kepolisian lebih indah, lebih terlihat memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat Republik Indonesia itu saja terima kasih wabillahitaufik walhidayah wauminkum wasalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuh.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Walaikum salam, lanjut PKS.

**F-PKS ( DRS. H. AL MUZZAMIL YUSUF, M.SI. ):**

Terima kasih Pimpinan, Pimpinan yang kami hormati teman-teman anggota, bapak Kapolri wakapolri dan seluruh jajaran saya Al Muzzamil Yusuf A-93 Dapil Lampung priode sidang kali ini ditugaskan oleh Fraksi saya untuk di Komisi 3 pak, di Komisi 3 kami sempat bertemu dengan 5 Kapolri Pak Dai Bachtiar, Pak Sutanto, Pak Timor Pradopo, Pak Sutarman dan Pak Badrodin Haiti dan kali ini kami bertemu dengan yang keenam nya semoga Pak Tito bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagaimana pendahulu bapak.



Dalam pertemuan pertama pada sidang kali ini penugasan saya, saya ingin mengangkat suatu urgensi atau tingginya peran dan tugas Polri dalam konteks bahasa kemanusiaan ataupun bahasa agama, dalam bahasa agama ada 2 dimensi hajat kemanusiaan yang salah satu nya adalah langsung dipikul oleh Polri attahuminzu waamanhum minkhouf manusia tanpa mengenal suku ras agama dimanapun agama apapun atau tidak beragama sekalipun mereka menghajatkan attahuminzu bebas dari rasa lapar atau politik kesejahteraan dan waamanu minkhouf aman dari rasa takut jadi dalam konteks keduniawian tugas mulia Kepolisian itu mengambil 50% hajat kemanusiaan untuk mereka bisa tetap hidup waamanu minkhouf mengamankan rasa takut dan posisi polri lengkap dalam keamanan fisik maupun kemanan mental keamanan fisik yaitu mengamankan dari gangguan-gangguan keamanan yang mengganggu masyarakat ya tauran, keributan, kerusakan, kehancuran dan lain-lain maupun keamanan sikologis dalam konteks keadilan hukum rasa aman diperlakukan secara hukum dan ternyata keamanan inipun tidak hanya berdimensi fisik dan sikologis bahkan kesejahteraan yang kita bicarakan 50% pertama tadi sangat tergantung juga pada keadaan keamanan investor dan lain-lain itu sangat tergantung jadi keberadaannya 50% tapi mempengaruhi 50% lainnya yaitu kesejahteraan, luar biasa mulia nya tentu kita semua berdoa berharap semoga Kapolri dan jajaran nya bisa menjalankan amanat ini dan untuk masyarakat Timur bangsa Timur selain dunia tadi mereka selalu ada dimensi ukhrowi jadi sebenarnya lengkap itu di surat Quraisy itu falyabudu robahazal baits allaji attau minzu waamana minkhouf hendaklah mereka menyembah tuhan nya yang memberikan kesejahteraan bebas dari rasa lapar dan memberikan keamanan dari rasa takut dimensi spiritual itu ada di masyarakat timur sehingga sesungguhnya siapapun Pemerintahan didalam nya eksekutif legislatif yudikatif dihadapan publik nya diukur dalam tiga aspek utama ini, sejauh mana mereka bisa memberikan kesejahteraan sejauh mana bisa ... keamanan, sejauh mana mereka dalam konteks bangsa beragama kepemimpinan eksekutif legislatif yudikatif memberikan keteladanan yang sifat nya spiritual berikan keamanan orang beragama, pemulihan terhadap agama ya kebebasan beragama termasuk didalam nya keamanan para ulama, pemulihan-pemulihan kita dalam penggunaan terminologi yang terkait dengan agama oleh karena itu saya menyetujui beberapa pernyataan teman-teman tadi untuk lebih sehat nya kehidupan berbangsa bernegara kita dalam konteks-konteks tindakan hoks atau hoaks yang dilakukan kelompok tertentu yang mengatas namakan agama tertentu adalah lebih arif untuk tidak menggunakan penyebutan nama itu, kita pernah punya pengalaman OTB organisasi tanpa bentuk, penggunaan nama pemeluk agama tertentu mengingatkan orang kepada perilaku double standard nya barat untuk menyebut terorrisme Islam tapi tidak untuk menyebut agama lain nya, terorrisme sejenis dari agama lainnya oleh karena itu dalam konteks itupun kalau keamanan menyinggung kesejahteraan ternyata keamanan juga bisa masuk dalam wilayah keberagamaan saya kita lebih bijak memang kedepan kita menggunakan bahasa-bahasa yang lebih arif apapun agamanya tidak hanya satu agama lebih arif kita tidak menyebut karena seluruh umat beragama itu tersinggung dengan penggunaan itu padahal tidak ada ajaran agama yang memerintahkan seperti itu, pada saat yang sama ketika terror terhadap para ulama saya gunakan kata terror karena tidak satu, tidak kita gunakan kata terroris terhadap para ulama, kita masih menyebut nya ya ini bisa kita dapatkan ada link ada bisa jadi sakit jiwa belum jelas padahal menurut saya ini juga satu dimensi yang harus kita sikapi ya kalau kita mau sebut MCA harus nya hal yang lain juga ada terror terhadap kelompok umat, tapi tidak perlu kita saya tidak ingin menggunakan kalimat seperti itu yang penting adalah apresiasi publik akan kerja Densus 88 bisa menangkap jaringan telephone mereka saya kira sangat mungkin pula kegiatan-kegiatan itu bisa ditangkap dengan cara yang sama, kita ingin keberhasilan Densus dalam menangkap terroris sama dengan keberhasilan mereka untuk menangkap jaringan orang-orang yang dalam tanda kutip gila yang mengganggu meresahkan kehidupan umat beragama dan tiga hal ini keragaman, kesejahteraan dan keamanan pada ujung nya dalam konteks demokrasi kita harus siap mensukseskan pilihan rakyat

sebagai bukti ukuran keberhasilan dan kegagalan tidak dengan pilihan lain karena kalau pilihan lain anarki kita bisa masuk juga dalam poin of no return beberapa Negara di luar hancur-hancuran kita tidak masuk evaluasi terhadap eksekutif, evaluasi terhadap legislatif selalu bias ketika koalisi tentu pada aspek positif, oposisi pada aspek negatif tetapi ketika riset publik atau pilihan rakyat yang kita kelola dengan pilkada atau pilpres, pileg yang damai itulah pilihan kita kedepan dan Polri sekali lagi juga memainkan peran yang penting saya setuju ungkapan teman terdahulu bahwa harga mati netralitas itu baik karena dia perintah konstitusi Luber Jurdil maupun karena perintah undang-undang kita tidak boleh bermain api disini saya yakin itu sudah menjadi tekad Kapolri dengan jajarannya, oleh karena itu saya mengingatkan diri saya dan kita semua sebagai pejabat Negara kita melakukan peran politik real itu bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun tetapi sejarah peran sejarah dalam batas itu tapi tinta sejarah lebih lama kita ingin dicatat dikenang sebagai orang-orang yang memberikan kontribusi baik oleh karena itu diruangan ini kita semua tentu berharap termasuk jajaran Kapolri orang-orang yang dicatat dalam peran sejarah nya 2018 2019 adalah tahun Pemilu kita pertarungan bangsa kita ini tidak untuk terjerembab dalam satu lubang prahara yang tidak kita kehendaki tapi kita ingin berdemokrasi secara sehat dan perjalanan bangsa aman damai menuju peralihan kekuasaan sebagai konsekuensi demokrasi itu komentar pertama.

Komentar kedua saya adalah terkait dengan narkoba saya kira kalau kita bicara bencana yang menghancurkan dalam konteks 3 hal tadi keamanan kalau 3 pendekatan kita gunakan untuk menganalisa narkoba keamanan proxy war menghancurkan generasi kita ini dengan Narkoba itulah, perang candu sudah pernah terjadi di China, cara menghancurkan bangsa itu dihajarkan dengan narkoba maka kita tidak punya aparat keamanan pertahanan yang baik kita tidak punya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang kuat, karena rakyat nya hancur satu keamanan hancur kita, kesejahteraan bagaimana bangsa bisa bangkit sejahtera ditengah SDM pemuda pemilih pemuda 35 tahun kebawah sekarang 100 juta kalau mereka itu yang dikenai bagaimana bangsa akan sejahtera, agama hancur nda ada orang bisa beragama dengan narkoba yang luar biasa oleh karena itu seharusnya narkoba ini sudah dalam posisi terrorisme narkoba kita saya ingat pada priode lalu ya di Komisi 3 saya paling lama di Komisi 3 kita ke Polda Sumatera Utara mereka mengatakan Negara tetangga kita itu ada barang masuk pesawat dia enggak periksa mau masuk silahkan yang penting keluar sehingga saya mengamini juga yang disampaikan teman-teman terdahulu narkoba itu dari Negara tetangga kita masuk silahkan hancur Negara Indonesia enggak ada urusan dia enggak ada pemeriksaan, nah pada kesempatan ini posisi BNN dan Polri yang memang ada kordinasi pencegahan dan penindakan saya kira aparaturnya ada di Polri ... banyak tentu setelah diungkap Pak Buwas bahwa ratusan ton kalau ratusan ton ini alangkah sangat wajar nya kalau penangkapan narkoba dalam jumlah besar itu menjadi sebuah pembuktian akan kerja pengamanan ini, 3 hal tadi itu keamanan, kesejahteraan dan keagamaan, pada jaman pak Soetanto saya ingat Komisi 3 diajak digerakan kita berangkat ke Banten gudang pembuatan narkoba itu 2 besar nya dari ruangan kita ini pak, kita masuk ruangan sini, situ ruangan rahasia pelaku nya adalah orang Indonesia orang Asing kalau tidak salah China, Prancis dan Belanda kalau tidak salah, oleh karena itu hari-hari penangkapan harus nya besar kalau yang disebut Pak Buwas itu ratusan ton satu, kedua tindakan pembunuhan kalau Densus 88 menembak untuk terroris membunuh sekian orang ini memutus ratusan juta orang hukum mati banda narkoba itu tidak ada lagi dialog pak, tapi pemerintah yang sekarang hanya diawal saja saat-saat ini enggak kita dengar lagi, saya rasa rekomendasi itu harus datang dari Kapolri dan harus datang nya dari BNN ya, karena yang dibunuh mereka ratusan juta orang ya itu tentang narkoba.

Ketiga tentang kedaulatan seorang Menteri kita punya jasa besar yaitu Pak Juanda dengan deklarasi Juanda nya membuat konsep Negara kelautan dua juta luas laut kita laut tidak memisahkan pulau menyatukan kedaulatan kita bertambah menjadi 2 juta kilo meter persegi tapi sekarang teman-teman tadi mengatakan laut yang 12 mil kedaulatan kita jangan bicara laut, darat kita saja sudah dikuasai oleh beberapa pihak asing yang bukan sekedar mengelola tapi menguasai yang viral hari-hari ini adalah anggota DPRD kita di Mentawai Sumatera Barat membuktikan itu, di Dapil kami juga ada di Lampung di Sawaran punya siapa itu kita tanya, punya orang Prancis kata nya yang orang tidak bisa masuk, jadi kedaulatan kita 12 mil kelaut enggak usah bicara 12 mil ... di pulau itu saja sudah kedaulatan itu di rambah saya kira ini bagian dari kordinasi baik Polri maupun TNI ya tentu karena dalam tidak dalam konteks perang ya tentu dalam konteks Polri bisa masuk dalam hal ini ya.

Yang terakhir keempat adalah Dapil kami pak di Lampung ya terakhir ini bulan Maret ini pak terjadi kasus hal yang asusila yang melibatkan Kapolsek dengan istrinya Bripka bulan Maret ini saya kira ini segera perlu ditindak tegas, hal yang sama melibatkan perwira menengah pada bulan Desember 2017 dan Januari 2017 juga terjadi di Polda Lampung sebab ini akan jadi pembicaraan di masyarakat kalau pelaku nya polisi dengan polisi saja tidak ditindak bagaimana kalau dia mengganggu orang sipil lebih sulit lagi untuk ditindak, saya yakin propam sudah bertindak disini dan yang kami tunggu adalah ketegasan untuk menindak hal-hal yang seperti ini sebagai menjaga marwah kepolisian kita berdoa semoga Kapolri dengan jajaran Polisi dengan jajarannya bisa menjalankan amanat keamanan sepertiga hajat manusia yang langsung berhubungan dan kesejahteraan dan keberagaman assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

#### **F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh, sebetulnya waktu sudah lewat jadi kita istirahat dulu karena masih ada 2 yaitu PKB dan Golkar jadi biar aja nanti aja karena ini sudah jam 1 pak lapor kita dengan ini kita skors dan kita masuk lagi jam 14.00.

#### **KETOK PALU 1 X**

kita sudah terlambat 15 menit 10 menit untuk kita mulai lagi karena tadi ada Pak Wakapolri mau nonton bola kata nya jam 3.

Bapak/ibu Komisi 3 yang terhormat Pak Kapolri beserta seluruh jajaran nya skors kita cabut.

#### **KETOK PALU 1 X**

Sekarang silahkan PKB.

#### **F-PKB ( H. BAHRUDIN NASORI, SSI., M.SI.):**

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Pak Kapolri Pak Wakapolri beserta pejabat utama yang saya hormati Pak Kapolda, Ketua Komisi dan para Anggota Komisi yang saya hormati, pertama-pertama saya ingin menyampaikan klarifikasi kemarin pada waktu kami reses kunjungan kerja ke Bali salah satu anggota kebetulan wakil ketua dan ketua rombongan punya ide bahwa ada lokalisasi tentang perjudian dan penggunaan narkoba sehingga itu menjadi viral Pak Kapolri di viral itu ada photo saya juga disitu saya begitu ke Dapil kami dari PKB Pak Kapolri tentu Pak Kapolri tau pengurus PKB dan apa anggota PKB tentu banyak ulama dan santri santri Pak Ketua, Pak Barudin menyetujui itu ikut

mengusulkan tentang lokalisasi perjudian dan lokalisasi penggunaan narkoba saya bilang saya protes di forum itu tapi tidak jadi viral yang viral justru usulan itu akhirnya melalui forum ini Pak Kapolri saya dari PKB tentu tidak setuju dengan usulan dari pada salah satu anggota kunjungan kerja di Bali ini di forum ini sekaligus saya ingin menyampaikan itu, justru saya mengapresiasi pak Kapolri sepanjang saya jadi anggota Komisi 3 3 priode ini dan beberapa kali penggantian Kapolri dan penggantian Kapolda dan sering kami kunjungan kerja ke Bali justru saya mengapresiasi kepada Kapolda sekarang yang ada satu diskotik yang setiap saya datang ke Bali di lapori oleh para anggota PKB yang di Bali, tempatkan transaksi dan penggunaan Narkoba dan saya kira sudah tidak rahasia lagi diskotik itu nama nya Akasaka dan berkat Kapolda yang sekarang saya mengapresiasi Kapolda telah menutup Diskotik tersebut saya mengapresiasi terhadap Kapolda Bali tentu hanya saya, saya katakan kepada Kapolda Bali menyampaikan pak sekarang pindah tempat yang nama nya penggunaan narkoba dan distribusi narkoba ada di Lapas saya katakan kebetulan saya mewancarai alumni Lapas Grobogan dinyatakan oleh alumni tersebut bahwa setiap malam ada transaksi setiap blok itu hampir 400 juta jadi Pak Kapolri sekaligus agar perintahkan kepada Kapolda-Kapolda dan Kapolres-Kapolres untuk mewaspadai Lapas-Lapas yang ada di Indonesia karena ..... kepada Lapas transaksi narkoba in iyang pertama.

Yang kedua saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman Komisi 3 yang telah membela para ulama tentang terror-terror ulama dan itu dialami oleh warga PKB dan kyai PKB Jawa Barat saya terima kasih Pak Kapolda Jawa Barat yang telah juga hadir di Cicalengka meninjau Kyai saya kebetulan ..... Syuro PKB juga yang telah dibacok dan Alhamdulillah hari agak ada perbaikan kesehatan makasih Pak Kapolda, teman-teman sudah menyampaikan banyak tentang terror dari pada ulama untuk itu saya juga berharap Kapolri untuk mencari siapa biang-biang nya.

Yang ketiga tadi saya mengapresiasi juga Pak Kapolda Jawa Barat tadi disampaikan teman bahwa Kapolri duduk bersama dengan Mendiknas kata nya, waktu saya kunjungan kerja ke Kapolda Jawa Barat pak, Pak Kapolda telah menyampaikan persentasinya sudah dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat dengan Pak Gubernur Pak Kapolda kalau engga salah penggunaan sampai ke SMA-SMA karena SMA dan SMK itu adalah bagian Provinsi Jawa Barat tidak Kabupaten SMP-SMP bagian nya Kapolres sudah ada MUO nya MUO terhadap pendidikan penyalahgunaan di SMA dan SMK untuk itu barang kali nanti usulan agar Pak Kapolri bisa contoh coba di pakai dan saya berapresiasi juga kepada Kapolri ini hari ini survey-survey yang sekarang Polri menempatkan sudah naik rating nya kepercayaan masyarakat kepada Polri tentu ini saya mengapresiasi kepada Humas Pak luar biasa Pak apa nama nya Deputi Humas disana Pak Zis yang di TV sering muncul saya lihat ... biasa dan saya lihat muka nya enggak aneh lagi Pak Sutiyo nda saya kenal Pak Sutiyo lewat TV pak a luar biasa sehingga pencitraannya perlu maksud saya Pak Kapolri harus mengapresiasi supaya anggaran disana di perbesar lagi agar bisa naik lagi begitu, saya sebagai Banggar akan bantu bapak-bapak terima kasih barang kali itu saja klarifikasi dari PKB agar bahwa apa yang disampaikan salah satu anggota kunjungan kerja di Bali tidak itu, terima kasih, waallahumaufig illakaborik wasalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.

#### **F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Terakhir Golkar masih ada, ada yang mau disampaikan, pendek-pendek aja jangan panjang-panjang, silahkan.

**F-PG ( DR. IR. H. ADIES KADIR, SH., M.HUM.):**

Bismilahirrohmanirohim, assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh, Pimpinan dan Anggota Komisi 3 yang kami hormati, Pak Kapolri Pak Wakapolri beserta seluruh jajaran Golkar ini nda pernah panjang-panjang pak, pendek-pendek saja.

Pak Kapolri sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Pemerintah saat ini Pemerintah membuka kran seluas-luas nya terhadap pintu masuk bagi turis-turis mancanegara dan kita ketahui juga akibat dari banyaknya tenaga kerja asing dan turis yang masuk dengan dibuka nya visa masuk yang bebas itu banyak terjadi tindak-tindak kejahatan juga akibat dari pada hal tersebut seperti multi level money game dan juga masuk nya kejahatan-kejahatan narkoba kami ingin mengetahui antisipasi-antisipasi apa yang dilakukan oleh pihak Polri terkait dengan kedatangan tenaga kerja asing dan juga turis-turis yang kran visa nya di buka seluas-luas oleh Pemerintah belum lagi nanti kita ketahui dalam waktu dekat akan keluar juga peraturan turis asing dan tenaga kerja yang masuk di Indonesia tidak diperiksa lagi karena sebelum berangkat dari Negara asalnya sudah diperiksa disana dan discan disana nah hal-hal ini apakah sudah diantisipasi oleh pihak Polri.

Kemudian yang kedua Pak Kapolri ada hal yang cukup menyita perhatian publik akhir-akhir ini terkait berita kebocoran data di Menkominfo, Menkominfo data KK dan KTP yang diduga disalah gunakan nah sejauh mana apa pantauan dari pada Polri terkait dengan kasus ini karena ini juga menyangkut kerahasiaan tentang identitas dari pada masyarakat apakah benar terjadi hal-hal tersebut mohon dijelaskan.

Kemudian Pak Kapolri beberapa kali RDP Fraksi Partai Golkar ingin melihat langsung seperti apa sistem pembelajaran di PPATK di Sespim dan lain-lain kemudian juga fasilitas-fasilitas nya apa sudah sesuai seperti apa yang di mintakan apa bila ada penambahan-penambahan anggaran terkait dengan proses pendidikan di Polri kami usul mungkin Ketua beberapa kali juga kita usulkan mungkin kita lakukan peninjauan Kesespim, PPATK agar kita melihat langsung bagaimana sistem dari pada pendidikan yang dilakukan Sespim, PTIK mohon maaf, PTIK ya, PTIK dan Sespim kalau di Akpol kita kan sudah sering lihat di PTIK .

Terkait dengan Dapil disetiap kunjungan kerja Pak Kapolri kami melihat markas-markas Brimob nya itu sudah luar biasa bagus tapi di Jawa Timur di Porong Sidoarjo itu Markas Brimob nya ketinggalan dengan yang lain padahal Jawa Timur Pak Kapolri minta tolong diperhatikan untuk Markas Brimob di Porong Sidoarjo agar supaya tidak kalah dengan punya nya Pak Junimart di Sumut sana itu saja dari Fraksi Golkar Pak Ketua terima kasih assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Waallaikum salam warahmatulahi wabarakatuh, seluruh fraksi sudah menyampaikan aspirasi nya oleh karena itu.

**ANGGOTA ..... :**

Anggota pak.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Oleh karena itu barang kali kita.

**ANGGOTA ..... :**

Intrupsi Ketua.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Jadi nomor satu jadi,

**ANGGOTA .... :**

Sekaligus.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Sebentar ini, ini kita pakai aturan dulu nanti ini waktu nya, jadi karena mengingat waktu nya kemudian kita kasih Pak Kapolri untuk memberikan jawaban nanti kalau memang ada hal-hal yang masih belum terjawab atau belum terungkap mungkin kita bisa pertimbangkan untuk menambah sesi berikutnya.

**F-PD ( IR. MULYADI ):**

Usul Pimpinan.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Silahkan Pak Kapolri.

**F-PD ( IR. MULYADI ):**

Intrupsi Ketua karena ini ada yang baru biar sekaligus nanti dijawab, iijinkan saya menyampaikan ada satu beberapa poin terima kasih.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Nda bisa pak ini karena kita kan sudah sepakat tadi di kesemua, semua Poksi kemudian giliran Pak Kapolri untuk menjawab.

**F-PD ( IR. MULYADI ):**

Nanti akan jadi panjang.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Kalau memang diperlukan kita anu apa nama nya.

**F-PD ( IR. MULYADI ):**

Enggak.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Kita buat anu sesi lagi tapi kalau tidak diperlukan kita karena jawaban itu akan menyangkut apa yang telah ditanyakan.

**F-PD ( IR. MULYADI ):**

Ini lain pak, karena ini suara Dapil yang harus saya sampaikan mohon ijin Ketua tambah.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Saya kira kita tadi sudah sepakat pak, itu nanti kalau sudah satu mau semua saya kira sepakat saja kita ini silahkan pak.

**F-PD ( IR. MULYADI ):**

Usul Pimpinan Pak Kahar kalau bisa pak, kita sesuai dengan tata tertib saja pak, tata tertib itu hak anggota itu kan pada saat Raker kan memang harus diakomodasi dalam sebuah rapat, bahwa yang dulu berbicara adalah Fraksi setelah itu Anggota itu silahkan masing-masing Komisi punya kebiasaan tersendiri pak, tidak bisa pendapat Anggota sampai tidak bisa menyampaikan pendapat disebuah Rapat Kerja pak, itu melanggar tata tertib pak jadi saya mengusulkan kalau ada yang nambah satu dua sebaiknya mereka menyampaikan satu dijawab sekaligus pak dari pada menunggu jawaban selesai terus mereka menyampaikan lagi nanti bolak balik pak.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Pak kita tadi sudah sepakat, sepakat nya itu per Fraksi dan itu sudah disini semenjak saya belum datang a kemudian untuk hari ini kita juga sepakat nya seperti itu, tadi kita sudah sepakat habiskan dulu per Fraksi jawab oleh Pak Kapolri nanti kalau memang diperlukan kita kaya dengan KPK itu pak.

**F-PD ( IR. MULYADI ):**

Kalau saya nda keberatan tuh dua hari dua malam, tujuh hari tujuh malam.

**F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Ya saya setuju Ketua.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Tetapi ini kesepakatan kita harus kita pegang, jadi kita harus kasih contoh juga.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Pak Ketua intrupsi Pak Ketua.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Jadi kita harus kasih contoh juga, bahwasan nya kita itu ada disiplin ada kesepakatan dan yang kita pegang oleh karena itu sekarang kami persilahkan Pak Kapolri untuk memberikan jawaban terima kasih.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Pimpinan, Pimpinan saya saran sebaiknya Pak Kapolri diberikan waktu untuk menjawab berapa lama jadi tidak bias kemana-mana, ya Pak Kapolri kalau sepakat, Pimpinan terima kasih.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Kita tentative waktu sampai jam 3.

**F-PDIP ( ERWIN TPL TOBING ):**

Pimpinan.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Ya.

**F-PDIP ( ERWIN TPL TOBING ):**

Begini Pimpinan kalau dijawab Kapolri ada kesempatan lagi sama kita, harus ada kesepakatan.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Ini jawaban dari Kapolri dulu pak.

**F-PDIP ( ERWIN TPL TOBING ):**

Baik tapi.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Nanti kalau memang kesepakatan forum kita akan tambah.

**F-PDIP ( ERWIN TPL TOBING ):**

Kita putuskan sekarang pak.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Iya, setelah Kapolri ada lagi teman-teman mau nanya.

**ANGGOTA ..... :**

Sudah tadi sudah disebutkan

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Jadi sekarang dia dulu pak, saya ngatur rapat jadi dia dulu kita sudah sepakat, silahkan Pak Kapolri.

**ANGGOTA ..... :**

Jam 3.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

**KETOK PALU 1 X**

Jam 3 kita.



## KAPOLRI :

Baik pak, jadi kalau kami boleh usul pak, kami akan menjawab tapi saya juga nanti akan memberikan kesempatan kepada beberapa pejabat yang hadir disini untuk menjawab teknis karena ada pertanyaan-pertanyaan teknis, kemudian kalau mungkin setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan tambahan mungkin dibuat saja pak mungkin secara tertulis nanti kami jawab langsung gitu ini usulan pak.

Baik mohon ijin pak ada beberapa saya kira nanti yang saya jawab dulu pertama mengenai masalah netralitas tadi pak, mengenai masalah netralitas kita sudah mengeluarkan sekali lagi telegram surat edaran kemudian Kadiv Propam juga sudah melalui WA macam-macam item nya ada 13 item itu termasuk untuk hadir pada saat kampanye kecuali itu pengamanan kemudian termasuk kita untuk melakukan selfi dengan pasangan calonpun kita larang karena apa karena nanti bisa saja nanti dipakai oleh pasangan calon tertentu kemudian cropping ditambah-tambah lagi seolah-olah ini mendukung dari pada menimbulkan fitnah nantinya lebih baik tidak usah sama sekali nah untuk melakukan meyakinkan itu secara berjenjang kita melakukan pengawasan kepada para Kapolda dalam rapat-rapat video conference sudah kita sampaikan dalam Rapim TNI dan Polri bahkan Presiden sendiri menegaskan TNI dan Polri netral itu perintah nya beliau kepada seluruh Pangkotama Panglima Komanda Utama kalau kita Kapolda itu sudah jelas yang diikuti juga melalui video conference oleh para Kapolres Dandim dan lain-lain kemudian di Rapim Polri sendiri kita menyampaikan juga hal yang sama kemudian kita melakukan pengawasan disamping secara berjenjang Kapolda Kapolres dan seterusnya sampai ke Kapolsek Babinkamtibmas juga mekanisme pengawasan internal Polri seperti Irwasum, Propam ini juga bermain semua pak untuk mengawasi kalau ada laporan-laporan pasti kita akan tindak lanjuti sekali lagi memang kita tidak akan mengorbankan institusi untuk perorangan ditambah lagi nanti Panglima TNI dan Kapolri akan melakukan kunjungan kerja bersama mengumpulkan anggota-anggota TNI dan Polri tentang netralitas dan soliditas intinya dua itu dan kemudian yang utama adalah didaerah-daerah yang ada calon-calon anggota Polri dan TNI Purnawirawan yang menyalonkan diri disamping daerah-daerah lain yang kita anggap itu prioritas untuk kita atensi kerawan konflik lain-lain bahkan ada 13 poin sebetulnya yang sudah kita sampaikan pak.

Nah kemudian tadi ada pertanyaan mengenai dari Pak Didik Mukrianto Demokrat, pada saat pemilihan calon diperiksa Polri, calon diperiksa ya, ya kita sampaikan karena ini penting dimana posisi Polri dalam meng apa menyikapi pemeriksaan pasangan calon atau calon yang diduga terkait kasus di Polri bagaimana langkah-langkah yang dilakukan karena kekhawatiran akan menjatuhkan elektabilitas yang lain, kami sudah mengeluarkan surat edaran yang secara tegas menyampaikan keseluruhan jajaran untuk menunda proses hukum bagi para calon yang sudah ditetapkan oleh KPU, KPUD tujuannya adalah pertama kita menghargai proses hukum, saya ulang proses demokrasi yang sedang berjalan memang demokrasi informasi hukum perlindungan ham lain-lain adalah bagian dari Demokrasi tapi *the hole mark of democracy* itu bagian utama dari pada demokrasi telah ilection pemilihan, pemilihan langsung khususnya oleh karena itu kita paham ketika calon atau pasangan calon sudah ditetapkan oleh KPUD maka dia bukan lagi menjadi diri sendiri tapi sudah menjadi milik partai dan menjadi milik pendukung nya dan kita juga tidak perlu alergi dengan kata-kata partai karena partai inilah bagian dari sistem demokrasi ini adalah kanal bagi masyarakat menyampaikan suaranya oleh karena itu kita juga harus hormati dengan demikian kita tidak lakukan proses hukum kecuali OTT dan undang-undang Pemilu kenapa karena undang-undang Pemilu memang dilaksanakan nya pada saat Pemilu itu dan memiliki hukum acara tersendiri secara hukum acara yang secara lebih cepat dibanding hukum acara dan lebih

sederhana dibanding hukum acara dikasus biasa kemudian kita tidak berarti ini menafikan penegakan hukum, penegakan hukum bisa kita laksanakan nanti setelah pemungutan suara dan penentuan siapa yang menang selesai sehingga ketika terjadi proses hukum misalnya yang bersangkutan menjadi tersangka atau di tahan misalnya maka tidak merugikan partai maupun pendukung nya lagi karena partai pendukung nya memiliki pilihan nah kalau memang kita akan menentukan apa langkah hukum kepada tersangka saya ulangi calon yang menjadi tersangka atau mungkin upaya paksa memang lebih baik fear nya sebelum ditetapkan oleh KPUD sehingga partai dan pendukung nya memiliki pilihan yang lain nah oleh karena itu kami menghargai proses demokrasi ini khusus untuk Polri kami tidak ingin menyinggung instansi lain khusus untuk Polri saya sudah berikan arahan untuk tidak melakukan proses di tengah proses demokrasi ini peroses hukum di tengah proses demokrasi jadi dilakukan penundaan dan nanti akan dilanjutkan ketika apa pemungutan suara sudah selesai dan penentuan pemenang sudah selesai itu kita laksanakan.

Kemudian yang lain adalah mengenai tadi cukup banyak saya kira yang menyampaikan pendapat mengenai istilah Muslim Cyber Army lain-lain ini istilah bukan dari Polisi istilah ini muncul dari hasil investigasi nanti Pak Fadil bisa menjelaskan kenapa karena kelompok ini menyebut diri mereka seperti itu jadi bukan Polri yang membuat bahasa seperti itu, sehingga bahasa ini sendiri bagi kita tentu nya enggak nyaman bagi warga muslim tidak nyaman bagi saya juga yang muslim ya tidak nyaman ini karena kita paham bahwa didalam ajaran agama islam sebagai mana disampaikan oleh para tokoh yang sudah banyak viral bahwa menyebar hoaks itu tidak sesuai dengan ajaran islam tapi apa mau dikata kadang-kadang istilah itu dipakai dalam rangka untuk menarik yang lain nah contoh nya misalnya yang sudah banyak kita pernah nangani setelah paska Bom Bali dan yang lain-lain terungkap kelompok pelaku nya begitu terungkap kelompok pelaku nya ditangkap ketemu dokumen-dokumen mereka menyebut kelompok itu adalah Al Jamaah Al Islamiyah dan itu keluar dari dibuktikan dari PUPJ dokumen PUPJ *Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah* kemudian keluar dari pengakuan para tersangka yang mungkin sudah lebih dari seribu sekarang ini diproses hukum ada yang sudah keluar menggunakan bahasa itu dan didalam banyak-banyak tulisan juga seperti itu kita enggak nyaman dengan bahasa itu terutama bagi kita yang umat islam tapi apakah kemudian kita menyalahkan Polisi nya menggunakan bahasa itu, tidak pendapat saya karena polisi hanya menyampaikan fakta-fakta nya ini kasus termasuk kasus al jamaah al islamiyah pengeboman itu akan sampai kepersidangan dan persidangan kita ini sangat terbuka lebih terbuka dari pada di Amerika semua orang bisa melihat media bisa melihat apa yang disampaikan oleh Polisi harus sesuai dengan apa ada nya fakta seperti itu sampai Kejaksaan seperti itu, sampai pengadilan terbuka seperti itu sehingga orang paham kalau polisi mengganti nama justru itulah merekayasa nda boleh apa yang disampaikan polisi ya itu tapi untuk supaya kita tidak menimbulkan apa ketidak nyamanan maka saya sudah menyampaikan dalam video conference kepada jajaran kepolisian lebih netral kalau kita menggunakan istilah jangan lagi bahasa Muslim Cyber Army tapi gunakan saja MCA karena mereka kadang-kadang menyebutnya disingkat nya MCA ya gunakan saja MCA itu akan lebih soft karena mereka fakta nya mereka gunakan itu juga disamping itu, itu akan membuat publik juga merasa nyaman karena nanti dikira apa nama itu yang membuat nama itu adalah polisi nah nanti saya kira Pak Fadil bisa menjelaskan ini nama itu apa dasar nya sehingga mereka menyebut nama itu apa bukti nya jangan sampai nanti dianggap ini polisi. Jadi sebetul nya kita ini bagi u terutama bagi warga muslim termasuk saya harus nya saya bukan marah kepada Polisi saya tersinggung kepada mereka yang menghijack membajak nama-nama ini dalam rangka untuk kepentingan kelompok mereka itu tapi tidak boleh menyalahkan polisi nya, polisi hanya menampilkan fakta tapi agar lebih soft maka arahan saya gunakan saja singkatan nya MCA kalau saya merubah nama itu ini barang inikan

sampai kepersidangan ni, tersangka sudah ditangkap barang bukti sudah disita polisi tidak bekerja sendiri hanya bagian dari pada criminal justice system menyidik menyampaikan fakta serahkan kepada Jaksa kalau P21 disidang, sidang nya terbuka keluar juga akan keluar bahasa seperti itu oleh karena itu polisi mengganti nama itu ya polisi nya salah itu justru merekayasa jadi apa yang ada di fakta penyidikan itulah yang dimunculkan dipersidangan tapi lebih Pak Fadil Brigjen Fadil jelaskan tentang MCA ini kenapa mereka menggunakan bahasa itu apa dasar nya mereka menggunakan bahasa itu fakta-fakta nya termasuk penanganan yang juga bukan hanya oleh kelompok-kelompok ini tapi banyak juga yang ditangani oleh justru yang menyerang mohon maaf menyerang kelompok non muslim ada juga untuk menunjukkan keseimbangan silahkan Pak Fadil.

**DIRPID SIBER BARESKRIM POLRI ( BRIGJEN. POL. DR. DRS. H.M. FADIL IMRAN, M.Si.):**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, terima kasih Pak Kapolri mohon ijin Pak Ketua Komisi 3 kami menjelaskan mengenai penggunaan frasa muslim dalam pengungkapan kelompok penebar hoaks yang baru saja kami tangkap.

Dimulai dari awal tahun 2017 dimana isu tentang kriminalisasi ulama kemudian pada awal Februari ada isu penyerangan dan penganiayaan ulama kami sudah melakukan penyelidikan dan investigasi online dari hasil investigasi online ini kami menemukan beberapa akun dan akun-akun ini yang berupa fan page maupun facebook group itu menamakan dirinya identitas nya dengan identitas antara lain ini temuan pak,united muslim cyber army ini yang kami temukan pak, kami lakukan pendalaman terhadap kasus-kasus konten-konten ini memang konten nya intensi nya memang memproduksi konten-konten yang sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 2 ini dapat dipidana karena mentransmisikan informasi elektronik yang dapat menyebabkan rasa permusuhan atau rasa kebencian yang mengandung unsur sara nah ini pak. Jadi proses ini tidak ujug-ujug proses ini sudah lama pak, terkait juga terkait dengan pertanyaan Pak Arteria tadi mengenai Sarachen ini, ini juga sama pak inikan tidak ujug-ujug kami menemukan nya ini, dari fan page dan facebook group ini kami melakukan cover online kemudian pendalaman dan penyelidikan penyamaran secara online sehingga kami menemukan admin dari kelompok ini sekali lagi bapak yang kami hormati bahwa terminology muslim itu berawal dari penyelidikan dan ini adalah murni penegakan hukum saya ulangi ini adalah murni penegakan hukum persoalan kemudian istilah ini menyinggung perasaan atau dipersepsikan berbeda pada kesempatan ini kami luruskan pak, kami juga sudah mendapat koreksi dari pimpinan seperti yang disampaikan oleh Kapolri tadi untuk kedepannya dan kami juga terima kasih atas masukan yang sudah disampaikan tapi pada prinsip nya ini adalah penegakan hukum fakta-fakta penyidikan tentu nya itulah yang kami tuangkan didalam upaya-upaya pembuktian dan pencarian alat bukti pak untuk membuat terang sebuah peristiwa tentu hal ini menjadi sebuah kebiasaan.

Selanjut nya mengenai polisi terkesan tebang pilih didalam melakukan penegakan hukum karena hanya menangkap dan hanya memproses hukum dari entitas tertentu atau kelompok social tertentu, pada kesempatan ini kami juga ingin luruskan bahwa hal tersebut tidak benar sudah ada 12 tersangka non muslim yang kami proses pak, karena juga menghina agama islam menghina symbol-symbol islam seperti kabah, alquraan, Nabi Muhammad Shallallahu'alihi wasallam, masjid dan sebagainya saya sebutkan ni nama nya yang pertama Endru Handoko ini menghina alquraan di vonis 2 tahun 8 bulan pak, Donald Ignatius Suyanto ini menghina Nabi Muhammad di proses oleh Direktorat Krimsus Polda Bali, Natalius Talambanua ini diproses oleh kami karena menghina symbol islam kabah

yang terakhir ini mungkin yang ramai Abraham Benmoses yang membuat video pendek dan kemudian memberikan koreksi terhadap rasullullah shallallahu'ali wasallam kami juga di praperadilan pak tapi tidak banyak publik yang mengetahui tidak banyak wartawan yang meliput bahwa kami di praperadilan dan sekarang masih sidang di pengadilan negeri tangerang ada lagi kasus Billi Mandola, Suhardi Winata, Kasman Beruto ini kalau dipertontonkan ke publik sangat-sangat melukai menyebabkan rasa kebencian dan permusuhan dan pelakunya ini non muslim pak, sebagai informasi tambahan kepada Pak Ketua dan bapak/ibu sekalian memang ini ada tim sniper namanya pak, isu-isu yang positif itu selalu dimatikan isu-isu yang negative lah yang kemudian selalu dikembangkan facebook group ini membernya bisa sampai ratusan ribu dan yang terakhir ini 110 ribu pak, GBK itu maksimum 80 ribu bisa dibayangkan 1 GBK tiap hari melakukan fitnah saya kira ini pak, yang kami sampaikan terima kasih, assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.

#### **KAPOLRI :**

Jadi sekali lagi mengenai masalah istilah ini, ini sebetulnya sudah sering kita menangani yang menghijack yang membajak apa symbol-symbol atau termonologi yang berhubungan dengan keagamaan untuk kepentingan mereka yang bisa membahayakan bangsa seperti tadi mungkin kita waktu pertama kali mendengar istilah Al Jamaah Islamiyah kita sangat mungkin alergi bagi kita umat muslim tapi ya faktanya begitu mereka yang menghijack dan kemudian kita singkat saja akhirnya jadi Jl sampai sekarang orang tau nya Jl aja ya, kemudian seperti ISIS juga sama begitu dibajak gitu, kata-kata itu, itu tidak menggambarkan umat muslim kesecara keseluruhan ini, oleh karena itu sekali lagi peradilan kita sistem peradilan kita sistem peradilan kita sangat terbuka dan ini apa yang dikerjakan polisi hanya bisa menyampaikan berdasarkan fakta mengumpulkan fakta, faktanya seperti itu kami enggak boleh robah-robah nanti kalau muncul juga .... dipersidangan nah nanti dipersidangan silahkan tentu nya nanti akan ada yang sangat-sangat terbuka itu nanti ada apa para tersangka memiliki ke hak mereka untuk membela diri dan lain silahkan terbuka kita lihat nanti bagaimana hasilnya di persidangan.

Kemudian yang kedua tadi mengenai masalah dari Pak Daeng Muhammad masalah pembinaan karir anggota Polri.

#### **F-PPP ( DRS. H. HASRUL AZWAR, MM.):**

Pimpinan Pak Muzakir, Ketua saya bisa intrup sebentar saja karena ini menyangkut tadi bagian dari pertanyaan saya soal MCA, boleh.

#### **F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Kira diselesaikan dulu pak tadi

#### **F-PPP ( DRS. H. HASRUL AZWAR, MM.):**

Oke lanjut.

#### **F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

... 3, 4 orang, silahkan.

#### **F-PPP ( DRS. H. HASRUL AZWAR, MM.):**

Mohon maaf.

## **KAPOLRI :**

Saya lanjut Pak Hasrul ya, ya masalah bin karir anggota polri tadi pak, ini bin karir anggota Polri ini memang kita, kita ini memang jumlah cukup Kombes tadi yang ditanyakan cukup banyak pak, semua mungkin pengen naik menjadi Brigjen begitu pak ya, tapi memang kesempatan nya terbatas ruang terbatas oleh karena itu kita sudah berupaya untuk memberikan peluang membuka ruang itu diantaranya dengan pemerkeran organisasi beberapa Polda menjadi Tipe A sudah ada Kalimantan Barat, Riau dan lain-lain kemudian juga ada penambahan Polda baru seperti Polda Kalimantan Utara, Sulawesi Barat kemudian BNNP yang tadi nya ada yang Kombes sekarang Brigjen pak di tiap-tiap Provinsi kemudian juga ada yang diluar struktur ni kemudian ditambah lagi sekarang kita membuat jabatan fungsional dengan gaji tertentu dengan yang diberikan gaji jabatan fungsional supaya tidak berebut di struktur ini pak, nah ini memang kita lagi berupaya sekali lagi membuka ruang-ruang seperti itu sehingga ini bottle neck ini bottle neck ini kalau sudah mau masuk ke Brigjen ni kita bottle neck ini bisa kita lebarkan kemudian rekrutmen juga kita tidak lagi menggunakan prinsip rasio tapi minimum zero growth artinya merekrut sejumlah anggota yang pension plus tambahan Polres atau Polda-Polda yang baru memerlukan penambahan sekaligus juga untuk mengefisienkan belanja pegawai ini pak, ini mungkin hal-hal pokok kalau.

Untuk mengenai masalah Narkoba tadi pak, narkoba banyak pertanyaan juga mengenai ini ya kita memang karena Negara kita middle class nya growing, middle class nya growing kelompok kelas menengah yang memiliki kemampuan daya beli meningkat seiring dengan kesejahteraan yang meningkat mungkin sehingga otomatis menjadi pasar yang sangat potensial di Indonesia, tindakan tegas saya kira sudah banyak kita lakukan yang melawan saya sudah perintahkan yang melawan Bandar-bandar kalau mereka melawan ya udah selesaikan saja kira-kira seperti itu, kemudian masalah nya memang wilayah kita border nya sangat luas panjang kemudian masuk barang-barang ini sebagian besar memang berasal dari China, Malaysia transit di Malaysia tapi dari China tapi bukan dari Negara nya tapi dari kelompok-kelompok mafia yang ada disitu karena ada didaerah perbatasan China dengan Laos dan Kamboja itu yang relative apa nama nya itu tidak bertuan disitu, disitu di produksi justru kita banyak bekerjasama dengan kepolisian China, Hongkong, Taiwan, Malaysia, penangkapan-penangkapan yang kita lakukan ini karena supply-supply informasi dari mereka juga ini jadi kerja sama, sekali lagi bukan Negara bermasalah, yang bermasalah kelompok-kelompok mafia sama dengan di kita, kita Negara tidak mentolerir ada nya narkoba tapi kemudian beredar di Indonesia ini tidak berarti bahwa kebijakan Negara memperbolehkan narkoba tapi ada pemain-pemain nya yang mereka juga inilah big profit bagi mereka untung nya besar sekali itulah salah satu faktor yang membuat kemarin kita menyepakati untuk menunjuk dan mengusulkan Deputy Penindakan KPK Pak Heru Winarko untuk menjadi Kepala BNN dengan harapan ini godaan nya besar di Narkotik ini dengan kultur yang dibawa Deputy penindakan dari KPK kita harapkan anggota-anggota yang menangani narkoba ini mereka akan lebih kuat menghadapi godaan dan berani untuk bertindak lebih tegas kepada kelompok-kelompok narkoba ini disamping tentu nya pencegahan mengenai kurikulum kami sependapat terima kasih masukan nya nanti kita akan bicarakan dengan Kementerian terkait untuk memasukan kurikulum bukan hanya di Kementerian Dikbud Dikti tapi juga Kementerian Agama dengan Pesantren-pesantren dan lain-lain, berikut mungkin saya serahkan kepada Pak Wakapolri untuk menjawab mengenai masalah Satgas Pangan tadi terutama masalah bawang putih, garam dan lain-lain pak, kami persilahkan pak.

## WAKAPOLRI:

Terima kasih Pak Kapolri, kami akan menyampaikan 2 pertanyaan eh bukan menjawab 2 pertanyaan yang pertama dari Pak Arteria yang satu lagi dari Pak Akbar Faizal ini karena lawannya ini ya.

Jadi jangan ada yang keluar didalam saja ya, tadi salah satu mau keluar, Pak Arteria betul sekali bahwa akhir-akhir ini terutama masalah bawang putih khususnya dan beberapa component komoditi lain ada sedikit lonjakan harga dan terjadi fluktuasi harga kebetulan Komandan Satgas Pangan ini Pak Sutiyo Wastisto Kadiv Humas itu diminta oleh Kementerian dan Lembaga dan atas koordinasi kita waktu itu ada semacam kerja sama antara Kapolri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan Ketua KPPU menyepakati untuk membentuk Satgas Pangan dan Ketua nya waktu itu Pak Sutio masih Wakil Kepala Badan Inteligent bukan Negara, Kopolisian Wakabid tapi pindah jadi Kadiv Humas jadi Satgas dibawa pindah kesana.

Waktu itu pemicunya memang bawang putih pak, saya kebetulan Pak Kapolri memang menugaskan saya untuk semacam Dewan Pengawas lah Satgas Pangan ini maka nya saya sering terjun ke lapangan.

Nah ini harga sekarang ni terfluktuasi antara 35, 40 ya pernah saya menandatangani itu harga permanent saya pernah menandatangani di Pasar Induk karena atas kesepakatan Satgas Pangan waktu itu dimana disitu ada Menteri Perdagangan ada Menteri Pertanian ada kita karena modal nya itu betul tadi pak, tadi modal nya sekitar 10 sampai 13 rupiah ya 13 ribu ya, kalau itu sudah diterima dalam negeri udah di gudang itu belinya di China sana, dulu diambil jalan yang tepat sekali dengan memberikan juga menghitung keuntungan dan sebagai nya itu 25 ribu itu pernah saya taikin tanda tangan saya ingat betul di Pasar Induk harga jangan diatas 25 ribu karena kira-kira itulah yang apa nama ke apa, kemampuan publik, kemampuan pasar masyarakat ya, tapi ternyata sekarang terjadi lagi terfluktuasi oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini tentu karena kita punya Satgas mungkin akan lebih progresif ya untuk mengantisipasi ini jadi tolong juga betul tadi Pak Arteria untuk Komisi 3 juga ikut dalam ikut mengawasi Satgas lah ya jadi nah itu kita akan laksanakan itu pak, supaya ini kepentingan rakyat betul-betul terpenuhi ya, jadi tadi disampaikan garam juga diimport kemudian macam-macam ya, sekarang beras di impor, jeruk ya di impor ni langka jeruk ini mau lebaran mau bulan puasa biasa nya kebutuhan jeruk meningkat jadi banyak item pak oleh karena nya saya ulangi lagi bahwa kita akan laksanakan itu Satgas pangan kita akan efektifkan akan kita lebih efektif dan ni Satgas Pangan itu sampai ke Polres pak sampai Polres jadi kita akan itu, kita akan membantu Kementerian Lembaga dalam hal ini Pertanian dan Kementerian Perdagangan ya diluar dari pada tadi yang bapak sebutkan data-data ataupun perbedaan kita akan konsisten dan lurus on the track di Satgas Pangan itu pak.

Kemudian Pak Akbar Faizal ada beberapa hal dia sampaikan Pak Kapolri sudah tadi menyampaikan tentang pembinaan personil ya memang betul terjadi start 300 Kombes ya sudah sekolah Lemhanas dan Sespimti Diklatpim ya, memang sedang kita bikin sekarang Jabatan Fungsional ya, jadi tidak hanya terpaku di jabatan structural ya, jadi ini kita sedang akan tindak lanjuti dan dalam tahun ini juga enggak begitu lama lagi akan selesai ya dan mudah-mudahan ini bisa tertampung pak, yang anjak-anjak tadi ya, memang anjak ini gantian jadi tahun ini yang lulus sekolah jadi anjak terus nanti dapat jabatan yang masuk ya, selalu siklus nya begitu ya, untung ada Asean Games dan chip di mesin nya saya jadi anjak ini saya pakai di Asean Games untuk membantu bagian perbantuan di Asean Games jadi enggak nganggur sekarang anjak ini, tapi mudah-mudahan ini jabatan Fungsional sudah selesai tadi

sudah dielaborasi Kapolri banyak jabatan-jabatan yang lain di BNN, BNPT juga bisa mengisi itu semua dan sudah banyak ditingkatkan sebenarnya, sebenarnya sudah terjadi pengurangan begitu banyak dulu sampai 800 pak ini sekarang tinggal tidak sampai 300 lagi sekarang ini akan selesai saya rasa tidak akan lama lagi selesai.

Tentang kembali kepemimpinan personil betul bahwa memang dalam sebuah pembenahan tidak akan bisa selesai begitu cepat ya, tapi paling tidak untuk recruitment ini sudah ada apa nilai positif atau sudah jalannya sudah positif recruitment memang di pembinaan karir disana sini yang perlu kita benahi kedepan dan mudah-mudahan bisa selesai dalam satu tahun ini ya, sehingga semua pihak bisa terpuaskan memang namanya pembinaan personil sulit sekali untuk memuaskan semua pihak ya, tapi kita harus lakukan, ya Kapolres Pare-Pare kita pasti promosi ini sudah di landscape ya betul ya dia berprestasi dalam beberapa kali penangkapan pak betul ya, udah dicatat memang itu dan tadi saya ingatin lagi Karobinkar ini ada dibelakang supaya masukan di landscape ya memang nangkap 2 kali Narkoba pak dalam tahun ini betul itu ya.

Ya saya rasa itu Pak Arteria ya dengan Pak Akbar ya tidak ada yang keluar Alhamdulillah sudah damai ya, assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.

#### **KAPOLRI :**

Saya tambahkan dikit yang lain pak, tadi ada pertanyaan mengenai ada anggota Polsek di Lampung yang tadi dengan Polwan itu saya sudah tanya kepada Kadiv Propam sudah di proses pak ya, sudah di copot kemudian di tahan ya, copot dan ditahan dan sudah diajukan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat ya kemudian yang tadi masalah helicopter tadi memang tidak ada ditemukan masalah pembayaran uang dan lain-lain motifnya mungkin karena kenal kebetulan dia mau kesana pakai tapi bagi Polri enggak nyaman kalau itu terjadi, jadi seolah-olah bisa dipakai untuk yang lain itu kepentingan dinas dan minyaknya juga itu apa pakai uang Negara jadi sudah dilakukan tindakan oleh pak Kakorpol udara yang bersangkutan di groundit dan dibawa ditarik ke Jakarta dan kemudian diganti dengan yang lainnya sekaligus diberikan sanksi kepada yang bersangkutan untuk pembelajaran bagi anggota-anggota yang lainnya ini saya berikan kesempatan mohon ijin ada 2 lagi 1 kepada Pak Kabid bisa menjelaskan mengenai antisipasi kita untuk mengawasi orang asing baik turis maupun tenaga kerja asing sesuai dengan adanya kebebasan kebijakan bebas visa beberapa Negara memang dilematis disatu sisi memang ada kebijakan kita untuk mengundang investor termasuk membuka kepada turis untuk dalam rangka untuk mendapatkan revenue income yang kedua juga bagi tenaga kerja asing agar mereka juga mudah dalam rangka untuk mendukung investasi nah yang ketiga tapi disisi lain bisa di manfaatkan kebijakan ini oleh pelaku-pelaku kejahatan seperti banyak yang sudah kita tangkap kami silahkan pak.

#### **F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Sebelumnya kita tambah waktu sampai jam 3.30 pak ya.

#### **KETOK PALU 1X**

Silahkan pak, lanjutkan.

#### **KEPALA BADAN INTELIJEN DAN KEAMANAN POLRI (KOMJEN POL. DRS. LUTFI LUBIHANTO):**

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh, terima kasih Bapak Kapolri atas waktu yang diberikan kepada kami, kami menyampaikan informasi terkait dengan fungsi pengawasan terhadap orang asing di institusi Polri yang dalam hal ini diberikan kewenangan secara struktur di Badan Intelijen Keamanan Polri, sejak di terbitkan nya undang-undang imigrasi dan undang-undang 6 tahun 2011 menyangkut masalah imigrasi kami melihat undang-undang ini memang ingin tidak merancukan kewenangan imigrasi dan Polri sehingga ketika itu kewenangan Polri menyangkut masalah pengawasan terhadap orang asing terkait dengan aktifitas orang asing itu dikeluarkan dalam undang-undang ini jadi ini undang-undang nomor 6 2011 tentang keimigrasian yang di tetapkan oleh Peraturan Pemerintah RI nomor 31 2013 terkait dengan peraturan pelaksanaan nya sehingga secara otomatis tidak termaktub didalam nya kewenangan kepolisian untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, kemudian bagaimana tanggung jawab kepolisian dalam hal ini termaktub didalam undang-undang 2 2012 didalam pasal 14 kami mengambil hubungan tanggung jawab dan kewenangan itu pada satu dan huruf L disana disebutkan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas lain dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di Pasal 15 kaitan dengan orang asing pada ayat 2 huruf i disebutkan bahwa kewenangan polisi diantara nya adalah melaksanakan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Jadi kami melihat kewenangan kepolisian didalam menjalankan pengawasan fungsional ini sebagai pengawasan yang terkait dengan tugas-tugas umum kepolisian diantara nya melakukan kegiatan pre-emptif, prefensi dan melakukan penegakan hukum untuk itulah kemudian kami bekerjasama dengan Dirjen imigrasi dan pernah mengundang kegiatan focus group discussion untuk membicarakan masalah kewenangan yang ada ini.

Kemudian dari kegiatan itu disepakati ada pembidangan tugas, pembagian tugas diantara nya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi orang asing itu menjadi kewenangan penuh dari keimigrasian sedangkan hal-hal lain yang terkait dengan orang asing menyangkut masalah kerawanan dari pada keberadaannya termasuk juga akses sosial yang terjadi ketika orang asing itu berada di indonesia termasuk juga ketika orang asing itu melakukan kejahatan atau kriminali itu menjadi kewenangan kepolisian.

Nah untuk itulah maka kegiatan secara fungsional pengawasan orang asing yang pertama kami lakukan bekerjasama dengan imigrasi untuk melakukan pengamatan keberadaannya di Indonesia.

Kemudian yang kedua secara berjenjang dari tingkat pusat Mabes Polri di BIK sampai dengan kewilayahan di Polda, di Polres-polres itu juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan gangguan Kamtibmas maupun kriminalitas dan memang dalam hal ini terdapat kendala didalam pelaksanaan kegiatan dimana keimigrasian pun memiliki keterbatasan didalam pengawasan sampai dengan tingkat yang paling bawah dan kami sendiri organisasi polisi sendiri juga sudah dibatasi oleh undang-undang untuk tidak melakukan pengawasan secara administrasi ini sebagai sebuah gambaran yang kami lakukan sampai tingkat bawah.

Itu kemudian yang kedua kami punya satuan tugas bersama-sama dengan imigrasi baik ditingkat pusat maupun ditingkat paling bawah ditingkat provinsi di daerah kabupaten kota belum kita miliki sampai dengan ditingkat kecamatan tapi tingkat provinsi kami sudah ada satuan tugas yang bergabung bersama imigrasi untuk melakukan pengawasan kepada orang asing, terima kasih waktu kami kembalikan.



**KAPOLRI :**

Iya lanjutkan Pak Kakorlantas tadi ada pertanyaan mengenai masalah tindakan yang pakai GPS atau yang dimobil menggunakan handphone silahkan jelaskan mungkin Pak Kakorlantas.

**KAKORLANTAS:**

Siap terima kasih Pak Kapolri yang terhormat Pak Ketua Komisi 3, para Anggota Komisi 3, *assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh* ijin menjelaskan pertanyaan dari Pak Arteria Dahlan bahwa apakah merokok kemudian menggunakan handphone dan lain-lain apakah itu dilarang memang pernah hal ini dijelaskan dimedia oleh AKBP Budiarto Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya yang viral di media mengatakan bahwa itu tidak boleh dan itu sudah kami luruskan dengan Dirlantas Polda Metro Kadiv Humas kurang lebih 2 minggu yang lalu kedia massa melalui press conference.

Jadi didalam pasal 283 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan undang-undang nomor 22 tahun 2009 dikatakan bahwa *mengemudi kendaraan bermotor salah satu nya adalah harus penuh dengan konsentrasi* nah yang dijelaskan dengan penuh konsentrasi itu jelaskan didalam pasal 106 ayat 1 dipasal penjelasan pasal 106 ayat itu yang nama nya mengganggu konsentrasi itu ada 6 kegiatan saja, pertama dia lelah, mengantuk, sakit, mabuk karena alcohol atau obat-obatan kemudian menggunakan telephone lalu terakhir adalah menonton tv atau video jadi tidak ada kata-kata mendengar radio dilarang terus ada kata-kata merokok itu dilarang semua nya itu adalah kesalahan pemberi informasi dan sudah kami luruskan kurang lebih 2 minggu yang lalu ... terima kasih Pak Kapolri.

**KAPOLRI :**

Iya terakhir pak, Pak Kabareskrim mungkin mau menjelaskan mengenai, kan ada pertanyaan mengenai apa statement Pak Kabareskrim masalah penanganan kasus korupsi yang apa juga memperhatikan tentang pengembalian kerugian negara.

**KABARESKRIM:**

Baik, terima kasih Pak Kapolri, *assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh* yang kami hormati Ketua Komisi 3 bapak/ibu sekalian. Jadi peristiwa itu pada saat kegiatan perjanjian kerja sama di Kementerian Dalam Negeri tindak lanjut dari Mou Bapak kapolri dengan Pak Mendagri, Tks nya antara kami dengan dalam rangka kegiatan sosialisasi Apit.

Terlontar dalam benak pikiran saya dan memang sudah ada arahan juga bahwa ketika kita sedang melaksanakan penyelidikan menerima informasi bahwa kasus tersebut atau peristiwa tersebut sudah diselesaikan dalam artian misalnya ada kegiatan rutin di lembaga pemerintah ini pemeriksaan oleh BPK dan kemudian ada tenggang waktu penyelesaian secara administrasi dan lain sebagainya kekurangan itu kadang mungkin ada persoalan didalam sehingga informasi keluar sampai di polisi dan melaporkan bahwa ada korupsi seperti itu maka hal semacam itu menurut kami lebih baik ya sudah apa lagi kerugian Negara nya juga tidak terlalu banyak maka penyidikan lebih baik kita mencari kasus-kasus lain yang lebih besar kalau sekarang biaya penyidikan itu 280 juta penuntutan berapa kemudian juga sampai peradilan sementara kerugian Negara hanya sedikit kita hanya buang waktu dan buang biaya maka Negara akan rugi, maka hal-hal semacam itu mungkin perlu dipikirkan juga ada sanksi sosial untuk yang seperti ini bukan hanya sekedar pengembalian kalau memang ada kesalahan institusi nya APIP nya memberikan sanksi sosial itu.

Mungkin juga hal-hal lain ya, kami berfikir kalau kita hanya berorientasi kepada memenjarakan orang dengan balas dendam saja penjara nda cukup kemudian fakta nya juga hari ini OTT besok ada OTT lagi bukan OTT nya yang dipermasalahkan tapi perilaku menyimpang itu terus saja terjadi sehingga saya berfikir perlu ada pemikiran lain dalam hal penanganan korupsi ini sehingga sanksinya tu bukan hanya sekedar memenjarakan saja tapi ada sanksi sosial lain itu pak, tapi ini hanya pemikiran saya saja ya kan, mungkin perlu kita pikirkan kedepan untuk bangsa yang seperti ini kalau hanya dendam dan dendam, sakit hati masuk penjara, masuk penjara penuh didalam penjara hanya beberapa saat saja tayang di tv besok nya sudah tertawa-tertawa kita lihat di tv sampai di suka miskin mungkin pagi-pagi sudah kopi minum kopi main kartu, kita nda tahu mungkin nah kalau mungkin ada sanksi sosial harus menjadi pekerja sosial menyapu dan lain sebagainya mungkin anak istri nya begitu kasih rumah kasih uang sama dari suami kasih istri uang dari mana ini, jangan sampai besok kau jadi tukang sapu misalnya kan gitu, daya cegah nya itu mungkin ada, saya rasa itu terima kasih.

#### **KAPOLRI :**

Ya jadi kira-kira begitulah, jadi kalau masih dalam rangka temuan BPK masih ada kesempatan sebetulnya untuk mengembalikan tanpa harus memproses pidana gitu pak, nah jadi .... di beberapa tempat malah seperti di Papua pak, kami pernah jadi Kapolda disana itu pengadilan Tipikor nya Cuma ada di Jayapura sedangkan kalau kita tangkap pelaku nya ada didaerah Mapi sana atau di Bouven Digul ya harus mengangkut saksi SPDP segala macam kerugian 100 juta sementara biaya nya bisa 1 milyar, Negara malah rugi itu pak. Nah jadi ini sebetulnya menurut pendapat kami Pak Kabareskrim menyampaikan bukan artinya semua kasus ya menjadi seperti itu, tadi beberapa kasus tertentu kami kira, kami kira demikian pak, memang ada beberapa pertanyaan lain kami terima kasih Pak Adies nanti untuk masalah kunjungan ke PTIAK, Sespim, SPN, Pusdik-Pusdik ini bisa kita atur pak, kami terima kasih sekali karena kalau nanti didatangi Anggota DPR otomatis nanti anggaran dibantu, hehheh. Termasuk tadi Pusdik Brimob wah ini sebetulnya kami lagi berfikir keras gimana cara nya ini untuk karena ... ini pusdik ini adalah pusdik kebanggaan sebetul nya untuk Polri tempat nya Brimob disana itu adalah tempat latihannya conon tempat pasukan nya Gajah Mada disana karena memang situs-situs .... Majapahit semua disitu ya di Watu Kosek Porong ini, tapi memang sekarang sudah mengawatirkan, kita berusaha dari APBN ditambah juga coba cari dari CSAR tapi kalau udah bisa Pak Adies mau datang kesana bapak-bapak mau datang kesana juga yang peduli Alhamdulillah sekali pak, terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.

#### **F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

*Walaikum salam warahmatulahi wabarakatuh*, bapak/ibu saudara-saudara sekalian barangkali gayung bersambut kita sudah menyampaikan aspirasi Pak Kapolri sudah menjawab barangkali kita coba tanyakan kesimpulan nya pak.

#### **F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Pak Ketua, intrupsi pak ketua.

#### **F-HANURA ( H. SARIFFUDIN SUDDING, SH., MH.):**

Sedikit Ketua, Ketua Ketua.

#### **F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Tadi.

**F-HANURA ( H. SARIFFUDIN SUDDING, SH., MH.):**

Saya cuman ini aja menanggapi sedikit.

**F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Kiri dulu.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Yang itu dulu, yang itu dulu.

**F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Kiri dulu Ketua.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Ladies frist.

**F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Kiri dululah. Pak Ketua tadi kesepakatan nya setelah putaran pertama ada putaran kedua sebelum kita masuk ke draft kesimpulan jadi kita taat aja dengan azas, kalau soal jadwal tatib DPR ini mengatur rapat selesai itu pukul 22 malam jadi masih ada, ini urusan Dapil ini masih banyak nah jadi saya minta kita taat saja dengan apa yang kita sepakati putaran kedua kalau memang diputaran kedua hanya 3 orang ya 3 orang itu aja, demikian Ketua makasih, Demokrat mau ngomong Ketua, daftar.

**F-PD ( IR. MULYADI.) :**

Intrupsi Ketua jadi .....

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Sudah itu Pak Sudding dulu.

**F-PD ( IR. MULYADI.) :**

Silahkan.

**F-HANURA ( H. SARIFFUDIN SUDDING, SH., MH.):**

Iya, pandangan Pak Kabareskrim tadi saya kira ini pandangan yang progresif menurut saya dan saya memberikan dukungan penuh dalam kaitan masalah pengembalian keuangan Negara.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Pak Sudding, Pak Sudding ini masalah bukan masalah menanggapi itu, ini masalah berkelanjutan.

**F-HANURA ( H. SARIFFUDIN SUDDING, SH., MH.):**

Nda saya kira ini, saya kira ini penting supaya ini ada satu pemahaman yang sama dalam konteks penanganan.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Paham, paham kita pak, jadi kita.

**F-HANURA ( H. SARIFFUDIN SUDDING, SH., MH.):**

Baik makasih.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Saling menghormati ini, ini belum masuk kesitu.

**F-PD ( IR. MULYADI.):**

Pak Ketua, enggak saya begini Pak Ketua, sayakan mau meningkatkan pak, sebetulnya tata tertib sudah mengatur dengan baik pak di undang-undang MD3 maupun di Tatib disana diatur juru bicara Fraksi 5 menit juru bicara perorangan 3 menit, dipersoalnya kan 1 orang memakan waktu yang panjang jangan sampai menghilangkan hak yang orang lain pak, ini Tatib kita sudah mengatur didalam Tatib dijamin didalam Raker itu setiap Anggota dijamin hak nya untuk menyampaikan tadi disampaikan sampai jam 10 pun enggak ada masalah pak, demi rakyat kita siap rapat sampai jam berapa saja, apa lagi kepentingan daerah pemilihan yang diwakili oleh ratusan ribu rakyat yang mewakili kita pak, jadi bukan 1, 2 orang pak, jadi mhon kiranya setelah ini diputar mari masing-masing menyampaikan mungkin waktu nya yang ketua batasi supaya enggak terlalu panjang terima kasih.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Jadi saya tawarkan saja, ada beberapa usul untuk lanjut dengan putaran pembicaraan orang perorang, nah inikan kita apa kita setuju atau tidak.

**RAPAT :**

Setuju.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Setuju.

**KETOK PALU 1 X**

Sampai jam berapa atau tidak ada batas, nda ada batas.

**F-PD ( IR. MULYADI.):**

Maksimal jam 10 sesuai Tatib.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Tatib jam 10 malam pak dan kalau kurang besok pagi juga bisa.

**F-PKS ( ABOE BAKAR AL-HABSY, SE.):**

Ketua kalau soal waktu enggak ada masalah cuman saya lihat tinggal tema nya kalau tema nya putaran nya enggak ada hal yang baru buat apa panjang-panjang, kalau tema nya memang banyak yang baru kita juga enggak membatasi, jadi dibuka begitu aja sekarang lihat tema nya kalau memang ada yang baru silahkan, kalau muter-muter lagi ya ketok aja, kita istirahat aja, sudah selesai bahan ini.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Pak, saya tadi sudah tawarkan jadi sekarang tiap-tiap anggota mau menyampaikan, kalau itu kesepakatan oke, sekarang masalah waktu nya.

**ANGGOTA .... :**

Sampai jam 4 Pak Ketua usul.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Apa 5 menit, apa 10 menit.

**ANGGOTA ..... :**

Jam 4.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Apa setengah jam satu orang.

**ANGGOTA ..... :**

Jam 4.

**ANGGOTA .... :**

..... (suara tidak jelas)

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Berapa lama satu orang.

**ANGGOTA .... :**

5 menit.

**ANGGOTA ..... :**

2 menit lah.

**ANGGOTA ..... :**

5 menit aja.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

5 menit, itu ada jam disitu pak ya, lihat sendiri.

**ANGGOTA ..... :**

Jam 4 selesai pak.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Ya jangan biasa nya sudah nanti jadi ceramah.

**KAPOLRI :**

Mohon ijin.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Saya mulai dari Ibu.

**KAPOLRI :**

Mohon ijin Pak Ketua.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Silahkan.

**KAPOLRI :**

Mohon ijin Pak Ketua, sekedar usul iya, jadi kalau memang akan diputar kedua juga tidak masalah tapi tadi kami mohon konsisten waktu nya kami sebetulnya kita sudah sering kita melakukan Raker ini kita bisa menangkap sebetulnya mau yang dimaksud apa gitu, tapi tolong kalau bisa **strep** to do point sehingga kita paham ini jawab apa, ini jawab apa ya dengan demikian kita tidak mengulur waktu terlalu lama, saya yakin bapak-bapak dan ibu juga banyak kesibukan makasih.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Kita setuju sekali pak, itu cuman biasa nya disini itu kawan mau pidato itu jadi.

**RAPAT :**

Tertawa.

**ANGGOTA ..... :**

Akur Ketua.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Kalau yang dibicarakan sebetulnya kan ini ada tertulis sudah dijawab nah saya paham karena sudah sekian belas tahun sudah jadi Anggota DPR ini, banyak yang mau masih pidato, jadi 5 menit 1 orang.

**ANGGOTA ..... :**

..... (suara tidak jelas)

**ANGGOTA ..... :**

3 menit.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

3 menit a, a itu jam ada disitu nda usah saya peringatkan, mulai dari Ibu yang tercantik.

**F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH. ):**

Nah gitu ketua udah benar itu.

Pak Kapolri yang saya hormati beserta jajaran bapak-bapak, ibu-ibu Anggota Komisi 3.

**ANGGOTA ..... :**

Ibu pakai klok klok ....

**F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH. ):**

Jangan pakai klok klok dong, ada 2 Pak Kapolri yang ingin saya sampaikan, pertama-tama ucapan terima kasih karena di Dapil saya di Kalimantan Barat Pak Kapolri sudah menempatkan seorang perempuan sebagai Wakapolda.

Yang kedua Pak Kapolri, saya sudah 3 tahun lebih jadi Anggota DPR RI nda pindah-pindah Komisi, Komisi 3, semua Kapolri ini saya lihat selalu bawa bapak-bapak semua disini ni, 3 tahun ini pak, apa enggak ada Polwan yang punya kualitas yang bisa bapak bisa bawa kesini. Ini seperti nya sederhana Pak Kapolri tetapi saya ingin menyoroti secara serius pola SDM di institusi bapak, arti nya ada perlakuan atau kondisi yang harus di perbaiki di institusi bapak karena selama 3 tahun ini saya tidak melihat ada peningkatan pak dari pertama saya jadi Anggota DPR sampai tahun hampir tahun ke empat ini tidak ada satupun pejabat utama Polri yang saya lihat Polwan yang bapak hadirkan disini, bukan hanya era bapak ya, di era-era yang sebelum nya juga, nah saya minta ini jadi perhatian.

Pak Ketua ini belum 5 menit ya Pak Ketua 2 hal itu saja, sama Pak Ketua mohon ijin karena waktu saya masih ada Pak Sekjen saya Pak Hinca Pandjaitan akan menyambung terima kasih.

**F-PD ( DR. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII ):**

Ijin ketua.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

3 menit.

**F-PD ( DR. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII ):**

Iya terima kasih, saya langsung saja menambahkan Pak Kapolri, menurut data BNN Sumatera Utara 3 terbesar Narkoba itu adalah kota Medan, Tanjung Balai dan Batubara dari 33 Kabupaten Kota di Sumatera Utara, Tanjung Balai dan Batubara ini kampung saya ini Pak Kapolri. Batubara adalah Polres termuda di Sumatera Utara yang kantor nya masih Polsek di 50 belum naik, kemudian Batubara itu punya bentang wilayah pesisir nya itu 87 kilo meter sampai membentang ke Tanjung Balai dan Asahan dari temuan kita disana ternyata pelabuhan tikus terbesar pemasukan Narkoba itu dari Batubara pak, dari Batubara kemudian Polres kita disitu punya sekarang itu 7 kecamatan di ubah nanti menjadi 12 kecamatan dari 7 menjadi 12 itu hanya ada 4 Kapolsek nya dan dari 4 Polsek itu tidak ada yang ke air tidak ada yang tadi ke laut tadi itu sehingga tidak punya Polisi air juga disitu, ..... point saya adalah saya mohon perhatian kita untuk masuk diwilayah Batubara, Tanjung Balai dan Asahan 3 triangle itu yang langsung berbatasan dengan ke selat malaka, menurut catatan Kapolres Batubara data nya besar sekali masuk dari situ yang dipasok ke Siantar dan Simalungun begitu pak, dan ternyata bukti nya adalah di LP Labuan Ruku itu lebih over capacity 300%, 80% nya itu adalah Narkoba juga tahanan Narkoba oleh karena itu saran saya atau permintaan saya, kalau ada waktu Pak Kapolri barang kali lewat Ketua, Pimpinan bisa kita agendakan kita sisir saja itu pantai timur sama dengan ketika di Kepri kita kemarin berhasil selamat tapi menurut saya disana banyak sekali yang disebut pelabuhan tikus, pada saat saya kesana Kasat anu Narkoba nya juga sedang berada di laut waktu itu hanya kira-kira seminggu setelah penangkapan di Kepri, nah point saya adalah kita beri catatan pada Pantai Timur Batubara sampai Tanjung Balai dan Asahan disekitar situ, seandainya kita bisa kunjungan kerja langsung kelapangan itu barangkali Pak Ketua akan sangat baik untuk mencegah masuk nya Narkoba lewat pelabuhan-pelabuhan tikus tadi, itu saja terima kasih.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Terima kasih, Pak Mul setelah itu Pak Tobing.

**F-PD ( IR. MULYADI. ):**

Terima kasih karena waktu nya terbatas, langsung saja Pak Kapolri.

*Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh*, sesuai dengan Tatib saya harus menyebutkan nama dan daerah pemilihan pak, nama saya Mulyadi dari daerah pemilihan Sumatera Barat 2.

Dari laporan ini kami memberi apresiasi Pak Kapolri cukup rinci apa yang dilaporkan dan bahkan di 2017 disampaikan ada penyelamatan uang Negara 1,887 triliun dan kita harap kedepan tentu akan ditingkatkan lagi pak penyelamatan uang Negara.

Poin yang ingin saya sampaikan adalah selain memang tujuan nya untuk memberikan sanksi hukum penjara factor untuk menyelamatkan uang Negara untuk kasus-kasus besar ini juga harus menjadikan menjadi perhatian khusus pak, oleh karena itu disini ada laporan yang juga disampaikan oleh Pak Kapolri terkait dengan masalah Kondensat dimana ada kerugian Negara 39 triliun ini mohon kiranya juga menjadi perhatian khusus dan sudah sampai dimana perkembangannya walaupun ada pelakunya



yang DPO, saya dulu sebelum nya sebelum di Komisi 3 di Komisi 7 Pak Kapolri 3 tahun lebih di Pimpinan Komisi 7 banyak sekali persoalan ESDM ini sebetulnya kunci nya di Polisi pak, kami di Komisi 7 waktu itu banyak menemukan hal-hal yang sebetulnya terkait dengan kerugian Negara yang jumlah nya triliunan tapi yang nama nya Kementerian ESDM dan lain sebagainya tidak bisa juga menuntaskan dan berbuat apa-apa tanpa ketegasan dari Polri pak, sector ESDM ini sangat luar biasa pak, bahkan juga yang sehari-hari misalnya tambanglah, tambang bahkan tambang pkp2b juga yang skala nya besar yang sudah misalnya sudah ditutup masih ditambang itu bahkan perhari bisa menghasilkan milyaran yang uang nya itu enggak jelas pak Negara enggak dapat apa-apa, mohon maaf pak disana banyak juga aparat yang terlibat oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan mohon kiranya pengarahannya dari Pak Kapolri terkait dengan hal tersebut betul-betul menjadi perhatian khusus, insyaallah karena saya dulu dari Komisi 7 pak ada beberapa data yang akan bisa saya sampaikan ke bapak, karena ini Negara tidak mendapatkan apa-apa dari pertambangan ini pak, yang dapat uang sampai ratusan milyar perbulan itu hanya oknum pak, enggak tahu

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Waktu Pak Mul.

**F-PD ( IR. MULYADI. ):**

Oknum ini, jadi oleh karena itu ini bagian dari laporan yang disampaikan oleh Pak Kapolri saya rasa nanti karena waktu nya terbatas ini dari Pak Ketua ni ya mungkin setelah rapat atau pada kesempatan tertentu saya akan menyampaikan lebih detail lagi kepada Pak Kapolri pak, karena ini menyangkut uang Negara pak, karena Pak Ketua sudah 3 menit ya.

**ANGGOTA .... :**

Sudah, sudah.

**F-PD ( IR. MULYADI. ):**

Oh sudah lebih ya oke, kalau begitu saya akhiri saja terima kasih *wassalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh*.

**F-PPP ( H. ARSUL SANI, SH., M.SI.):**

Ketua sisi sini Ketua.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Sebentar Pak Tobing tadi.

**F-PDIP ( ERWIN TPL TOBING ):**

Baik terima kasih Pak Ketua, yang sangat kami hormati kami banggakan Bapak Kapolri saya Erwin Tobing tadi nya di Komisi 6 pindah Komisi 3 Dapil Kalbar dari Fraksi PDI Perjuangan.

Saya selaku Purnawirawan terus terang ingin memberikan apresiasi kepada Kapolri bahwa Kapolri sekarang Mabes Polri sekarang Kepolisian sekarang sangat dibanggakan oleh masyarakat kelihatan aktifitas kesatuan ini sangat baik terakhir ada hoaks terus pertemuan dengan ulama arti nya

Kapolri Pak Kapolri tahu apa yang sedang terjadi dan begitu cepat mengambil langkah-langkah ..... terakhir adalah penangkapan kapal Malaysia yang bernama equanimity di selat Benoa kalau kita dengar sampai pejabat Malaysia memberikan acungan jempol kepada kepolisian karena kepolisian Malaysia tidak mampu menangkap.

Saya terus terang di Komisi 3 bagaimanapun akan tetap memperjuangkan kemajuan Polri disini ingin saya sampaikan beberapa masalah tadi saya tidak mau tanya Pak Kapolri tapi ada sms masuk selaku saya mantan Direktur Akademi, pada tahun 2006 sebentar ini pak agak sedikit, 2006 itu ada kebijakan Kapolri penerimaan sumber sarjana untuk Akpol saya waktu itu panitia saya tanyakan juga ke Kapolri apa alasannya ternyata dibidang itu waktu jaman Pak Tanto di perlukan polisi-polisi yang sudah sarjana cekatan akhirnya kita terima ada yang dokter umum masuk dokter gigi Farmasi saya tanya kenapa mau masuk dokter gigi masuk ke Akpol dia bilang pak cita-cita saya sebenarnya Polisi orang tua saya suruh saya dokter sama ambil dokter dia masuk Akpol dia lulus ada satu lagi yang Gregorius saya ingat betul dia masuk dokter umum tapi ditengah latihan dia mundur karena tidak mampu begitu mereka tamat jadilah sarjana PTIK eh sarjana polisi tamatan Akpol dan SIK dia dokter dia farmasi sekarang dia Kasat Serse, Kasat Lantas tidak pernah pegang obat tidak pernah nyuntik di Kasat Serse, Kasat Lantas dia bangga tamatan Akpol dengan SIK

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Sudah habis pak.

**F-PDIP ( ERWIN TPL TOBING ):**

Tapi ternyata sekarang dia di mutasi menjadi dokter di Dokes dia menjadi ahli ditarik ke Dokes jadi farmasi sekarang mereka menanyakan pak kami enggak pernah pegang obat sejak tamat, tidak pernah pegang spit alat suntik sekarang saya dari Kasat Serse, Kasat Lantas, Kasat Narkoba kok jadi dipindahkan ke Dokes ini ni mungkin keluhan yang saya terima Pak Kapolri ini keluhan yang saya terima karena saya bekas Direktur Akademi yang perlu saya sampaikan kepada Pak Kapolri kira-kira ini bagaimana tanggapan nya kasian adik-adik itukan suatu kebanggaan nya dia SIK dan tamatan Akpol terima kasih Pak Kapolri setelah dibatasi saya kembalikan kepada Ketua.

**F-PPP ( H. ARSUL SANI, SH., M.SI.):**

Terima kasih.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Silahkan, yang batasi waktu tadi kesepakatan.

**F-PPP ( H. ARSUL SANI, SH., M.SI.):**

Terima kasih ketua.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

3 menit.

**F-PPP ( H. ARSUL SANI, SH., M.SI.):**

Insyallah enggak lebih dari 3 menit, Pak Kapolri saya tidak mengajukan pertanyaan baru saya hanya menyampaikan aspirasi dari Fraksi Balkon Pak Kapolri ya tadi katanya ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Arteria tapi belum dijawab padahal Fraksi Balkon itu yang ingin di tulis sebagai berita kata nya Pak Kapolri yaitu pertanyaan tentang perkembangan penyidikan kasus Novel Baswedan ya, posisi saya sendiri adalah saya orang yang tidak setuju di bentuk TGPF ya karena ini seolah-olah kemudian kalau ada kasus dikit-dikit penyidikan nya lama dibentuk TGPF atau tim independent atau apapun nah tetapi di sisi yang lain memang diperlukan juga transparansi keterbukaan dan keberlanjutan informasi kepada publik tentang perkembangan penyidikan kami kira itu saja tertib taat azas saya ketua terima kasih.

**F-PKS ( H. ABOE BAKAR AL-HABSY, SE.):**

Ya ketua.

**F-GERINDRA ( DRS. WENNY WAROUW ):**

Ijin ketua.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

ya ketua habib.

**F-PKS ( H. ABOE BAKAR AL-HABSY, SE.):**

*Assallamu'alaikum warahmatulahi wabrakatuh.* Terima kasih Pak Ketua lama tidak berjumpa rasa nya perjumpaan ini jadi haus untuk banyak bertanya, banyak kasus yang sudah terlewat begitu saja tetapi insyaallah masih on progress, sarapan pagi bersama istri lebih lengkap sambil membaca Koran penyerangan ustad menjadi misteri umat menunggu Pak Tito memberi penjelasan.

Jadi yang terakhir itu ada seorang ibu gila tuh masih bisa nusuk itu pak, jadi saya pikir ini cuman konkrit ajalah ada nggak orang gila bersama-sama membunuh dalam waktu yang berbarengan kalau bukan by design, pertanyaan nya design siapakah itu, siapakah yang bekerja bagaimana cara Polri memberikan keamanan dan mengayomi kepada warga nya yang disebut ustad dan ulama maupun juga para pendeta yang ada di Gereja dan sebagainya, saya pikir ini konkrit pemberian keamanan kepada masyarakat.

Yang kedua thanks bener Wakapolri, kalimat muslim yang dikatakan jangan sebut muslim MCA itu, itu the best untuk menyelamatkan wajah Polri ke umat, itu saya pikir perlu diulang seperti itu dan perjalanan Pak Tito ini menarik kadang-kadang .... kalau ada salah-salah sedikit perbaikan jadi lebih baik pak, jadi boleh salah sekali tapi perbaikan 10 kali gitu, jadi datang nya bapak ke tokoh-tokoh ulama ini adalah inilah cara yang baik cara Polri untuk mendekati umat bukan hanya umat muslim siapa saja silahkan tetapi karena ini mayoritas wajar kalau datang, sementara masyarakat sedang ama si Abdul Somad eh dia datang ke Abdul Somad cocok udah, Wakapolri nya ke Abdul Somad, Kapolri ke Somad .... cuman Pak Jokowi aja yang belum ke Abdul Somad belum dapat waktu ya moga-moga hal-hal yang sebegini ni bisa lebih baik.

Saya pikir cocok pak ya Polri ini sekarang ditengah Pilkada, Pileg Pilpres emang jadi kaya malaikat semua sekarang orang pak, jadi .....

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Ketua 1 menit lagi.

**F-PKS ( H. ABOE BAKAR AL-HABSY, SE.):**

Lain kali nanti kita yang kita ingatkan Pak Ketua jangan selalu sering mengingatkan waktu ya, jadi saya mengingatkan pendekatan seperti itu baik sekali.

Masalah disiplin pak, kasus yang kecil sedikit aja di Bajarmasin di Dapil saya sebenarnya saya tidak perlu mengungkap di publik ini tapi bolehlah sekali-sekali kita cerita karena seorang Bripta bisa mengeluarkan orang dari apa istilah nya dari sel ya dan itu viral gitu nah saya pikir kok bisa seperti kejadian itu di Dapil saya di Kalimantan Selatan saya pikir ini perlu mendapat perhatian Propam ya, perhatian yang besar karena itu viral sekali membuat malu lembaga Polri lah kalau ini bisa terjadi, kok bisa terjadi maksud saya.

Yang terakhir adalah bagus nya bapak jelaskan saja karena publik jelek kalau enggak dijelaskan dengan istilah siono jilid 2, kasus si apa si Muhammad Jefri ternyata katanya diterima diangkat pulang tau-tau meninggal saya pikir ini perlu penjelasan saja sehingga publik tahu bahwa itu ternyata dia sakit atau apa dan apa dan apa itu sebagainya.

Terakhir Pak Ketua, musuh kita Narkoba titik bikin hukum jangan yang ringan untuk Narkoba tembak dor gitu ini sekarang bayangkan 250 ribu ton mau datang Pak Tito dengan gagah nya rombongan dengan Kapo eh dengan Panglima dengan apa ke Natuna kita bangga bersama 1,6 Ton pada waktu yang sama eh ketangkap lagi itu di tetangga sebelah berapa ton lagi nah ini ada apa, siapa pemain nya di Indonesia yang kuat tentang Narkoba ini. 250 ribu ton itu bukan main-main ini nama nya proksi perang ini, perang tanpa senjata, goyang-goyang sedikit hancur masyarakat kita, saya enggak terbayang Indonesia yang kedepan, *assallamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh*.

**F-GERINDRA ( DRS. WENNY WAROUW ):**

Ijin ketua.

**ANGGOTA ..... :**

Ketua.

**F-GERINDRA ( DRS. WENNY WAROUW ):**

Terima kasih.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

3 menit ya

**F-GERINDRA ( DRS. WENNY WAROUW ):**

Lebih ya, terakhir ... pak ya. Oke terima kasih pak singkat, strike to the point aja Bapak Kapolri dan staf.

Yang pertama tentang yang sudah dibicarakan masalah penyerangan tokoh agama masalah Cyber Army tadi kemudian buntut-buntut masalah hoaks tapi bukan itu yang saya ingin sampaikan terutama pada Dirintel atau Bakintel, jangan sampai isu ini berdampak sara pak, saya ulangi jangan sampai berdampak sara, saya kira Pak Kapolri sudah bisa menjabarkan ini pak, isu ini sederhana tapi gejala di masyarakat tolong untuk sampai, inikan di shooting sampai Kapolres pun saya kira ada TV ini pak, jadi tinggal mengulangi saja, jangan sampai berdampak sara.

Yang kedua surprise tentang masalah Narkoba pak ya Danko apa Dankor ya Polair atau udara ada, tapi logistic ada Asrena pak, tolong pak peralatan nya pak, kasian kalau ngejar pakai pinjam kapalkan,

**ANGGOTA .... :**

Hahaha.

**F-GERINDRA ( DRS. WENNY WAROUW ):**

Kok ketawa, itu harus kita lihat disini ketua kita ini mantan Banggar pak, iya kan perubahan ini beli kapal yang canggih dong pak, apa guna nya kita Komisi 3 pak, gitu lho, tepuk tangan tuk wartawan juga boleh dong, jangan di kurang-kurangi lagi gitu lho.

Yang terakhir pak ini, out of the box tapi sangat penting pak.

**ANGGOTA ..... :**

Apa tuh.

**F-GERINDRA ( DRS. WENNY WAROUW ):**

Apa itu dengerin dong. Desember yang lalu kita dengar Presiden ini masalah Jokowi, sebenarnya saya Gerindra ya oposisi tapi kalau sudah kepentingan rakyat pak, kami didepan pak, geluh tentang perijinan, kemudian tanggal 12 Februari juga nah yang terakhir kemarin saya dia akan porak porandakan obrak abrik masalah perijinan kalau masih lambat, pesan apa yang saya mau sampaikan pak, kalau tidak ada polisi didalam pak mau panjang lidah Jokowi enggak bakal selesai ini, saya yakin itu pak, sarankan ke Presiden libatkan Polisi dan Jaksa pak, apapun rapat di Ibu kota kalau sudah sampai ke kalau tidak salah Bolaang Mongondow Bupati nya obrak abrik malah bongkarin itu masalah gedung yang sudah jadi pak, saya mohon pak ini komisi 3 dukung ini pak. Ini sangat penting supaya investor kita jadi high coast ekonomi enggak masalah ijin pak.

**ANGGOTA .....:**

Dukung Jokowi maksudnya.

**F-GERINDRA ( DRS. WENNY WAROUW ):**

Oh bukan, ini dukung rakyat pak.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Waktu habis Pak Warouw.

**F-GERINDRA ( DRS. WENNY WAROUW ):**

Oke saya kira sudah nangkap makna nya terima kasih pak.

**F-PDIP ( MASINTON PASARIBU, SH.):**

Ketua.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Masih ada.

**F-PDIP ( MASINTON PASARIBU, SH.):**

Iya.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Silahkan.

**F-PDIP ( MASINTON PASARIBU, SH.):**

Iya terima kasih ketua, yang terhormat Pak Kapolri, Wakalpori beserta jajaran Mabes Polri saya apresiasi tindakan kepolisian tegas terhadap penyebar hoaks termasuk juga yang hoaks itu juga ada yang mereproduksi juga dan yang membuat nya atas nama orang-orang yang kata nya pro pemerintah dan yang anti pemerintah terhadap 2 kelompok ini kalau dua-dua nya menebar hoaks ditindak tegas pak, saya partai pendukung pemerintah tidak menginginkan ada nya hoaks itu.

Nah kemudian berkait dengan saya mau ingin menanyakan perkembangan laporan Dirdik KPK Kapolda Metro Jaya bulan September 2017 lalu pak gimana perkembangan nya karena itu Dirdik melaporkan penyidik nya nah ini kami perlu tahu perkembangan pelaporan nya kemudian yang juga perlu saya tanyakan pak status penyidik Polri di KPK itu ada yang sudah diangkat menjadi pegawai tetap KPK namun belum diberhentikan dan belum mendapat persetujuan tertulis dari Pak Kapolri sendiri.

Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan hibah barang pak, yang dari KPK kepada Kepolisian karena saya baca-baca peraturan Menteri Keuangan itu mengatur hibah peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK 06 tahun 2017 itu mengatur hibah itu tentang hibah barang milik Negara dilakukan untuk satu, kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan. Dua penyelenggaraan pemerintahan daerah nah disitu pak, nah kalau yang berkaitan dengan barang rampasan ya, barang rampasan Negara yang diperlukan untuk kepentingan Negara dapat ditetapkan status penggunaan nya oleh Menteri dalam hal ini Menteri Keuangan atas usul Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi nah hibah dari KPK ke Bareskrim ini apakah sudah memenuhi ketentuan peraturan Menteri Keuangan ini pak, agar juga kita tidak salah dalam memanfaatkan barang milik Negara apalagi barang rampasan Negara itu pak, karena institusi penegak hukum kan harus juga memberikan contoh keteladanan dalam aturan hukum itu sendiri, itu Pak Ketua yang saya tanyakan kepada Pak Kapolri dan Mabes Polri singkat dan padat, demikian Ketua terima kasih.

## **F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Terima kasih, habis ya, a kalau habis silahkan Pak Kapolri tentu kalau masih ada yang perlu di jelaskan terima kasih.

### **KAPOLRI :**

Baik yang pertama untuk Ibu Erma jadi betul untuk Kalbar Dapil nya Ibu Wakapolda nya sudah Polwan ya bu ya, sekaligus untuk apa emansipasi gender ya Wakapolda pak, Wakapolda nya cuman belum serah terima mungkin sebentar lagi.

Ajak Polwan di Raker sebetul nya kita mau ngajak Kasitum, cuman Kasitum nya enggak datang ini kaya ni, Kasitum nya Polwan kebetulan, oh lagi Umroh bu kalau enggak nanti sudah ada satu disini tapi memang salah satu memang kebijakan kita adalah berusaha untuk mengangkat Polwan kemarin Kasatukpa itu Polwan, Wakapolda Sumbar juga Polwan, Kapolres sudah banyak yang Polwan Kapolres, yang baru lagi ada lagi Polwan lagi ini kemarin TR kemarin cukup banyak, yang bintang juga Polwan lumayan sudah beberapa orang ini baru Wakapolda mudah-mudahan nanti ada Kapolda gitu, mudah-mudahan nanti Kapolri ganti nya ke Polwan bu, doain gitu bu bu ini Bu Erma ya bu ya.

Kemudian untuk Pak Hinca, jadi kami sependapat pak kalau untuk itu untuk masalah Medan, Tanjung Balai, Batubara, Asahan ini maka nya kemarin kita Tanjung Balai ini kita cari Kapolres yang keras ni pak, yang keras dia berani untuk bertindak kesitu, termasuk itu dari Kapolres yang di Aceh Utara itukan keras tu siapa nama nya, nama nya Untung iya kita pindahkan jadi Wadirpolair Sumatera Utara karena memang problem nya kita lihat itu perairan ini Narkotik kita informasi nya banyak masuk melalui jalur ini betul, jalur Tanjung Balai, Batubara, Asahan ini pelabuhan tikus ini AKBP Untung Wadirpolair ini juga nanti kita perintah untuk membentuk tim khusus untuk bergerak untuk ngantemin ini pak, jaringan-jaringan ini nantinya promosi yang bersangkutan tapi kalau nanti Pak Hinca berkenan untuk apa kunjungan kerja kesana nanti bisa pak, pak kabareskrim bisa mendampingi bapak, mungkin nanti pak dengan direktur Narkoba, Kakorpolair siap kita kesana, kita harus perbaiki memang disitu untuk kita perkuat jalur tikus yang masuk pelabuhan tikus disana.

Kemudian yang ketiga Pak Mulyadi tadi mengenai masalah kondensat tadi problem nya adalah sekali lagi masalah tersangka utama nya Honggo ini, ini belum kita temukan kita duga ada di seberang di Negara tetangga, kita sudah melakukan kordinasi tapi kordinasi yang secara detail tentu kami nda bisa sampaikan secara terbuka ditempat ini untuk bagaimana untuk memulangkan yang bersangkutan, sehingga kasus nya bisa dituntaskan gitu.

Kemudian untuk masalah ESDM saya sependapat ini banyak problema juga disana dan angka nya mungkin besar itu mungkin Pak Kabareskrim nanti akan menghubungi bapak pak, Pak Mulyadi ya pak ya, untuk mendapatkan informasi supaya kami bisa masuk nya, masuk nya ke jalur ini informasi nya untuk dapat melakukan langkah-langkah penindakan ini pak, tolong kami dibantu ni pak ....

Kemudian tadi masalah dari Pak Tobing tadi menyampaikan apresiasi masalah kapal equinimity ini pak, kita mendapatkan permintaan bantuan dari FBI untuk melakukan penyitaan kapal itu yang menurut mereka ada TPPU nya kita hanya membantu, kita hanya membantu FBI karena hubungan kerja sama selama ini cukup baik, kita pernah dibantu dulu nangkap Zarima dulu di sama di Amerika kemudian juga menangkap kasus apa nama nya itu korupsi misalnya David Nusa Jaya juga dibantu oleh FBI sehingga kita resip lokal berusaha membantu mereka tetapi masalah apakah kapal ini terkait dengan

Malaysia masalah apa MDB lain-lain itulah kewenangan dari pada FBI bukan kewenagn dari Kepolisian kita Polri hanya membantu karena ada permintaan bantuan dan kita menggunakan prinsip police ti police asissten gitu itulah yang kita lakukan jadi sekali lagi kita tidak paham apakah ini kaitannya dengan kasus yang ada di Malaysia sampai hari kita tidak sampai sejauh itu bukan kewenangan dari pada Polri.

Kemudian untuk masalah yang Akpol dokter-dokter yang dari sarjana tadi masuk ke Akpol iya pak, masuk ke Dokes dari Akpol ada yang kembali ke Dokes dan lain-lain ini memang ada kita kekurangan sumber daya ini problem nya ini, kekurangan sumber daya dibidang yang keahlian itu, tapi masukan dari bapak saya pikir nanti kita akan diskusikan lagi pak dengan SDM bagaimana mereka yang sudah terlanjur masuk Akpol arti nya 2 punya kemampuan, kemampuan kedokteran iya kemampuan keilmuan kepolisian juga iya, ini oleh karena itu sekali lagi kami belum memberi jawaban sekarang kami minta waktu untuk melakukan apa kordinasi internal apakah ini karir kedepan yang bersangkutan kembali kepada profesi nya yang dokter nya itu misalnya atau dia dikembalikan ke diperbolehkan juga masuk ke karir leader ship karena dia adalah lulusan Akpol gitu pak, nanti kita akan kasih kabar ke bapak.

#### **F-PDIP ( ERWIN TPL TOBING ):**

Ijin pak sebagai tambahan itu satu angkatan nya lebih kurang, mohon ijin Pak Ketua lebih kurang 60 orang di pindahkan mereka dulu tamatan Akpol semua artinya tamat dari dokter mereka 2005 tidak sempat praktek masuk Akpol setelah Kasat Serse, Kasat Lantas mereka dipindahkan di Dokes jangan sampai mereka nyuntik karena mereka bilang pak kami tidak pernah nyuntik, tidak pernah praktek begitu juga Farmasi itu aja sekedar masukan Pak Kapolri terima kasih.

#### **KAPOLRI :**

Iya ini justru jadi masukan bagi kita karena ini memang dilematis saat itu diambil dari sarjana dari berbagai bidang ke ilmuan masuk ke Akpol dengan harapan mereka menjadi matang kemudian kalau dari sarjana keilmuan mereka juga akan bagus begitu juga dipoles di Akpol makin jadi gitu, ada yang bagus berprestasi ada juga yang biasa-biasa saja bahkan yang apa nama nya itu mungkin usia nya mereka malah lebih tua dibanding yang lulusan Akpol yang diambil dari SMA tapi ini masukan ini sekali lagi kita akan kaji pak.

Kemudian untuk kasus nya pertanyaan Novel Baswedan perkembangan ni Pak Kapolda Metro yang menangani, Pak Kapolda masih ada ya, silahkan Pak Kapolda jelaskan.

#### **KAPOLDA METRO JAYA:**

*Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh*, yang terhormat Bapak Ketua Fraksi, Anggota Komisi 3 yang kami muliakan, kami laporkan dihadapan bapak sekalian bahwa penanganan kasus Novel sampai hari ini jajaran Polda Metro masih intens melakukan, saya membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan kasus Novel ini dengan membentuk 166 penyidik yang khusus mengerjakan kasus ini, selain itu kasus ini juga kami diperiksa dan diawasi secara internal dari jajaran Irwasum dan Kadivpropam selain itu dari eksternal Ombudsman dan Kompolnas juga mengawasi kita dan bersama teman-teman KPK penyidik-penyidik jajaran Polda Metro Jaya juga bekerja sama dengan tim tekhnis dari KPK sampai hari ini kami telah meriksa 68 saksi kemudian 38 cctv yang kita bekerja sama dengan AVP untuk menganalisis lalu 91 toko kimia yang sudah kita lakukan pemeriksaan dihadapan bapak sekalian saya ingin meyakinkan bahwa penyidik Polda Metro sampai hari ini terus bekerja melakukan penyelidikan ini hanya menyangkut masalah waktu saja artinya bukan saja kasus Novel Baswedan ini yang belum bisa



kita ungkap di Polda Metro Jaya dalam 1 bulan itu kita menerima LP kurang lebih 3000 kemampuan untuk penyidikan paling bisa selesai 30 sampai 40 % tiap bulan semua juga skala prioritas gitu, jadi kita bekerja terus kami juga mohon doa restu tidak akan pernah berhenti dan tidak ada kata berhenti kita jalani terus kemudian kita bekerja berdasarkan profesionalitas dan kita juga diawasi banyak lembaga baik itu Ombudsman, Kompolnas maupun dari internal Polri bahkan teman-teman penyidik KPK kami gabung dan itu tiap minggu kita lakukan .... Saya kira itu yang mau saya sampaikan, kemudian mohon ijin tadi ada pertanyaan BJP Aris, sampai sekarang juga itu LP nya berjalan dan sudah 13 saksi yang kita periksa laporan BJP Aris kemudian kita akan melanjutkan pemeriksaan beberapa saksi dari ITE itu pak bang Masinton yang untuk Novel pak.

Kalau yang mohon ijin yang Depok siap terima kasih pak.

#### **KAPOLRI :**

Jadi saya pikir perkembangan kasus Novel Baswedan ini sebenarnya sudah mengerucut, mengerucut kepada 3 orang dan 3 orang itu sudah disampaikan ke publik yaitu dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang ada di TKP kita kan kalau menangani kasus itu selalu menggunakan 2 metoda 1 metoda induktif yaitu dari TKP baru kemudian dikembangkan siapa kemungkinan tersangka atau dari metoda deduktif yaitu kemungkinan siapa yang potensial, potensial memiliki masalah dengan yang bersangkutan dan kemudian kita mengerucut mencari siapa pelaku nya selalu dari 2 jalur itu nah dari jalur induktif ini, ini sebab beberapa saksi ketemu adalah saksi terpenting adalah saksi-saksi yang melihat pada waktu kejadian, pada hari kejadian itu adalah saksi yang terpenting nah dari situ ketemulah saksi-saksi penting ini berkat ketekunan dari tim Polda Metro dan kemudian mengarah kepada 3 orang yang sudah disampaikan sketsa nya dan sketsa itu dibuat dibantu juga dari kepolisian Australia AFP yang memiliki kemampuan itu sampaikan kepada publik setelah itu dibuka Hotline sambil tim bergerak mencari sambil Hotline di buka saya pikir sudah cukup banyak fitback yang diterima ada yang bagus a informasi nya ada juga yang tidak berarti ini ada ratusan informasi, sambil jalan ini juga beberapa pengawasan internal kita lakukan dari Mabes Polri membentuk tim juga Propam dengan Wasidik Bareskrim melakukan audit investigasi apakah langkah-langkah yang dilakukan udah benar dan kemudian dari Kompolnas sebagai pengawas Kepolisian juga sudah turun ditambah lagi dengan Ombudsman juga sudah turun sebagai pengawas kepolisian juga, bahkan teman-teman dari tim dari KPK juga sudah bergabung dikirim oleh Pimpinan dan kemudian bergabung.

Sekarang kita lihat ada perkembangan terbaru yaitu ada nya tim pemantau dari Komnas Ham ini juga saya pikir nanti akan bisa bersinergi nanti nya, nah persoalannya adalah masalah timing waktu 11 bulan seperti nya memang waktu nya terlihat panjang dibanding dengan kasus-kasus yang terungkap cepat ada kasus yang terungkap cepat hitungan jam, hitungan hari ada tapi mohon maaf ada juga kasus-kasus yang terungkap nya cukup lama belum terungkap atau terungkap nya lama ini Ibu Erma berkali-kali sependapat saya dalam berbagai setiap Raker-Raker menanyakan kasus suami istri yang meninggal dunia di Pontianak bu ya.

#### **F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Di Ketapang.

#### **KAPOLRI :**

Di Ketapang tahun 2014 ya.

## **F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Tahun 2012.

### **KAPOLRI :**

2012 sampai hari ini, ini bukan berarti Polda nya enggak serius, mereka juga serius tapi kadang-kadang ada kendala-kendala 5 tahun udah itu, bahkan Pak Junimart enggak ada Pak Junimart disini ya, sama Pak Trimedyta itu selalu menanyakan kasus pembunuhan Nelson Purba kalau enggak salah Nelson Marbun tahun 2015 yang dibunuh di Jakarta Barat sampai hari ini belum terungkap itu nah ini kemudian cukup banyak kasus-kasus contoh kasus Bom Kedutaan Besar Filipina tahun 2000 seorang Duta Besar itu luka nya parah Satpam nya putus kepala nya terbang ya itu bisa di Google juga tahun 2000 saya kebetulan ketua tim penyidik nya saat itu dilapangan sudah turun udah all out mulai dari kepolisian Indonesia dibantu FBI, dibantu Australi, dibantu Filipin dari beberapa Negara Asean Inggris semua turun terungkap nya 2003 setelah bom Bali tekanan luar biasa tinggi saat itu pada kita dari luar negeri terutama dari dalam negeri juga karena ini seorang Duta Besar ni.

Nah kemudian yang berikut nya lagi mungkin masih ingat kita juga punya ada Prancis itu punya hutang sama kita, setiap Duta Besar Prancis datang saya tanyakan itu kemarin datang, dua kali kedutaan besar kita di Bom di Kota Paris tahun 2004 dan 2012, 2012 saya yang datang ke TKP disitu 2004 korban 8 yang terluka berat kemudian 2012 hancur kantor itu kaca-kaca nya semua mobil-mobil sekitar nya hancur ditemukan video nya juga lengkap video nya orang yang meletakan bom juga ada tapi sampai hari ini juga sampai hari ini, ini 2 kasus itu belum terungkap juga oleh Kepolisian otoritas Prancis apakah kemudian kita menganggap mereka main-main tapi setiap mereka datang saya tanya terus atau kita kunjungan kesana kita tanya terus minggu lalu Duta Besar Prancis kesi bertemu **kartosicall** saya tanya lagi ada polisi nya juga saya tanya lagi juga kira-kira itu.

Dan kasus mungkin lagi kasus MH17 itu seluruh dunia mungkin sudah ngejar nyari nya penyidik investigator air crash sampai sekarang masih mending kita Adam Air ketemu titik nya di Majene sana perairan Majene, MH17 itu seluruh dunia mencari nya sampai sekarang juga belum ketemu.

Jadi masalah timing pendapat saya yang penting kita terus bekerja serius sekarang sudah ada pihak external membantu ya mari kita welcome dan kemudian tentu kita mohon doa kepada bapak-bapak, ibu sekalian dan kepada semua pihak mudah-mudahan kasus ini bisa cepat diungkap karena bagi Polri juga tidak nyaman kalau enggak terungkap kira-kira demikian makasih.

Kemudian untuk masalah tadi ada yang ditanyakan masalah Muhammad Jefri ini ada Pak Wakadensus ada.

### **WAKADENSUS :**

Iya pak siap!

### **KAPOLRI :**

Silahkan jelaskan.

## **WAKADENSUS :**

Terima kasih Bapak Kapolri, *asalamu'alaikum warahamtulahi wabarakatuh* yang kami hormati Ketua Komisi 3 para Anggota Komisi 3 yang kami hormati, ijin kami menjelaskan tentang Muhammad Jefri alias Abu Umar pak, almarhum, yang bersangkutan memang masuk daftar pencarian orang pak ketika kami dapat melakukan pencegahan aksi teror yaitu rencana pengeboman pak terhadap sasaran istana merdeka kemudian Mako Brimob TNI, Pt. Pindad kemudian Pos Polisi di daerah Makasar saat itu kami dapat mengembangkan sekitar 4 orang dari hasil keterangan itu mereka menyebutkan nama Muhammad Jefri alias Abu Umar jadi kami sempat juga menghasilkan bahwa Bom yang dibuat saat itu adalah masuk kategori jenis Bom Kimia yang kami juga sudah konfirmasi ke Badan Tenaga Nuklir Nasional itu masuk dalam kategori Torium ah setelah kami tanyakan Torium itu adalah bahan pengganti uranium pak untuk bahan bakar nuklir jadi mereka sudah sejauh itu membangun itu karena informasi keterangan tersangka yang ditangkap mereka belajar dari facebook yang dikirim oleh Bahrin Naim yang di Suriah, sehingga itu sekitar bulan Agustus tahun 2017 pak penangkapan pencegahan itu sesuai arahan Kapolri kita melakukan strategi preemtif strike pak yaitu mencegah jaringan terorisme melakukan aksi terorisme kemudian ditanggal 7 Februari 2014 pak kami berhasil melakukan penangkapan terhadap almarhum ini pak di daerah Indramayu nah kemudian tanggal 7 itu kami bawa pengembangan ketika pengembangan sore hari nya pak almarhum mengeluh sakit pak sesak nafas segala macam kemudian kami penyidik langsung membawa ke klinik di salah satu Indramayu ketika dibawa di klinik sudah meninggal dunia kemudian saat itu juga kami bawa ke Jakarta pak ke rumah sakit Kramatjati jam 2 pagi langsung dilaksanakan otopsi pak oleh ahli forensik dan patologi dokter rumah sakit Kramatjati setelah itu diketahui bahwa almarhum kena serangan jantung atau bahasa ini nya pak kena .... jantung gitu dan itu kemudian langsung kami beritahukan kepada pihak keluarga, keluarganya di Lampung kami hadirkan pak, termasuk istri siri nya yang di Indramayu kami kumpulkan di rumah sakit Indramayu kami rundingkan pak kami sampaikan jadi silahkan sempat kami persilahkan untuk memperlihatkan jenazah almarhum baik itu orang tua nya maupun istri siri nya kemudian silahkan mereka rundingkan disepakati pak tanggal 9 dibawa ke Lampung pak di daerah Tanggamus itu kesepakatan mereka kemudian langsung dikuburkan dimakamkan dan juga dari pihak keluarga di Tanggamus mereka juga sudah mengadakan rilis pak dari Polri kami dengan Kadiv Humas kemudian atas perintah Bapak Kapolri juga anggota kami diperiksa oleh Propam juga untuk netralitas terhadap hasil pemeriksaan kami, kemudian keluarga nya sudah membawakan press rilis kepada masyarakat bahwa jangan sampai kasus mati anak nya dijadikan bahan komoditas politik untuk hal-hal yang lain jadi keluarga nya tidak menerima kalau anak kematian ini dijadikan bahan politik kemudian juga mereka menerima bahwa anak nya penjelasan kepada kepolisian mengalami sakit jantung pak itu sudah ada berita acara visum et repertum nya dan sudah di ekspose oleh pihak kepolisian melalui divisi humas sehingga kami dapat menjelaskan seperti itu pak, demikian terima kasih pak *wasalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh*.

### **F-GERINDRA ( DRS. WENNY WARAOUW.):**

Ketua intrupsi Ketua.

### **F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Terus silahkan.

**F-GERINDRA ( DRS. WENNY WARAOUW.):**

Intrupsi sebentar pak.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Silahkan pak.

**F-GERINDRA ( DRS. WENNY WARAOUW.):**

Baik ke Novel pak, ingin menanyakan apa Novel sudah pernah di BAP Pak Kapolda.

**KAPOLRI :**

Setau saya sudah diperiksa di BAP di.

**F-GERINDRA ( DRS. WENNY WARAOUW.):**

Per BAP pak.

**KAPOLRI :**

Singapur pada waktu yang bersangkutan masih perawatan.

**F-GERINDRA ( DRS. WENNY WARAOUW.):**

Jadi sebenar nya kami ingin memberikan suatu pandangan juga karena sebelum kejadian itu ada ribut di KPK, ribut internal pak apakah ini juga sudah jadi materi pemeriksaan.

Yang kedua kita juga banyak cara untuk melacak kan apakah lingkungan keluarga nya juga sudah nyampe diperiksa lingkungan internal ya tetangga-tetangga nya pak ini hanya suatu pandangan supaya mungkin ini bisa mempercepat pemeriksaan terima kasih.

**KAPOLRI :**

Iya setahu kalau saya tidak salah sudah cukup banyak dilakukan pemeriksaan, berapa semua saksi semua 90 ya, iya termasuk lingkungan keluarga juga karena memanga 2 metode itu dilakukan metode dari TKP dan metode dari deduktif artinya yang potensial bermasalah dengan yang bersangkutan ya, iya tapi nanti saya kira mudah-mudahan sambil jalan yang penting tim ini tetap harus bekerja keras apalagi didukung tim dari KPK sendiri Kompolnas kemudian tim dari ombudsman dan sekarang ada tim pemantau dari Komnas Ham mudah-mudahan bisa dipercepat kami kita itu pak.

Kemudian lanjut tadi ada masalah ibu gila bisa masuk, ini sama, pertanyaan ini kita belum menemukan benang merah ah koneksi antara satu kasus lain 6, 5 kasus yang terjadi yang melibatkan penyerangan terhadap tokoh agama atau tempat ibadah ni belum yang ada adalah tadi koneksi di udara istilah nya koneksi darat belum tapi belum bukan berarti tidak kita masih memerlukan waktu untuk mendalami inikan rata-rata udah tertangkap yang 5 ini kasus di Bandung 2 di 1 di Jawa Timur kemudian di Jakarta kemudian 1 lagi di saya lupa di Aceh kalau saya tidak salah iya kalau yang di Palembang yang ada Gereja itu sudah ada titik terang mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama nanti akan di ungkap motif nya seperti nya bukan motif kaitan dengan masalah keagamaan tidak ada.

Kemudian persoalan nya adalah kenapa ni ini bisa ada gangguan kejiwaan 5 kasus ini, ini pertanyaan nya menggantung sama bagi kita tapi tegas kita saat ini tegas dan menyampaikan belum belum ditemukan koneksi tapi bukan berarti tidak kita masih mendalami apapun hasilnya kita akan laporkan nanti kepada publik ini.

Kemudian yang lain Pak Masinton sudah terjawab tadi masalah 1 saja yang terakhir mengenai masalah hibah barang ..... masalah hibah barang yang dari KPK ini Pak Kabareskrim yang mau menjelaskan pak silahkan pak.

#### **KABARESKRIM :**

Mohon ijin Pak Kapolri kami ijin langsung menjawab apa yang disampaikan Pak Masinton tadi adalah bahwa pada prinsip nya Polri hanya menerima barang rampasan atau sitaan dari KPK yang proses nya tentu seperti yang disampaikan pasal 46 ayat 2 Kuhp tentang perlakuan barang rampasan setelah inkrah dari putusan pengadilan itu ada yang dikembalikan kepada yang berhak kemudian ada yang dimusnahkan karena sifatnya ada yang menjadi milik negara, disini proses nya KPK yang bermohon kepada Menteri Keuangan untuk di mintakan ada beberapa aset ada terdahulu diserahkan di Kejaksaan juga ada nah yang kemarin pada saat pelaksanaan Rakernis reskrim mohon ijin Bapak Kapolri kami belum laporkan secara rinci hasil kegiatan Rakernis yang terakhir itu ada penyerahan aset dari KPK tentu nya berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 721 2017 itu berupa tanah dan bangunan dengan luar tanah 153 meter bangunan nya seluas 600 meter dengan nilai rupiah 12,44 milyar rupiah dan sebuah mobil kijang inova dengan harga 257,5 juta rupiah jadi proses nya KPK yang bermohon kepada Menteri Keuangan disetujui kemudian diserahkan kepada Polri nanti Polri kami melaporkan kepada Bapak Kapolri untuk dicatatkan kembali menjadi aset Polri di daftar kekayaan milik negara demikian terima kasih.

#### **KAPOLRI :**

Ya 2 lagi yang belum tadi terjawab pak dari Pak Wenny Waraouw mengenai masalah peralatan Sarpars untuk mengejar Narkoba ini betul ni pak, kita mohon kalau bisa kepada Komisi 3 termasuk mantan Ketua Bangkar pak untuk membantu ini pak, karena ini sekarang ini melalui jalur laut banyak sekali ni pak penyelundupan nya dan jalur udara nya sekarang mungkin banyak ketangkap mereka sehingga menggunakan jalur laut untuk jalur laut ini memang Polair kekurangan kapal yang memiliki kemampuan untuk cepat untuk mengejar sehingga kemarin kita minta bantuan kepada teman-teman TNI AL dan kapal teman-teman dari bea cukai pak.

Kemudian yang ke 2 untuk masalah perijinan investasi betul pak ini, ini jadi persoalan dan sudah menjadi rapat yang dipimpin langsung oleh bapak presiden dan bapak wakil presiden juga merapatkan sendiri ni pak, perijinan dalam rangka investasi ada agar ada kepastian kepada para investor karena salah satu problem yang kita hadapi adalah masalah perijinan ini terutama antara pusat dan daerah yang kadang-kadang nggak nyambung memang otonomi khusus ini disatu sisi memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur urusan nya masing-masing lebih besar tapi disisi lain menimbulkan gap terutama kadang-kadang ketidak pastian perijinan pusat membuat aturan didaerah merasa memiliki kewenangan otonomi juga itu yang terjadi dalam kasus yang di rusak apa nama nya itu, bangunan nya yang di Sulawesi Utara ini sudah dari Polri kami menjadi bagian dari tim itu pak kami sampaikan terus suara dari Komisi 3 mengenai masalah ini.

Terakhir mengenai status penyidik tadi Pak Masinton yang di KPK yang tadi nya ngambang mereka sudah meminta resmi pensiun kepada Polri sebanyak 6 orang dan saya sudah memberikan ijin untuk mereka pensiun dini jadi mereka sudah dipensiunkan dah jelas status nya kembali kepada KPK dan mereka bersedia untuk mengabdikan kepada KPK makasih pak, *asalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh.*

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

*Walaikum salam warahmatulahi wabarakatuh.*

Karena sudah semua nya kita sampai kepada kesimpulan, coba ditayangkan satu persatu ya setuju.

**RAPAT:**

Setuju.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

**KETOK PALU 1X**

2, setuju, Polri setuju.

**POLRI :**

Setuju.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

**KETOK PALU 2X**

Terus, setuju.

**F-HANURA ( SARIFUDDIN SUDDING, SH., MH. )**

Pemberantasan korupsi dan narkoba barang kali tambahkan disitu, ada.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Lain pak, narkoba sendiri itu dengan institusi lain kalau perlu tambah lagi soal terus, setuju ini.

**RAPAT:**

Setuju.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

**KETOK PALU 1X**

Terus.

**F-PD ( IR. MULYADI ):**

Itu kalau bisa usul ketua karena kerugiaan negara 39 triliun kalau bisa yang kondensat itu ada kata-kata nya sedikit karena ini besar.

**F-PDIP ( ICHSAN SOELISTIO ):**

Pimpinan Ketua, kiri Ketua, kalau memang mau dimasukan ini 2 hal yang berbeda diantara tata negara dengan kondensat kalau memang mau dimasukan saya usul sebagai poin terakhir tetapi menurut saya masalah kondensat ini kan sudah mulai diserahkan kalau tidak salah ke kejaksaan jadi arti nya tidak lama lagi sudah selesai di kepolisian terima kasih pimpinan.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Jadi kondensat itu pisahkan dengan poin itu ... sudah itu kalau mau kondensat itu itu kan yang sedang sudah ditangani sudah ditanda tangani nah jadi sudah.

**F-PD ( IR. MULYADI ):**

Di klarifikasi dulu pak betul sudah tidak terlebih lagi polisi pak, karena ada yang DPO juga pak.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Begini, maksud nya itu sedang di proses pak mau ..

**KAPOLRI :**

Kasus nya sudah P21 tapi yang bersangkutan DPO.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Kasus nya sudah P21.

**KAPOLRI :**

Kejaksaan.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Berarti sudah oke.

**KAPOLRI :**

Iya.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Nah tinggal DPO kan Polri yang menindak lanjutinya dan itu sedang dikerjakan, saya kira sudah cukup kalau, cukup, setuju.

**F-PDIP ( ARTERIA DAHLAN, ST., SH.):**

Pak Ketua, Ketua, Ketua sebentar Ketua jangan diketok dulu dong Ketua.

**ANGGOTA ..... :**

Mohon Pak Ketua masalah narkoba dicantumkan karena itu masalah berat.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Tulis aja yang ke 5 harusnya.

**F-PDIP ( ARTERIA DAHLAN, ST., SH.):**

Enggak, Ketua yang nomor 4 tadi Ketua.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Nomor 4.

**F-PDIP ( ARTERIA DAHLAN, ST., SH.):**

Ya pada prinsip nya oke Ketua tapikan kita juga minta itu dengan melibatkan Komisi 3 juga untuk terlibat mengawasi terima kasih Ketua.

**F-PG ( DR. IR. ADIES KADIR, SH., M.HUM.):**

Itukan otomatis sudah Pak Ketua, kitakan pengawas tugas nya.

**F-PD ( ERMA SURYANI RANIK, SH.):**

Itukan sudah otomatis Pak Arteria ada Panja Penegakan Hukum di Komisi 3.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Sudah, kalau itu apa mau narkoba diapain tu.

**ANGGOTA ..... :**

Dibuat tersendiri.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Dibuat tersendiri poin 5 coba poin 5 sudah ada narkoba, oh sudah itu, sudah pak, nah itu tindak pidana terorisme itukan lihat dari itukan sudah ada pak, penuntasan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat serta kejahatan yang ..... penyebaran isu, sara dan bla bla bla bla yang menarik perhatian saya demi ter ..... rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Saya kira sudah komplit itu, kalau sudah kita setuju, cukup.

### **KETOK PALU 3X**

Bapak/ibu dan saudara-saudara sekalian Anggota Komisi 3 yang terhormat Pak Kapolri kami persilahkan closing spech untuk Raker pada hari ini.

**KAPOLRI :**



Baik kami kira terima kasih banyak atas Raker ini bisa berjalan waktu nya juga relatif landai gitu pak biasa nya lebih cepat jam 3 jam 4 tapi pernah juga sampai malam yang ini relatif tengah-tengah kami ucapkan terima kasih banyak terutama masukan-masukan yang sudah ada termasuk di bagian kesimpulan tadi tentu akan menjadi atensi bagi kami pedoman untuk bekerja berikutnya sampai dengan Raker yang berikutnya, sekali lagi terima kasih banyak atas masukannya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, *assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh*.

**F-PG / PIMPINAN RAPAT ( DRS. H. KAHAR MUZAKIR.):**

Terima kasih Pak Kapolri dan seluruh jajaran nya kawan-kawan Komisi 3 yang terhormat dengan mengucapkan *alhamdulillah hirrobil alamin* Raker dengan Kapolri dan jajaran nya kami tutup.

**KETOK PALU 3 X**

**RAPAT DI TUTUP PUKUL 16.25**